

**TAFSIR ANTI KORUPSI DI KALANGAN SIVITAS AKADEMIKA  
UIN WALISONGO SEMARANG  
DAN IMPLEMENTASINYA**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana S1  
Jurusan Tafsir Hadist

Oleh :

**MUHAMMAD ADIB ISHLAHUDDIN**

NIM : 114211051

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2018**





## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga, skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Juli 2018

Penulis,

   
Muhammad Adib Ishlahuddin  
NIM. 114211051



**TAFSIR ANTI KORUPSI  
DI KALANGAN SIVITAS AKADEMIKA UIN WALISONGO SEMARANG  
DAN IMPLEMENTASINYA**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana S1

Jurusan Tafsir Hadis

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. Hasvim Muhammad M.Ag  
NIP. 19720315 199703 1 002

Pembimbing II

Dr. Zainul Adzvar M.Ag  
NIP. 19730826 200212 1 002



### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Adib Ishlahuddin

NIM : 114211051

Fak/Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora / TH

Judul Skripsi : TAFSIR ANTI KORUPSI DI KALANGAN SIVITAS AKADEMIKA UIN  
WALISONGO SEMARANG DAN IMPLEMENTASINYA

Dengan ini saya telah menyetujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, .....

Pembimbing I



Dr. Hasyim Muhammad M.Ag  
NIP. 19720315 199703 1 002

Pembimbing II



Dr. Zainul Adzvar M.Ag  
NIP. 19730826 200212 1 002





#### PENGESAHAN

Skripsi Saudara Muhammad Adib Ishlahuddin NIM 114211051 telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang pada tanggal 26 Juli 2018.

Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu ushuluddin dan humaniora.



Pembimbing I

Dr. Hasyim Muhammad, M.Ag.

NIP: 19720315 199703 1 002

Penguji I

Moh. Masrur, M.Ag.

NIP: 19720809 200003 1003

Pembimbing II

Dr. Zainul Adzvar, M.Ag.

NIP: 19730826 200212 1 002

Penguji II

Dr. H. Muh. In'amuzzahidin, M.Ag.

NIP: 19771020 200312 1002

Sekretaris Sidang

Dr. Sulaiman, M.Ag.

NIP: 19730627 200312 1003



## MOTTO

*“Padha gulangen ing kalbu, ing sasmita amrih lantip, aja pijer mangan nendra, keprawiran den kaesthi, pesunen sariranira, sudanen dhahar lan guling”*

[Latih dan biasakanlah dalam hati nuranimu, agar peka terhadap pesan-pesan keutamaan, jangan hanya makan dan tidur, utamakan keperwiraanmu, kekang dan kendalikanlah ragamu, kurangi makan dan tidur]

*“Dadiya lakunireku, cegah dhahar lawan guling, lawan aja sukansukan, anganggowa sawatawis, ala watake wong suka, nyuda prayitnaning batin”*

[Jadilah lakumu, mencegah makan dan tidur, juga jangan larut dalam kegiatan bersenang-senang, bersikaplah serba secukupnya, buruk watak orang bersenang-senang, dapat mengurangi kewaspadaan batin]

---

(Sri Pakubuwana IV, Wulangreh, Pupuh Kinanthi)



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Kata Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengga titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet

س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ş	e (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## **b. Vokal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

### **1. Vokal Tunggal**

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ايَ ... اِ	Fathah dan ya	Ai	A dan i
اوَ ... اِ	Fathah dan wau	Au	A dan u

### c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ...اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
اِ...اِ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
اُ...اِ	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh :

قال : qāla

رامى : ramā

قيل : qīla

يقي : yaqūlu

#### **d. Ta Marbutah**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

1. Ta marbutah hidup, transliterasinya adalah /t/ Contohnya:

روضۃ : rauḍatu

2. Ta marbutah mati, transliterasinya adalah /h/ Contohnya:

روضۃ : rauḍah

3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al Contohnya: روضۃ ال ط

فال : rauḍah al-aṭfāl

#### **e. Syaddah (*tasydid*)**

Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh: رَبَّنَا : rabbanā

#### **f. Kata Sandang**

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya Contohnya:

الشفاء : asy-syifā'

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/. Contohnya :

القلم : al-qalamu



### **g. Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : تأخذون : ta'khuzūna

النوء : an-nau'

شيء : syai'un

ان : inna

### **h. Penulisan kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya:

وإنَّ اللهَ لَ وَ خ ي ر الرّازق ي : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn



## **PERSEMBAHAN**

Teriring rasa syukur kepada Allah SWT tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya yang telah diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dan terakhir di semester yang paling akhir ini. Shalawat dan salam juga peneliti tujukan kepada maulana baginda nabi Muhammad SAW, yang selalu peneliti nanti-nantikan syafaat serta pancaran nur kasihnya. Skripsi ini peneliti persembahkan teruntuk kedua orangtua peneliti yang telah menukarkan tangis, keringat dan darahnya, serta doa-doa suci yang selalu dipanjatkan dalam membesarkan dan mengantar peneliti kepada setiap tangga kehidupan untuk menghadapinya dan juga mampu mengerjakan tugas akhirnya selama tujuh tahun belajar di kota Semarang ini. Dukungan dan pengertian dari orangtua, serta ditambahi doa dan semangat dari adik-adik kandung peneliti dan semua orang yang selalu ada di hari-hari peneliti membuat peneliti untuk menjauhi kata menyerah. Tugas akhir ini, di setiap huruf yang tertulis adalah tidak lain didedikasikan kepada Ayah peneliti (Bapak Mukarom) dan Ibu peneliti (Ibu Mar'ati), serta ketiga adik peneliti (Latifurrahman, Salsabila, dan Azkiya).

Tugas akhir ini lebih umum peneliti tulis yakni sebagai tambahan wacana dan ilmu dari yang peneliti tekuni, yakni dialektika sosial politik selama bertahun-tahun menempuh strata satu. Peneliti berangkat meneliti ini adalah karena adanya ironi sosial yang tragis dan membudaya, serta sulit dihilangkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dengan sebuah kolaborasi unsur sosial dan unsur keagamaan yakni kajian tafsir

sebagaimana jurusan yang peneliti ambil, serta obyek penelitian yang peneliti cukup lama mengenalnya sampai enggan meninggalkannya, peneliti berharap ada sebuah wacana, inspirasi dan inovasi yang akan dikembangkan dalam rangka kemajuan bersama agama, bangsa dan negara ini. Semoga penelitian ini bisa menjadi salah satu referensi untuk pembaca dan peneliti lain untuk juga bersama-sama membangun suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi moral, berperikemanusiaan dan berkeadilan yang setinggi-tingginya. Amin.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW, Rasul dan kekasih Allah.

Skripsi yang berjudul, *“TAFSIR ANTI KORUPSI DI KALANGAN SIVITAS AKADEMIKA UIN WALISONGO SEMARANG”* ini disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar S1, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT), Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti telah banyak mendapatkan bimbingan, motivasi dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga dapat terselesaikan. Oleh karenanya, adalah sebuah keharusan bagi peneliti untuk menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mukhsin Jamil, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
3. Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Dr. Hasyim Muhammad M, Ag dan Dr. Zainul Adzvar M, Ag. Selaku pembimbing skripsi.
5. Seluruh Dosen dan pegawai di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora.

6. Seluruh keluarga besar LPM IDEA UIN Walisongo Semarang sebagai teman dalam berproses dan mempertajam keilmuan peneliti.
7. Teman seperjuangan hujan badai diterjang : Gus Zaim, Kocol, Kholis, Jack, Adib, Ivo, Gigih, Cak Ipin, Muqsith, Gopal, Tarno, Suneo, Mbah Iin, Subuh, dan masih banyak lagi yang selalu ada di hari-hari selama 7 tahun di Semarang.
8. Adinda Anissa Gina Nazda, mentari hari-hari.
9. Teman seperjuangan angkatan 2011
10. Keluarga besar GmnI UIN Walisongo Semarang
11. Kepada Senior-senior yang selalu mendampingi dan mendidik dengan sabar.
12. Kepada warung-warung kopi di Ngaliyan Raya.
13. Kepada sedulur kontrakan IDEA.
14. Kepada semua pihak yang membantu dan memotivasi peneliti yang tidak bisa dituliskan namanya satu persatu.

Harapan dan doa peneliti, semoga amal dan jasa baiknya semua mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dengan ini dan pada akhirnya peneliti sangat menyadari kekurangan dari penulisan karya ilmiah ini dan jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi, peneliti berharap dengan sangat semoga dengan sedikitpun bisa memberikan manfaat kepada siapapun yang membacanya.

Semarang, 13 Juli 2018  
Peneliti,

Muhammad Adib Ishlahuddin

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>DEKLARASI KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II: TINJAUAN KORUPSI DALAM TAFSIR AL-QURAN</b>	
A. Definisi Korupsi.....	21
B. Faktor dan Dampak Korupsi.....	23
C. Korupsi dalam Pandangan Hukum Islam .....	27

D. Ayat-ayat tentang Korupsi .....	33
E. Asbabun Nuzul dan Munasabah Ayat .....	35
F. Penafsiran Ayat-ayat tentang Korupsi .....	40
1. Penafsiran Ayat Korupsi Menurut Ibnu Katsir.....	40
2. Penafsiran Ayat Korupsi Menurut Tafsir Al-Manar.....	49
3. Penafsiran Ayat Korupsi Menurut Tafsir al-Mishbah .....	61

### **BAB III: RESPON WACANA KORUPSI DI KALANGAN SIVITAS AKADEMIKA UIN WALISONGO SEMARANG**

A. Sejarah dan Perkembangan UIN Walisongo Semarang .....	78
1. Proses Pendirian .....	78
2. Faktor-faktor Pendorong Berdirinya IAIN Walisongo .....	83
3. Pertumbuhan dan Perkembangan IAIN Walisongo .....	86
4. Penetapan Badan Layanan Umum (BLU) .....	88
5. Transformasi IAIN Walisongo Jadi UIN Walisongo .....	89
6. Dasar Hukum .....	90
7. Visi, Misi, Tugas, Fungsi, dan Jati Diri Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.....	91



8. Lambang.....	93
9. Bendera Universitas, Fakultas, dan Pascasarjana.....	94
10. Mars dan Hymne .....	95
B. Paradigma Unity of Science .....	95
C. Corak Kajian Tafsir di UIN Walisongo.....	101
D. Representasi Wacana Korupsi di Kalangan Sivitas Akademika UIN Walisongo Semarang.....	105
E. Upaya Preventif Pencegahan Praktik Korupsi di UIN Walisongo Semarang .....	117

#### **BAB IV: ANALISIS TAFSIR ANTI KORUPSI DAN IMPLEMENTASINYA DI KALANGAN SIVITAS AKADEMIKA UIN WALISONGO SEMARANG**

A. Tafsir Anti Korupsi dan Implementasinya di Kalangan Sivitas Akademika UIN Walisongo Semarang.....	127
1. UIN Walisongo dan Penafsiran atas Wacana Korupsi .....	143
2. UIN Walisongo dan Upaya Pemberantasan Budaya Korupsi .....	154

#### **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	167
B. Saran-saran .....	168

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



## ABSTRAK

Kejahatan bernama Korupsi sudah membudaya di tengah masyarakat kita bahkan sudah masuk di ranah pendidikan, yang mana seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi ini. Khususnya di kalangan Perguruan Tinggi di Indonesia begitu penting untuk berdialektika terkait problem korupsi yang hingga kini sulit untuk diberantas. Penelitian ini mengangkat pokok permasalahan tentang bagaimana pemahaman wacana korupsi dan implementasinya dengan mengambil obyek penelitian di kampus UIN Walisongo Semarang, khususnya, para sivitas akademika di dalamnya dalam memandang wacanaproses dialektis lembaga, serta implementasi atas upaya yang telah dan akan dilakukan untuk pemberantasannya (Anti Korupsi). Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menyandarkan data primer dan sekunder, serta menggunakan metode analisis deskriptif setelah melalui proses pengumpulan dan penggalian data yang kemudian diverifikasi.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa sebagaimana para mufassir al-Qur'an yang memiliki satu pandangan dalam memandang korupsi sebagai perbuatan yang mengkhianati keridhaan Allah dan rosulnya. Kemudian di lapangan pun, yakni di kalangan sivitas akademika UIN Walisongo Semarang yang menyetujui bahwa wacana korupsi ini adalah tindakan dosa dan dilarang di dalam al-Qur'an meski tidak semua sivitasnya memahami secara detail term-term di dalam al-Qur'an. Kemudian dalam penanganan nyatanya, telah dilakukan evaluasi dan perbaikan sistem agar dapat memberantas budaya korupsi di dalamnya. Meskipun tidak dipungkiri bahwa manusia di dalamnya tetap memiliki peluang bertindak. UIN Walisongo dari tahun 2012 hingga kini telah menciptakan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi.

**Kata Kunci** : Korupsi, Anti Korupsi, Islam, Sivitas Akademika, UIN Walisongo Semarang

## BAB II

### TINJAUAN KORUPSI DALAM TAFSIR AL-QUR'AN

#### A. Definisi Korupsi

Korupsi sebagai sebuah perilaku menyimpang dalam kehidupan sosial, kenegaraan, dan kemasyarakatan telah lama dikaji oleh para ilmuwan hingga filsuf. Sampai saat ini pemaknaan korupsi tidak akan pernah selesai didefinisikan, sebab makna korupsi selalu berkembang di setiap zaman, peradaban, serta wilayah yang berbeda. Rumusan tentang korupsi pun berbeda-beda jika dilihat dari sudut pandang sosial, politik, hukum, ekonomi, bahkan agama.

Korupsi berasal dari bahasa Latin, *Corruptio* yang merupakan kata kerja dari *Corruptus*, berarti busuk, rusak, tidak jujur, tidak bermoral, dan dapat disuap.<sup>19</sup> Istilah korupsi sudah dikenal pada masa Aristoteles yang diikuti oleh Machiavelli. Pada masa itu telah dirumuskan sesuatu yang disebut dengan korupsi moral (*moral corruption*).<sup>20</sup> Dalam perjalanannya, kata *corruptio* diadaptasi ke dalam bahasa perancis dan Inggris menjadi *corruption*, bahasa Belanda menjadi *corruptie*, serta dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi.

Terdapat banyak arti korupsi dalam berbagai kamus dari beragam bahasa di dunia. Dalam bahasa Arab misalnya, istilah

---

<sup>19</sup> M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2011, h. 33

<sup>20</sup> Albert Hasibuan, *Titik Pandang untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, h. 342-347

korupsi dikenal dalam beberapa kata. Dalam kamus al-Bisri menyebutkan korupsi sebagai *risywah*, *ihtilas*, serta *fasad*.<sup>21</sup> Lain halnya dalam Kamus al-Munawwir, istilah korupsi memiliki lebih banyak arti: *risywah*, *khiyanat*, *fasad*, *ghulul*, *suht*, dan *batil*.<sup>22</sup>

Para ahli dari berbagai bidang keilmuan mengkaji dan meneliti korupsi dari sudut pandang keilmuan masing-masing. Salah satunya, Juniardi Suwanto menjelaskan korupsi ialah tingkah laku seseorang atau kelompok yang melanggar norma-norma dan menyalahgunakan kekuasaan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang atau kekayaan, demi keuntungan pribadi atau golongannya sehingga merugikan keuangan negara.

Syed Husein Alatas menyimpulkan bahwa inti dari tindakan korupsi ialah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan untuk kepentingan pribadi semata.<sup>23</sup>

Di negara Indonesia, korupsi menjadi salah satu tindak kejahatan kriminal yang memiliki kriteria serta konsekuensi hukum sesuai yang telah ditetapkan dalam Undang-undang, di antaranya

---

<sup>21</sup> Adib Bisri dan Munawir AF, *Kamus al-Bisri*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1999, h. 161

<sup>22</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta, 1984, h. 537, 407, 1134, 1089, 654, 100

<sup>23</sup> Syed Husein Alatas, *Korupsi, Sifat, dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, 1987, h. 8

Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam ayat 2 dan 3 undang-undang tersebut menyebutkan dua kriteria utama dari tindakan korupsi.

*Pertama*, setiap orang yang sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

*Kedua*, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

## **B. Faktor dan Dampak Korupsi**

Sebagai salah satu tindak kriminal yang telah lama ada, terdapat beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Secara naluriiah, ketika seseorang maupun kelompok manusia memiliki penguasaan atas jabatan, wilayah, dan sumber daya alam maka akan terjadi perebutan antarkelompok untuk memperebutkannya. Dari hal inilah muncul rasa ketidakadilan yang menjadi cikal bakal terjadinya tindak korupsi.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009, h. 3

Sejarah mencatat faktor semacam inilah pernah terjadi pada beberapa peradaban kuno yang pernah ada di bumi. Korupsi dengan berbagai macam bentuk yang bervariasi pernah terjadi pada peradaban Mesir Kuno, Babilonia, India, Yunani, Ibrani, Cina, hingga Romawi.<sup>25</sup> Sumber penyebabnya ialah berubahnya orientasi hidup manusia yang semula berpijak pada etos keadilan dan kesejahteraan bersama berubah menjadi hasrat untuk saling menguasai dan mengeksploitasi satu sama lain.

Begitu universal dan kompleksnya permasalahan korupsi membuat beberapa tokoh ilmuwan melakukan pengkajian serius terhadap fenomena ini, termasuk dalam aspek faktor-faktor penyebab terjadinya tindak korupsi. Syed Hussein Alatas mengklasifikasikan faktor penyebab korupsi ke dalam beberapa poin:<sup>26</sup>

1. Aspek kepemimpinan yang lemah
2. Tidak ada penegakan hukum yang tegas dan mampu memberi efek jera
3. Maraknya budaya konsumerisme dan globalisasi yang tidak diimbangi dengan pendidikan agama dan etika yang mumpuni
4. Aspek kemiskinan yang melanda masyarakat, serta
5. Kondisi masyarakat yang mendukung tumbuh suburnya budaya korupsi di suatu wilayah.

---

<sup>25</sup> Syed Husein Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, 1987, h. 1

<sup>26</sup> Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1986, h. 46-47

Dalam ranah hukum formal di Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKB) merumuskan beberapa aspek yang mendorong seseorang melakukan korupsi:<sup>27</sup>

### 1. Aspek Individu

Hal ini berkaitan dengan dorongan yang berasal dari hasrat pribadi seseorang untuk melakukan korupsi. Aspek pribadi ini meliputi beberapa hal, *pertama*, ketamakan manusia; *kedua*, moral yang tidak kuat menghadapi godaan. *Ketiga*, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan; *keempat*, keadaan hidup yang mendesak. *Kelima*, gaya hidup konsumtif; *keenam*, ajaran agama yang tidak diterapkan secara benar.

### 2. Aspek Organisasi

Aspek ini meliputi beberapa faktor yaitu: tidak ada keteladanan dari para pemimpin, tidak ada kultur organisasi yang baik, system penghitungan dan administrasi organisasi yang kurang mendukung, serta adanya perlindungan terhadap tindak korupsi oleh pihak manajemen organisasi.

### 3. Aspek Masyarakat

Dalam ruang lingkup yang lebih luas, aspek masyarakat juga turut mempengaruhi terjadinya tindakan korupsi. Hal-hal tersebut meliputi, tidak berfungsinya norma dan nilai normatif dalam masyarakat. Selain itu masyarakat juga kurang sadar akan

---

<sup>27</sup> Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Jakarta, 1999, h. 83



keterlibatannya dalam sebuah kasus korupsi. Dan yang paling mendasar ialah generasi muda yang sudah akrab dengan praktik korupsi sejak mereka dilahirkan.

#### 4. Aspek Perundang-undangan

Kehadiran undang-undang yang seharusnya mampu mencegah dan memberantas tindakan korupsi justru bisa berbalik menjadi dalih untuk melakukan korupsi. Hal ini terjadi ketika ada undang-undang yang masih ambigu dan multitafsir, sehingga bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan korupsi. Selain itu sanksi yang terlalu ringan dan peraturan yang tidak ditegakkan secara tegas juga menjadi faktor semakin merebaknya kasus korupsi di Indonesia.

Korupsi adalah fenomena universal yang terjadi di banyak sektor. Schwenke menjelaskan bahwa korupsi memiliki dampak yang sangat buruk yang mencakup: kerusakan lingkungan, ekonomi yang hanya dikuasai kelompok elit, demokrasi tidak tumbuh, legitimasi pemerintah rendah, kualitas hidup tergerus, lapangan kerja sektor formal menurun, lebarnya kesenjangan ekonomi, ketidakadilan dan ketidakmerataan kesempatan pendidikan dan kesehatan, buruknya fasilitas dan infrastruktur kepentingan umum.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> S., Sectoral Synthesis. In Spector, Bertram I. (Ed), *Fighting Corruption in Developing Countries*, Kumarian Press, Inc. Bloomfield, Connecticut, 2005, h. 152-180. Lihat Etty Indriati, *Pola dan Akar Korupsi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, h. 39

Dari sana dapat disimpulkan bila korupsi adalah penyakit endemik yang sangat merusak. Berakibat kompleks, biaya tinggi dalam segala hal, menghasilkan kebijakan yang keliru, merusak persaingan sehat, menghambat pengembangan pasar yang efisien, serta menyuburkan budaya materialisme, fatalisme, dan hedonisme dalam masyarakat.

### C. Korupsi dalam Pandangan Hukum Islam

Di dalam leksikal konsep keislaman, korupsi punya banyak peristilahan. Di antara istilah yang paling populer untuk menyebut korupsi adalah *al-rishwah*, *al-suht*, dan *al-ghûl*, dan lainnya. Meski demikian, istilah-istilah tersebut adalah istilah teknis untuk menerangkan macam-macam penyelewengan yang biasa dilakukan manusia. Istilah ini sendiri pada dasarnya adalah alat bantu bagi kaum Muslimin agar tetap fokus pada amanat filosofis tentang keadilan. Bahwa Islam adalah agama keadilan, sebaliknya, sangat memerangi ketidakadilan. Korupsi adalah penyelewengan yang secara langsung menantang penegakkan keadilan.

*Al-'adalah* adalah kata kunci dalam Islam. Hal inilah kenapa tujuan hukum *tashri'* (*maqasid al-ahkam al-shar'iyah*) adalah *rahmat li al'alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Rahmat tersebut dijelaskan melalui: *tahzib al-fard* (mendidik dan memperbaiki individu) demi harkat dan martabat kemanusiaan, *iqamat al-'adl fi al-jama'ah*

(menegakkan keadilan sosial) dan *tahqiq al-masalih* (penciptaan kemaslahatan-kemaslahatan).<sup>29</sup>

Di dalam al-Qur'an, konsep keadilan bisa ditemui di banyak surat dan ayat. Salah satunya, di dalam QS. al-Nahl:16:90, di mana ayat ini terbilang sangat populer yang hampir selalu disebutkan sebagai penutup khotbah Jumat. Ayat ini berisi penegasan dan perintah penegakkan keadilan dan perbuatan baik. Ayat ini berseru:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. al-Nahl:16:90).*

Dari ayat ini jelas diamanatkan bahwasannya adil dan bajik adalah anti-tesis dari perilaku korupsi. Asas perikeadilan dan kebajikan mampu membuat perilaku menyeleweng tidak terjadi. Adil berarti disiplin menempatkan segalanya di tempat semestinya. Adil, jujur, dan bijaksana adalah paket utuh untuk bisa menjadi ukuran menilai sebuah masyarakat. Masyarakat yang tidak mengedepankan disiplin dalam berkeadilan mustahil akan bisa memberantas korupsi. Karena hakikat penyelewengan adalah ketidakdisiplinan.

---

<sup>29</sup> Sjechul Hadi Permono, *Kontekstualisasi Fiqih dalam Era Globalisasi* (Orasi Ilmiah dalam rangka Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Fiqih pada IAIN Sunan Ampel Surabaya, 10 Agustus, 1994), h.14, dalam M. Helmi Umam, *PANDANGAN ISLAM TENTANG KORUPSI*, Jurnal Teosofi Vol. 3 Nomor 2 Desember 2013.

Hukum Islam atau fikih menawarkan berbagai solusi dalam mengatasi tindakan korupsi ini, diantaranya pencegahan, pemberian sanksi hukum dan sanksi moral. Dalam hukum pidana Islam yang tertuang dalam kitab suci al-Qur'an dikenal tiga sistem pemberian sanksi (*jarimah*), yaitu:

- i. *Jarimah Hudud*, Hudud berasal dari kata *had* yang menurut bahasa berarti batas-batas yang dilarang untuk dilanggar, dalam hal ini ialah perbuatan-perbuatan kejahatan yang menjangkau hak Allah atau kepentingan umum. Misalnya mencuri, murtad.
- ii. *Jarimah Qishas*, *Qishas* menurut bahasa berarti memotong, sedangkan menurut istilah berarti hukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, dalam hal ini perbuatan-perbuatan kejahatan yang menyangkut hak manusia. Misalnya membunuh, yang membedakannya dengan *hudud* ialah kalau hudud menyangkut hak Allah, sedangkan Qishas menyangkut hak manusia.
- iii. *Jarimah Ta'zir*, Ta'dzir berasal dari kata *'azzara* yang menurut bahasa berarti mencela. Sedangkan menurut istilah, *ta'dzir* ialah peraturan larangan yang perbuatan-perbuatan pidananya dan ancaman hukumannya tidak secara tegas

disebutkan dalam al-Qur'an. Akan tetapi diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim/penguasa.<sup>30</sup>

Suatu hukuman diancamkan kepada seorang pelaku tindak pidana (*jarimah*) agar orang banyak tidak turut melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu pada dasarnya pelarangan suatu perbuatan pidana dan penetapan hukum-hukumnya adalah untuk memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat, atau dengan kata lain untuk kemaslahatan umum (*almaslhatul ummah*).

Sanksi hukum *qishos* tentu saja tidak dapat diberlakukan, sebab korupsi berbeda dengan tindak pidana pencurian yang telah jelas hukumnya dalam *nash* (al-Qur'an) meskipun sama-sama merupakan pelanggaran terhadap *hifdzul mal* akan tetapi korupsi tidak ditemukan hukumnya dalam *nash*. Oleh karena itu, terhadap tindak pidana korupsi ini tidak dapat dikenakan hukuman *Qishas/hadd*.

Namun demikian, bukan berarti tindak pidana korupsi bisa lepas dari hukuman, karena perbuatan tersebut jelas-jelas telah mengganggu kemaslahatan umum, sehingga dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'dzir*, yang dalam pelaksanaannya mungkin menyamai atau bahkan melebihi sanksi hukuman *Qishas* atau *had*.

---

<sup>30</sup> Hardjono, Anwar, *Hukum Islam; Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968, h. 158.

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap jarimah *ta'dzir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringanya kepada yang sampai seberat-beratnya. Dalam hal ini penguasa diberi kekuasaan untuk menentukan hukuman-hukuman sesuai kepentingan masyarakat, dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syari'at dan prinsip-prinsip yang umum.

Dengan demikian, semua undang-undang dan peraturan atau hukuman-hukuman yang telah diberlakukan pemerintah Indonesia terhadap semua tindak pidana diantaranya korupsi sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dan yang telah disempurnakan oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 yang hal ini tergolong ke dalam *jarimah ta'dzir*, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at dan dapat mewujudkan maslahatul ummah, bisa dikatakan telah sesuai dengan prinsip *ta'dzir* dalam hukum pidana Islam, yang pada prinsipnya memang merupakan hak pemerintah dalam rangka menjaga kemaslahatan masyarakat yang dipimpinnya.

Salah satu hal terpenting yang harus ditegakkan dalam penegakan hukum Islam adalah memutuskan perkara berdasarkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Apabila seorang penegak hukum tidak memiliki moralitas dan integritas yang tinggi, maka ia akan memutuskan perkara sesuai dengan pertimbangan hawa nafsu, pribadi maupun kelompok, sehingga keputusan yang diambil

merugikan salah satu pihak yang berperkara. Oleh karena itu moralitas utama seorang penegak hukum pidana Islam harus dibangun diatas prinsip-prinsip keadilan.

Oleh sebab itu, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, apakah dilakukan oleh pejabat (pelaku tindak pidana korupsi) yang “separtai” atau rakyat kecil. Setiap individu mempunyai nilai yang sama dihadapan hukum. Disisi lain, rakyat wajib menaati pemerintah, karena agama telah memerintahkan hal tersebut selama dalam hal yang *ma'ruf*.

Selain hukum pidana, juga terdapat sanksi moral dilakukan dengan terus menerus menanamkan unsur moralitas kepada koruptor, melalui pendidikan atau memberi pertimbangan khusus menyangkut suatu kedudukan dalam masyarakat dan jabatan dalam pemerintahan. Sebab, orang yang layak dijadikan pemimpin adalah orang yang dalam setiap tindakanya selalu memperhatikan kepentingan orang banyak, sesuai pemimpin kebijakan (تَصَرَّفَ الْإِمَامُ مَنِوْطٌ بِالصَّلَاحَةِ) : sesuai dengan kemaslahatan rakyat yang di pimpinnya).<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Syaiful Ilmi, *Melacak Term Korupsi Dalam Al-Qur'an Sebagai Epistemologi Perumusan Fikih Antikorupsi*, Jurnal Khatulistiwa, Vol. 1 Nomor 1 Maret 2011, h. 12

## D. Ayat-ayat tentang Korupsi

### 1. Term *Ghulul*

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَ مَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا  
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”. (QS. Ali Imran [3]: 161).<sup>32</sup>

### 2. Term *ad-Dalw*

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah [2]: 188).<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemah*, CV. Toha putra, Semarang: 1989, h. 71

<sup>33</sup> *Ibid* h. 42



### 3. Term al-Suht

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ۖ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ  
وَأِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصْرِوْكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”. (QS. Al-Maidah [5]: 42).<sup>34</sup>

### 4. Term al-Hirabah (Perampokan)

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ  
يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ  
خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”. (QS. Al-Maidah [5]: 33).<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Ibid, h. 162

<sup>35</sup> Ibid, h. 160

## 5. Term al-Saraqah (Pencurian)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Maidah [5]: 38).<sup>36</sup>

## E. Asbabun Nuzul dan Munasabah Ayat

Sebagian besar ayat-ayat al-Quran memiliki sebab-sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul dan munasabahnyanya yang dijadikan salah satu pijakan sebelum menafsirkan ayat-ayat tersebut. Asbabu nuzul digunakan untuk melihat konteks turunnya ayat kemudian dikontekstualisasikan ke dalam konsis saat ini agar didapatkan penafsiran yang lebih dinamis dan relevan.

Termasuk dalam ayat-ayat yang berbicara tentang korupsi yang beberapa di antara terdapat asbabun nuzul yang menyertai turunnya ayat tersebut. Berikut ini asbabun nuzul dari ayat-ayat yang berbicara tentang korupsi:

### 1. Q.S. Ali Imran ayat 16

Terdapat beberapa pendapat dari para mufassir terdahulu mengenai asbabun nuzul dari ayat ini. Namun ada satu riwayat

---

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 161

yang paling banyak dikutip oleh mufassir tentang ayat ini, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, surat Ali Imran ayat 16 turun berkenaan dengan hilangnya sebuah permadani berwarna merah pasca berlangsungnya Perang Badar. Ada pula riwayat lain yang menyebutkan bahwa kasus hilangnya karpet merah ini terjadi pasca berlangsungnya Perang Uhud.<sup>37</sup>

Hakim Muda Harahap dalam bukunya *Ayat-ayat Korupsi* memaparkan hubungan surat Ali Imran ayat 16 dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Dalam surat Ali Imran ayat 159 dijelaskan bahwa Allah menampakkan figure integratif pada diri Nabi Muhammad. Sedangkan pada ayat 160 di surat yang sama menekankan prinsip berserah diri kepada Allah, sebab hanya Dialah yang mampu menolong manusia dalam berbagai macam kesulitan.

Kemudian pada ayat 161, Allah menegaskan bahwa seorang nabi tidak mungkin mengkhianati harta rampasan perang. Sebab sikap semacam itu bukanlah cerminan sikap ideal seorang nabi sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat sebelumnya. Disambung dengan ayat 162 yang menjelaskan perbedaan antara orang yang mencari ridho Allah dengan orang yang mencari murka Allah.

---

<sup>37</sup> Hakim Muda Harahap, *Ayat-ayat Korupsi*, Gama Media, Yogyakarta, 2009, h. 53-54

Maka berdasarkan hubungan antarayat di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku Nabi Muhammad akan selalu sesuai dengan tuntunan al-Quran dan tidak mungkin jika seorang nabi melakukan tindakan curang atau ghulul.<sup>38</sup>

2. Q.S. al-Baqarah ayat 188

Sebab turunnya ayat ini terekam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dan Said bin Zubair. Dalam riwayat tersebut Said berkata: “Umru al-Qais terlibat dalam pertengkaran karena sebidang tanah. Umru al-Qais berusaha mendapatkan tanah tersebut dengan mengucapkan sumpah dihadapan seorang hakim.<sup>39</sup>

3. Q.S. al-Maidah ayat 42

Imam Ahmad, Bukhori, dan Muslim meriwayatkan asbabun nuzul dari ayat ini. Ayat tersebut turun untuk menjelaskan kepada umat muslim karakter dan perangai umat Yahudi yang cenderung memfitnah Nabi Muhammad. Orang-orang Yahudi ini memang sering datang untuk mendengarkan ucapan-ucapan Nabi Muhammad. Namun mereka tidak menerima kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, melainkan disalahartikan, didustakan dikurangi, atau bahkan dlebih-lebihkan.

---

<sup>38</sup> *Ibid* h. 53-54

<sup>39</sup> *Ibid* h. 59-62

Selain itu, orang-orang Yahudi itu juga sering menerima suap untuk membenarkan atau menyalahkan suatu perkara. Perbuatan semacam ini telah menjadi mata pencaharian orang-orang Yahudi waktu itu. Hukum dipertainkan oleh orang-orang yang memiliki pengaruh.<sup>40</sup>

Dilihat dari munasabah ayat, ayat ini mengisyaratkan penjelasan tentang suap-menyuap yang ternyata sudah pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad. Ayat 43 pada surat ini menceritakan tentang para pendeta Yahudi yang menyebarkan berita bohong untuk menciptakan kebencian masyarakat kepada Nabi Muhammad. Sedangkan ayat sesudahnya bercerita tentang sandiwara orang-orang Yahudi yang mengangkat Nabi Muhammad sebagai seorang hakim yang bisa menguntungkan mereka dengan memberikan hukuman yang ringan walaupun harus menyuap.

Perbuatan suap-menyuap semacam ini telah menjadi tradisi di kalangan orang-orang Yahudi. Para pendeta sebagai pemuka agama mereka tidak pernah memperingatkan atau pun melarang terkait dengan perilaku buruk tersebut.

#### 4. Q.S. al-Maidah ayat 33

Para ulama berbeda pendapat mengenai sebab turunnya ayat ini. Pendapat yang paling banyak dikutip ialah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Yazid bin Abu Hubaib. Dalam

---

<sup>40</sup> *Ibid* h. 64-68

riwayat tersebut diceritakan, “Abdul Malik bin Marwan mengirimkan surat kepada Anas bin Malik untuk menanyakan sebab diturunkannya ayat ini. Anas menjawab bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan kasus yang dialami oleh orang-orang Arniyyin. Orang-orang tersebut menemui Nabi Muhammad, meminta untuk diajari tentang Islam.

Mereka sangat gelisah sebab cuaca kota Madinah sangat tidak cocok dengan tubuh mereka. Nabi Muhammad meminjamkan beberapa Unta beserta penggembalanya yang susunya boleh mereka peras untuk diminum sebagai pelepas dahaga. Namun sesampainya di sebuah wilayah bernama Harrah, orang-orang Yahudi tersebut kembali membelot. Mereka menyatakan murtad, membunuh para penggembala unta, dan mengambil unta tersebut sebagai barang rampasan.

Mendengar kabar itu, Nabi Muhammad mengirimkan pasukan untuk mengejar orang-orang Yahudi tersebut. Setelah tertangkap, pasukan itu memotong tangan orang-orang Yahudi, menusuk mata mereka dengan besi panas, dan meninggalkan mereka di Harrah hingga mereka meninggal dunia.<sup>41</sup>

##### 5. Q.S. al-Maidah ayat 38

Dalam sebuah riwayat dikisahkan tentang seorang wanita dari kabilah Makzumiyah yang melakukan pencurian. Mereka berkata, “Inilah perempuan yang mencuri harta benda kami dan

---

<sup>41</sup> *Ibid* h. 69-75

keluarganya akan menebusnya. Lantas Nabi Muhammad berkata, “Potonglah tangannya”.

Keluarga pelaku memberikan penjelasan, “Kami berani menebusnya 50 dinar”. Lalu dipotonglah tangan perempuan itu. Pelaku bertanya kepada Nabi Muhammad, “Apakah taubatku masih diterima, ya Rasul?” Nabi Muhammad menjawab, “Ya, engkau hari ini bersih dari dosamu, seperti pada hari engkau dilahirkan oleh ibumu”.<sup>42</sup>

## F. Penafsiran Ayat-ayat tentang Korupsi

### 1. Penafsiran Ayat Korupsi Menurut Ibnu Katsir

#### Term *Ghulul*

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ  
مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Firman Allah Swt.:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ

Artinya: “Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang.”  
(Ali Imran: 161)

Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Hasan, dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang telah mengatakan bahwa tidak layak bagi seorang nabi berbuat khianat.

---

<sup>42</sup> *Ibid* h. 80-83.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Al-Musayyab ibnu Wadih, telah menceritakan kepada kami Abi Ishaq Al-Fazzari, dari Sufyan ibnu Khasif, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa mereka kehilangan sebuah qatifah (permadani) dalam Perang Badar, lalu mereka berkata, "Barangkali Rasulullah SAW telah mengambilnya." Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya: Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. (Ali Imran: 161) Yang dimaksud dengan *al-gulul* ialah khianat atau korupsi.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdul Malik ibnu Abusy Syawarib, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid ibnu Ziyad, telah menceritakan kepada kami Khasif, telah menceritakan kepada kami Miqsam, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abbas, bahwa firman-Nya berikut ini: *Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang.* (Ali Imran: 161) diturunkan berkenaan dengan qatifah merah yang hilang dalam Perang Badar. Maka sebagian orang mengatakan bahwa barangkali Rasulullah SAW mengambilnya, hingga ramailah orang-orang membicarakan hal tersebut.



Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Turmuzi secara bersamaan dari Qutaibah, dari Abdul Wahid ibnu Ziyad dengan lafaz yang sama. Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini hasan garib. Sebagian di antara mereka ada yang meriwayatkannya dari Khasif, dari Miqsam, yakni secara mursal. Qatadah dan Ar-Rabi' ibnu Anas mengatakan bahwa ayat ini diturunkan dalam Perang Badar, yang saat itu sebagian dari sahabat ada yang berbuat korupsi dalam pembagian ganimah.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari keduanya (Qatadah dan Ar-Rabi' ibnu Anas). Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan dari seorang di antara mereka, bahwa ia menafsirkan qiraat (bacaan) ini dengan pengertian dituduh berbuat khianat.<sup>43</sup>



#### **Term *ad-Dalw***

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui.”

---

<sup>43</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al Adzim*, Dar Thoyyibah Linnasr wa attauzi', Riyadh, 1999, juz 2, h. 151

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang lelaki yang mempunyai utang sejumlah harta, sedangkan pemiutang (yang punya piutang) tidak mempunyai bukti yang kuat. Lalu lelaki tersebut mengingkari utangnya dan mengadukan perkaranya kepada hakim, padahal dia mengetahui bahwa dia berhadapan dengan perkara yang hak, dan bahwa dirinya berada di pihak yang salah (berdosa) dan memakan harta haram.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, As-Saddi, Muqatil ibnu Hayyan, dan Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam, bahwa mereka pernah mengatakan, *"Janganlah kamu membuat perkara, sedangkan kamu mengetahui bahwa dirimu berada di pihak yang zalim."*

Telah disebutkan di dalam kitab Sahihain, dari Ummu Salamah, bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda:

«أَلَا إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّمَا يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ، فَفَنُ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ نَارٍ، فَلْيَحْمِلْهَا، أَوْ لِيَذَرْهَا»

Ingatlah, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, dan sesungguhnya sering datang kepadaku orang-orang yang mengadukan perkaranya. Barangkali sebagian dari kalian lebih pandai dalam mengemukakan alasannya daripada lawannya, karena itu aku memutuskan perkara

untuknya. Barang siapa yang telah kuputuskan buatnya menyangkut masalah hak seorang Muslim, pada hakikatnya hal itu hanyalah merupakan sepotong api neraka; karena itu, hendaklah seseorang menyanggahnya atau meninggalkannya.

Ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak boleh mengubah hakikat sesuatu -dengan kata lain, tidak dapat mengharamkan yang halal dan tidak pula menghalalkan yang haram- melainkan dia hanya memutuskan berdasarkan apa yang tampak pada lahiriahnya. Untuk itu apabila keputusannya bersesuaian dengan hakikat permasalahan, memang demikianlah yang diharapkan. Jika keputusannya itu tidak bersesuaian dengan hakikat permasalahan, maka si hakim hanya memperoleh pahalanya, sedangkan yang menanggung dosanya ialah pihak yang memalsukan tanda bukti dan melakukan kecurangan dalam perkaranya.<sup>44</sup>



#### **Term *al-Suht***

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِلسُّخْتِ ۖ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

---

<sup>44</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al Adzim*, Dar Thooyyibah Linnasr wa attauzi', Riyadh, 1999, juz 1 h.521

Kalimat:

أَكَاثِرُونَ لِلشُّحِّ ۚ

Artinya: “*Banyak memakan yang haram.*”  
(Al-Maidah: 42)

Yakni suka memakan hal yang haram, yaitu suap, seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang dalam takwil ayat ini. Dengan kata lain, orang yang bersifat demikian mana mungkin hatinya dibersihkan oleh Allah, dan mana mungkin diperkenankan baginya.<sup>45</sup>

#### Term *al-Hirabah*

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Firman Allah Swt.:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ

Artinya: “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang me-merangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong*

---

<sup>45</sup> Ibid h. 113

*tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik (bersilang), atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). (Al-Maidah: 33), hingga akhir ayat Al-muharabah artinya "berlawanan dan bertentangan". Makna kalimat ini dapat ditunjukkan kepada pengertian "kafir, membegal jalan, dan menyorot keamanan di jalan".*

Demikian pula membuat kerusakan di muka bumi mempunyai pengertian yang banyak mencakup berbagai aneka kejahatan. Sehingga banyak dari kalangan ulama Salaf -yang antara lain ialah Sa'id ibnul Musayyab- mengatakan bahwa sesungguhnya menggenggam (menguasai) dirham dan dinar termasuk perbuatan menimbulkan kerusakan di muka bumi.<sup>46</sup>



### **Term *al-Saraqah***

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Allah Swt. berfirman, memutuskan dan memerintahkan agar tangan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dipotong. As-Sauri meriwayatkan dari Jabir Ibnu Yazid Al-Ju'fi, dari Amir Ibnu Syarahil Asy-Sya'bi. Bahwa sahabat Ibnu Mas'ud di masa lalu membaca ayat ini dengan bacaan berikut:

---

<sup>46</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al Adzim*, Dar Thooyibah Linnasr wa attauzi', Riyadh, 1999, juz 3, h. 94

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kanan keduanya.”

Tetapi qiraah ini dinilai *syazzah* (asing), sekalipun hukumnya menurut semua ulama sesuai dengan makna bacaan tersebut: tetapi bukan karena atas dalil bacaan itu, karena sesungguhnya dalil (memotong tangan kanan) diambil dari yang lain.

Dahulu di masa Jahiliah hukum potong tangan ini berlaku, kemudian disetujui oleh Islam dan ditambahkan kepadanya syarat-syarat lain, seperti yang akan kami sebutkan. Perihalnya sama dengan *qisamah*, *diat*, *qirad*, dan lain-lainnya yang syariat datang dengan menyetujuinya sesuai dengan apa adanya disertai dengan beberapa tambahan demi menyempurnakan kemaslahatan.

Menurut suatu pendapat, orang yang mula-mula mengadakan hukum potong tangan pada masa Jahiliah adalah kabilah Quraisy. Mereka memotong tangan seorang lelaki yang dikenal dengan nama Duwaik maula Bani Malih Ibnu Amr, dari Khuza'ah, karena mencuri harta perbendaharaan Ka'bah. Menurut pendapat lain, yang mencurinya adalah suatu kaum, kemudian mereka meletakkan hasil curiannya di rumah Duwaik.

Sebagian kalangan ulama fiqh dari mazhab Zahiri mengatakan, "Apabila seseorang mencuri sesuatu, maka tangannya harus dipotong, tanpa memandang apakah yang dicurinya itu sedikit ataupun banyak," karena berdasarkan kepada keumuman makna yang dikandung oleh firman-Nya: *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya* (Al-Maidah: 38)

Mereka tidak mempertimbangkan adanya nisab dan tidak pula tempat penyimpanan barang yang dicuri, bahkan mereka hanya memandang dari delik pencuriannya saja.

Jumhur ulama mempertimbangkan adanya nisab dalam kasus pencurian, sekalipun mengenai kadarnya masih Diperselisihkan di kalangan mereka. Masing-masing dari mazhab yang empat mempunyai pendapatnya sendiri.

Menurut Jumhur Ulama, barang siapa sesudah melakukan tindak pidana pencurian, lalu bertobat dan kembali kepada jalan Allah, sesungguhnya Allah menerima taubatnya, menyangkut dosa antara dia dan Allah. Adapun mengenai harta orang lain yang telah dicurinya, maka dia harus mengembalikannya kepada pemiliknya atau menggantinya (bila telah rusak atau terpakai). Demikianlah menurut takwil yang dikemukakan oleh Jumhur ulama.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al Adzim*, Dar Thoyyibah Linnasr wa attauzi', Riyadh, 1999, juz 3 h. 108

## 2. Penafsiran Ayat Korupsi Menurut Tafsir Al-Manar

### Term *Ghulul*

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلُفَ وَمَنْ يَغْلُفْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُؤْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا  
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”. (QS. Ali Imran [3]: 161).

Dari sisi hukum, ayat ini turun berkenaan dengan keadaan Nabi Muhammad yang berhubungan dengan Perang Uhud. Namun Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Jarir menceritakan dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini berkaitan dengan hilangnya kain merah pada saat Perang Badar. Kemudian sebagian manusia menduga bahwa Nabi Muhammad yang mengambilnya. Riwayat ini didhoifkan oleh sebagian *mufasssir* meskipun Imam Tirmidzi menilai hadis ini sebagai hadis hasan karena konteks ayat ini berkaitan dengan Perang Uhud.

Sebagian ulama lebih mengunggulkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Kalbi dan Muqotil bahwa orang-orang



Romawi. Ketika mereka meninggalkan markas yang ditinggalkan Nabi Muhammad mereka berkata bahwa mereka merasa takut saat nabi berkata, "Barang siapa yang mengambil sesuatu maka hal itu akan menimbulkan sesuatu baginya". Dan bahwa Nabi Muhammad tidak membagi kambing-kambing sebagaimana beliau tidak membagi hasil dari rampasan perang pada Perang Badar.

Kemudian nabi berkata, *"Apakah kalian menduga bahwa saya mencuri dan tidak membagi pada kalian semua?"* kemudian turunlah ayat ini.

Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Mushonnaf dan Ibnu Jarir meriwayatkan hadis mursal dari *ad-Dhohak*. Ia berkata, "Rasul mengutus para penanda kemudian mengambil rampasan perang. Nabi Muhammad membaginya di antara umatnya tapi beliau tidak membagi kepada si penanda itu. Ketika para penanda itu datang, mereka berkata, nabi membagi harta rampasan perang tapi tidak membaginya pada kami," kemudian turunlah ayat ini.

Muhammad Abduh berkata, ayat ini berkaitan dengan kejadian yang dijelaskan dalam ayat sebelumnya dan beberapa ayat setelahnya nanti. Perang Uhud yang dibenarkan. Asalnya lafal *al-Ghul* artinya mengambil secara samar seperti mencuri, dan sering terjadi pencurian harta

rampasan perang sebelum dibagi. Tindakan semacam itulah yang disebut dengan "*ghululan*".

Arrumani dan ulama lainnya berkata, sebenarnya lafal *al-Ghulul* bermula dari kata *al-Gholal* artinya masuknya air di sela-sela pohon, dan khianat dinamakan *ghulul* karena itu terjadi di kerajaan dengan cara-cara yang samar dengan jalan yang tidak halal. Oleh sebab itu, *al-Ghillu* artinya dendam atau dengki dan *al-Gholil* artinya dahaga karena kepanasan. Sedangkan *al-Ghilalah* biasa digunakan untuk slogan. Saya berkata, dan orang yang mengambil sesuatu, maka ia akan masuk di dalamnya dan menyamarkan identitas dalam dirinya. Artinya dalam diri Nabi Muhammad maupun nabi-nabi yang lain tidak ada keinginan untuk mencuri. Allah telah menjaga nabi-nabinya dari sifat mencuri, dan itu tidak mungkin terjadi pada para nabi.

Keterangan ini lebih baik daripada perkataan sebagian orang, tidak benar dan tidak terus-menerus nabi melakukan pencurian. Artinya Nabi Muhammad mengambil harta rampasan. Penjelasan ini telah disampaikan pada keterangan sebelumnya sehingga membenarkan bahwa keterangan ini meniadakan keadaan itu lebih baik daripada meniadakan perbuatan karena kabar tersebut merupakan pengakuan dengan dalil. Maka seakan dikatakan bahwa Nabi

Muhammad tidak mungkin melakukan hal tersebut, karena itu tidak termasuk sifat-sifat nabi atau sesuatu yang dilakukan oleh mereka.

Kemudian "وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" artinya segala sesuatu yang dilakukan oleh pelaku pencurian tadi di hari kiamat nanti akan didatangi apa yang dicurinya. Kebanyakan ulama memilih bahwa maksud dari pada al-ityan (datang) bahwa, nanti di hari kiamat. Benda itu akan datang membawa sesuatu yang dan meminta tuntutan dan penjelasan.<sup>48</sup>



#### **Term *ad-Dalw***

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah [2]: 188).

---

<sup>48</sup> Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al Manar, *Alhaiah al Misriyah*, 1990, juz 4 h. 177.

Maksud ayat tersebut yakni diperuntukkan untuk semua orang mukallaf (akal baligh). Yakni janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lain. Dipilihnya lafal "أَمْوَالُكُمْ" yaitu untuk membenarkan bahwa manusia seringkali memakan harta. Hal ini menunjukkan bahwa individu umat dan tanggung jawabnya, serta untuk mengingatkan agar menghormati harta orang lain dan juga menjaganya.

Artinya, inti dari memuliakan tersebut adalah untuk orang-orang yang mempunyai harta benda tersebut. Karena mengambil kehalalan dan mengambil harta orang lain tanpa haq menunjukkan bahwa setiap harta itu memiliki sisi kerugian dan keuntungan. Maka di dalam sandaran ini beralasan untuk mencegah dan menjelaskan hikmahnya sebuah hukum.

Seakan akan dikatakan, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Oleh karena hal tersebut sebagai hukum jinayah (pidana) atas diri orang yang memakannya. Dikatakan *Jinayah* terhadap umat bahwa hal tersebut merupakan salah satu anggotanya dari umat. Maka seseorang harus mendapatkan bagian dari setiap jinayah yang terjadi pada dirinya, yakni mengambil

kehalalan atas harta orang lain dengan proses yang halal, berupa memakan hartanya dengan ketaatan.

Ada makna lain yang dikatakan oleh sebagian ulama, bahwa hal tersebut untuk mengingatkan kewajiban bagi setiap manusia untuk menafkahkan hartanya di jalan yang benar. Agar supaya tidak menyia-nyiakannya di jalan yang diharamkan.

Mohammad Abduh mempunyai pandangan lain bahwa yang dikatakan sebelumnya tersebut benar secara inti, namun jauh dari pemahaman yang lebih komplit dan spesifik. Karena ada lafal "*bainakum*", yaitu jelas bahwa maksudnya sesuatu yang terjadi di antara muamalah atau lebih. Adapun maksud dari pada kata "*al aklu*" (makan), maksudnya yaitu mutlak mengambil, dan keterangannya sudah diketahui secara bahasa.

وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحَكَمِ

*"Karena menyuap mereka..."*

Hal ini membatalkan *i'tikat* yang menunjukkan bahwa kebenaran itu tidak berubah dengan hukumnya hakim. Tetapi, kebenaran tetaplah pada tempatnya. Hakim hanya menjelaskan dan menyambungkan kepada orang-orang yang berhak dengan keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi, Abduh mengatakan bahwa hakim merupakan orang yang adil yang berbicara tentang sesuatu kepada setiap

orang tentang keadilannya itu. Artinya, ketika hakim mengatakan sesuatu yang tidak benar karena kekhilafan atau mengikuti syahwatnya, maka ia telah keluar dari hakikat sebagai seorang hakim.<sup>49</sup>

#### **Term *al-Suht***

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”. (QS. Al-Maidah [5]: 42).

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ

---

<sup>49</sup> Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, *Alhaiah al Misriyah*, 1990 juz 2 h. 160.

*“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram..”*

Allah mengulang atau menunjukkan sifat-sifat mereka dengan banyaknya mendengarkan kebohongan. Hal ini untuk menguatkan ayat sebelumnya, dan sebagai pengingat terhadap ayat setelahnya. Artinya disini bahwa mereka mendengarkan kebohongan-kebohongan dari mereka, dan sebagian lain mendengarkan penerimaan, maka mereka membohongi yang lain sebagaimana juga membohongi sebagian dari mereka.

Sebagian dari mereka menerima kebohongan itu dari sebagian yang lain. Maka semua ini menunjukkan atas kedustaann atau kebohongan itu sendiri secara berturut-turut. Yang mana hal tersebut termasuk seburuk-buruknya keburukan dan sebahaya-bahayanya kerusakan. Hal itu juga merupakan tingkah laku umat-umat yang hina dan memalukan sebab mereka menikmati kebohongan di setiap hal.

Ibnu Mas'ud menafsirkan lafadz "*ashsuht*" sebagai penyuapan di bidang agama. Sedangkan Ibnu Abbas menafsirkan sebagai penyuapan di bidang hukum dan Ali menafsirkan penyuapan yang secara mutlak. Maka dikatakan Ali, beliau menjawab itu adalah *kufur*.

Umar berkata, terdapat dua bab di dalam "*asshuht*" itu, yakni mereka memakan suapan itu di dalam hukum dan mahar zina. Maka hal ini memberi faedah bahwa lafadz "*asshuht*" lebih umum daripada "*arroswah*". Dan barangsiapa yang menafsirkannya dengan arti "*ruswah*" secara mutlak atau secara *muqoyyad* (dibatasi), maka yang dikehendaki dari ayat dengan melihat turunnya pada cerita-cerita orang yahudi dan pemimpin-pemimpin mereka, tidak makna bahasa secara umum.

Ada juga yang mengatakan lafad "*ashsuht*" sebagai "*haram*" secara mutlak atau riba. Atau haram yang di dalamnya memuat kehinaan dan kekotoran seperti penyuapan. Ulama-ulama Arab berbeda pendapat di dalam makna aslinya yang dipilih atas lafad ini. *Azzujaj* berkata, hal tersebut adalah bagian dari penyuapan dan saya membongkar kerusakannya. Dengan arti membongkarnya dengan kerusakan. Termasuk dalam hal ini, surat 61 ayat 20. Oleh sebab itu, maksud dari "*ashsuht*" di sini adalah penyuapan di dalam agama dan berlebih-lebihan dalam hal keburukan dan kerusakannya, atau karena buruknya akibat dan akhir dari hal ini.

Al Farra berkata, aslinya lafadz "*ashsuht*" itu bermakna sangat lapar. Maka diucapkan "seorang laki-laki lapar perutnya". Ketika ada seorang yang makan, maka dia



tidak terlihat seperti lapar. Dalam hal ini dikehendaki berarti haram atau berbuat hal-hal yang kotor yang membawa keburukan.<sup>50</sup>

### **Term *al-Hirabah***

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”. (QS. Al-Maidah [5]: 33).

Para penukil *tafsir bil ma'sur* berbeda pendapat perihal ayat ini diperuntukkan bagi siapa. Dalam ayat di atas nampak ketersambungan antara ayat ini dengan dua ayat sebelumnya sehingga ketersambungannya terjalin dengan sempurna. Rosyid Ridha menyimpulkan dari berbagai riwayat bahwa ayat ini masih bersifat umum bagi setiap

---

<sup>50</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar, Alhaiah al Misriyah*, 1990, juz 6, h. 234-235

orang yang melakukan hal tindakan ini (*harobah*). Di negara Islam ketika Rasyid Ridho memperkirakan apakah mereka telah bertindak atau hanya sekadar persiapan.

Orang-orang yang mengatakan bahwa tindakan ini khusus untuk orang-orang muslim, mereka berkata: "Hukum-hukum orang-orang kafir dalam peperangan diketahui dengan nas-nas dan perbuatan, tidak pada derajat penyiksaan. Jawabannya bahwa siksa ini khusus untuk pelaku kejahatan seperti halnya yang telah dilakukan oleh orang-orang Urniyyin. Maka hal itu tidak diterapkan untuk mengikuti di dalam peperangan atas setiap orang kafir yang memerangi kami." Sebagian ulama berkata, bahwa pengecualian orang-orang yang taubat menunjukkan kehendak atas orang-orang muslim sehingga akan terdapat sebuah potensi.

Sesungguhnya orang kafir tidak disyaratkan untuk bertaubat sebelum mereka mampu untuk melakukannya. Jawaban atas hal ini ialah taubat dimaksudkan sebagai disyaratkan harus dilakukan sebelum mampu. Dan kesimpulan riwayat-riwayat dalam kisah Urniyyin ialah mereka menjadikan Islam hanya sebagai tipu daya untuk merampas dan merusak. Mereka mengusap mata gembala (tidak tahu malu) kemudian mereka membunuh dan sebagian dari mereka mengumpamakan sudah terbiasa dengan

melakukan hal itu dan kemudian mereka berpaling. Nabi Muhammad mengumpamakan siksa atas mereka dengan siksasn yang setimpal dengan mengamalkan firman Allah surat 40 ayat 42.

#### **Term *al-Saraqah***

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

Kalimat:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Adapun maksud daripada memotong kedua tangan yakni jika yang mencuri tersebut adalah laki-laki, maka dipotong tangan laki-laki tersebut. Ketika yang mencuri tersebut adalah perempuan, maka yang dipotong adalah tangan perempuan tersebut.

Dikumpulnya lafadz "*yad*", bukan "*yadaiهما*", hal ini karena ahli bahasa orang arab dianggap berat ketika menyandarkan "*musanna*" pada dzomir "*tasniyah*" (menggabungkan dua *tasniyah*). Seperti ayat yang lain yakni surat 4 ayat 66. Dan sungguh dijelaskan bahwa hukuman ini ditujukan terhadap laki-laki dan perempuan, sebagaimana dijelaskan juga hukum zina. karena setiap individu yang melakukan dosa itu akan menerima akibatnya. Maka Allah membalas keduanya dengan penjelasan ayat tersebut.

Meskipun hukum-hukum syariat berlaku bagi keduanya secara mutlak dan keumumannya menggunakan sifat laki dan dzomir laki-laki dalam kalimatnya, kecuali hukum syara' tertentu yang dikhususkan kepada laki-laki seperti imamah dan pembunuhan. Penyebutan secara mutlak "tangan" artinya yakni telapak tangan hingga pergelangan tangan.

جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۖ

Ini menunjukkan bahwa alasan hukuman tersebut artinya "Potonglah kedua tangannya sebagai balasan bagi keduanya karena ia mengetahui perbuatannya yang tercela". Penggunaan lafal "nakaalan" menunjukkan siksa yang paling sesuai untuk mencegah pencurian dan mengamankan harta manusia dan rohani mereka.<sup>51</sup>

### 3. Penafsiran Ayat Korupsi Menurut Tafsir al-Mishbah

#### Term *Ghulul*

Ayat tentang term *Ghulul* ini masih berhubungan erat dengan ayat yang lalu. Ayat di atas berbicara tentang khianat, sedang sifat ini merupakan salah satu sebab utama ketidakhadiran pertolongan Allah. Sebaliknya, menjauhi khianat merupakan syarat utama bagi kehadiran pertolongan-Nya. Sementara ulama menyebutkan bahwa salah satu sebab

---

<sup>51</sup> Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al Manar, *Alhaiah al Misriyah*, 1990, juz 6, h. 314

petaka dalam perang Uhud adalah apa yang dinamakan khianat oleh ayat ini.

Pasukan pemanah meninggalkan posisi mereka untuk mengambil harta rampasan perang karena mereka khawatir jangan sampai harta rampasan itu dimonopoli oleh anggota pasukan lain yang bebas berkeliaran di medan perang setelah terlihat tanda-tanda kekalahan kaum *musyrikin* pada awal peperangan.

Dalam konteks ini, diriwayatkan bahwa Rasul saw menyindir para pemanah itu dengan sabdanya: *"Apakah kami akan berkhianat dan tidak membagi buat kalian ghanimah (harta rampasan perang?)"* Memang, tulis al Biqai, para pemanah itu bergegas meninggalkan posisi mereka untuk mengambil harta rampasan perang sebelum waktunya disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Boleh jadi dengan maksud menyembunyikan apa atau sebagian yang diambarnya; boleh jadi juga karena khawatir jangan sampai pimpinan mereka tidak membaginya, atau khawatir adanya khianat yang mengakibatkan Nabi saw tidak membaginya dengan adil. Kalau hal-hal ini penyebabnya, tentu saja bukan itu adalah suatu kecerobohan yang tidak dapat dibenarkan oleh akal sehat.

Mutawalli asy-Sya'rawi mengemukakan pandangan yang sedikit berbeda. Menurutnya, dalam perang Badar

Rasul SAW Mengumumkan bahwa *"Siapa yang membunuh seseorang maka harta rampasan yang ditemukan bersama sang terbunuh menjadi miliknya"*. Kebijakan ini beliau tetapkan untuk mendorong semangat juang kaum muslimin. Ketika Perang Uhud, para pemanah menduga ketentuan tetap berlaku, bahkan ada yang menduga bahwa ketentuan Rasul di atas tetap berlaku, bahkan ada yang menduga bahwa mereka tidak akan diberi harta rampasan. Tentu saja, tidak bisa membagi harta rampasan untuk semua pasukan adalah tidak adil. Ia merupakan salah satu bentuk pengkhianatan. Karena itu, ia berbicara tentang pengkhianatan.

Ayat ini menegaskan bahwa: Tidak mungkin dalam satu waktu atau keadaan orang nabi berkeliaran karena salah satu sifat mutlak nabi adalah amanah, termasuk tidak mungkin berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Hal itu tidak mungkin bagi semua nabi, apalagi Nabi Muhammad Saw penghulu para nabi. Umatnya pun tidak wajar melakukan pengkhianatan. Barang siapa berkhianat dalam urusan rampasan perang, atau dalam hal apa pun, maka pada Hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatnya itu; kemudian setiap diri diberi pembalasan sempurna setimpal tentang apa yang dia kerjakan baik atau buruk sedang mereka tidak dianiaya sedikit pun.

Memang, mengambil sesuatu secara tidak hak dalam peperangan pula merupakan yang sangat buruk dan bertentangan sepenuhnya dengan prinsip berjuang di jalan Allah. Yang ini mengambil sesuatu yang tidak bernilai, sedangkan berjuang bukan saja bersedia untuk tidak mengambil tetapi bersedia untuk memberi sesuatu yang paling berharga yaitu jiwa raga.

Kata *tsumma* yang diterjemahkan di atas memberi isyarat betapa jauh nilai barang yang disembunyikan atau dikhianatinya dengan balasan yang diterimanya. Dia bagaikan minum seteguk air, tetapi akibatnya binasa. Ini karena air yang diminumnya itu mengandung setetes racun.<sup>52</sup>



#### **Term *ad-Dalw***

Janganlah kamu memakan harta sebagian kamu antara kamu janganlah memperoleh dan menggunakannya. Harta yang dimiliki si A hari ini, jadi milik si B esok. Harta seharusnya memiliki fungsi sosial sehingga sehingga sebagian di antara apa yang dimiliki si A seharusnya dimiliki pula oleh si B, baik melalui zakat maupun sedekah. Ketika si A menganggap harta yang dimiliki si B merupakan hartanya juga, maka ia tidak akan merugikan si B, karena itu berarti merugikan dirinya sendiri.

---

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Lentera Hati, Ciputat, 2000, h. 319-321

Salah satu yang terlarang dan sering dilakukan oleh masyarakat adalah menyogok. Dalam ayat ini diibaratkan dengan menurunkan timba ke dalam sumur untuk memperoleh air. Timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain, khususnya yang tidak berada di dekat sumur. Penyogok menurunkan keinginannya kepada yang berwewenang memutuskan sesuatu, tetapi secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu secara tidak sah. Jangan kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan batil dan menurunkan timbamu kepada hakim yakni yang berwewenang memutuskan, dengan tujuan memakan sebahagian dari harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu telah mengetahui buruknya perbuatan itu.

Sementara ulama memahami penutup ayat ini sebagai isyarat tentang bolehnya memberi sesuatu kepada yang berwenang bila pemberian itu tidak bertujuann dosa, tetapi bertujuan mengambil hak pemberi sendiri. Dalam ini, yang berdosa adalah yang menerima bukan yang memberi. Demikian tulis al-Biqai dalam tafsirnya. Hemat penulis isyarat yang dimaksud tidak jelas bahkan tidak benar, walaupun ada ulama lain yang membenarkan ide tersebut seperti ash-Shanani dalam kitab hadisnya, “*Subulus Salam*”.



Ayat di atas dapat juga bermakna, janganlah sebagian kamu mengambil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak, dan jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwewenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa, dan dalam keadaan mengetahui bahwa kalian sebenarnya berhak.<sup>53</sup>



### **Term *al-Suht***

Ayat tentang *Suht* ini merupakan lanjutan dari ayat lalu yang tentang sifat berbicara sifat sementara orang Yahudi. Kalau dalam ayat yang lalu dikemukakan bahwa mereka amat suka mendengar kebohongan dan amat suka mendengar berita untuk disampaikan kepada orang lain pada ayat ini ditekankan bahwa; Mereka membenarkan berita yang amat mendengar, yakni menerima dan lolong bukan sekadar mendengarnya dengan penuh antusias.

Di samping itu, juga di antara mereka yang yakni memperoleh dan menggunakan yang haram, seperti riba, sogok-menyogok, dan lain-lain. Karena itu jika seandainya mereka, yakni orang-orang Yahudi itu, datang wahai Mahammad, untuk meminta putusan, maka putuskanlah

---

<sup>53</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Lentera Hati, Ciputat, 2000, h. 387-388.

perkara yang ajukan di antara atau berpalinglah dari mereka yakni kamu dapat memilih memutuskan atau tidak dan jika seandainya berpaling dari yakni menolak permintaan mereka.

Maka yakinlah bahwa mereka tidak akan memberi mudharat sedikitpun. Dan jika seandainya engaku memilih untuk memutuskan perkara mereka maka putuskanlah perkara yang mereka ajukan itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Kata *Suht* pada mulanya berarti sesuatu yang membinasakan. Sesuatu yang haram pasti membinasakan pelakunya. Ada juga yang menyatakan bahwa kata tersebut pada mulanya digunakan untuk melukiskan binatang yang sangat rakus dalam melahap makanan. Seseorang yang tidak peduli dari mana dan bagaimana ia memperoleh harta, ia dipersamakan dengan binatang yang melahap segala macam makanan sehingga pada akhirnya binasa oleh perbuatannya sendiri.

Dalam ayat ini digunakan kata “*in*” jika atau seandainya. Kata ini antara lain mengandung makna keraguan akan terjadinya apa yang diberitakan. Dari sini dipahami bahwa sebenarnya, ketika orang-orang Yahudi datang meminta putusan kepada Nabi Muhammad SAW mereka dalam keadaan ragu atau menduga bahwa Nabi Muhammad SAW, akan memutuskan sesuatu yang

menyenangkan mereka, tetapi ternyata dugaan mereka meleset sehingga mereka menyesal. Sedangkan, penggunaan kata tersebut, ketika memberi kepada Nabi Muhammad SAW memutuskan atau tidak, untuk mengisyaratkan bahwa Nabi Saw tidak antusias untuk memberi putusan karena Nabi Saw yakin bahwa mereka sebenarnya tidak menuntut keadilan tetapi yang sesuai dengan hawa mereka.

Alternatif yang ditawarkan ayat ini kepada Nabi disebabkan adanya dua hal yang bertentangan. Dari satu sisi keharusan menegakkan keadilan menuntut Nabi untuk memberi putusan. Tetapi di sisi lain, karena mereka pada hakikatnya bukan menuntut keadilan maka jika nabi memutuskan dengan adil, mereka akan menolaknya, dan ini berarti pelecehan terhadap putusan Nabi Muhammad SAW.

Dapat juga dikatakan bahwa permintaan orang-orang Yahudi kepada, Nabi Muhammad SAW untuk memutuskan perkara mereka, bukan didasarkan atas kepercayaan mereka terhadap beliau sebagai Nabi kepercayaan mereka akan kejujuran dan keadilan beliau atau didasarkan kedudukan beliau sebagai pemimpin masyarakat Madinah yang mereka telah akui sebelum ini ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah menghimpun semua kekuatan masyarakat. Atau, boleh jadi juga permintaan itu mereka ajukan kepada Nabi Muhammad SAW yang mereka percayai sebagai Nabi orang-

orang Arab bukan rabi orang-orang Yahudi karena seperti diketahui, sekelompok orang Yahudi mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi orang-orang Arab yakni kelompok yang dikenal dengan nama *al-Isawiyah*.

Memang, sejak dahulu hingga kini, ada orang-orang yang mengakui kenabian Muhammad SAW walaupun dalam saat yang sama dia tetap mempertahankan agamanya, seperti Theodore Abu Qurrah, seorang uskup dari Harran Mesopotamia, yang lahir pada 740 M. Uskup ini menempatkan Nabi Muhammad SAW pada para nabi dan menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah menempuh jalan para nabi.<sup>54</sup>



### **Term *al-Hirabah***

Pelampauan batas oleh ayat yang lalu dapat terjadi dalam beberapa bentuk seperti pembunuhan dan perampokan. Karena pembunuhan diniali bagaikan membunuh semua orang, boleh jadi timbul bahwa pembalasan atas mereka juga lebih dari sekadar menghilangkan nyawanya. Karena itu ayat ini berbpesan, sesungguhnya pembalasan yang adil dan setimpal atas orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, yaitu melanggar dengan angkus setiap peraturan yang dibuat oleh

---

<sup>54</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Lentera Hati, Ciputat, 2000, h. 124-127.

Allah dan Rasul-Nya. Dan berkeliaran membuat kerusakan di bumi, yakni dengan melakukan perampokan, pembunuhan, pencurian dengan menakuti masyarakat. Hanyalah mereka di bunuh tanpa ampun jika mereka membunuh, tnpa mengambil harta, atau disalib setelah dibunuh apabila mereka merampok dan membunuh untuk menjadi pelajaran bagi yang lain sekaligus menenteramkan masyarakat umum bahwa penjahat telah tiada.

Atau dipotong tangan kanan mereka apabila mereka mencuri tanpa membunuh, atau dipotong kaki kiri mereka dengan bertimbal balik karena mereka telah menimbulkan ketakutan dalam masyarakat. Atau dibuang dari negeri kediamannya yaitu dipenjarakan agar tidak menakutkan masyarakat. Ini jika tidak merampok harta. Yang demikian itu, yakni hukuman-hukuman itu sebagai bentuk penghinaan mereka di dunia sehingga selain mereka yang berniat bertindak jahat akan tercegah melakukan hal serupa. Tetapi bukan hanya itu hukuman yang akan mereka terima di akhirat jika mereka ntidak bertaubat. Mereka akan memperoleh siksaan yang besar.

Kemudian ayat selanjutnya memberikan pengecualian, yakni kecuali bagi orang-orang yang taubat di antara mereka. maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dari itu hak Allah

untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka yang bertaubat sebelum ditangkap itu dicabut-Nya. Tetapi hak manusia yang diambil oleh penjahat yang bertaubat itu harus dikembalikan atau dimintakan kerelaan pemilik-pemilikinya.

Ayat ini turun berkaitan dengan hukuman yang ditetapkan Nabi dalam kasus suku al-Urainiyyin. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa sekelompok dari suku Ukal dan Urainah datang menemui Nabi Muhammad setelah menyatakan keislaman mereka. Mereka mengadu kepada Nabi Muhammad tentang kehidupan mereka masing-masing. Maka Nabi Muhammad memberikan mereka sejumlah unta agar mereka dapat memanfaatkan dengan meminum susu dan kencingnya.

Di tengah perjalanan mereka membunuh pengembala unta itu, bahkan mereka murtad. Mendengar kabar itu, Nabi Muhammad memerintahklan pasukan berkuda dan berhasil menangkap mereka sebelum tiba di perkampungan mereka. Pasukan yang berhasil menangkap perampok itu memotong tangan dan kaki mereka, mencungkil mata mereka dengan besi yang panas, kemudian ditahan hingga akhir hayat mereka. Ayat ini turun untuk menegur perlakuan tersebut. Maka dari itu redaksi dalam ayat ini menggunakan kata *hanyalah: pembalasan atas mereka hanyalah dan seterusnya.*

Ayat ini, sebagaimana yang dijelaskan di atas menyangkut kasus yang terjadi di suku al-Urainiyyin. Tetapi karena redaksinya bersifat umum, maka tentu saja sesuai dengan pemahaman kaidah tafsir “pemahaman teks ayat bukan berdasarkan sebab-sebab turunnya ayat, melainkan karena redaksinya yang umum”. Para ulama membahas maksud ayat yang bersifat umum, dalam hal ini hanya ayat yang berbunyi *Yuharribuna Allah wa rasulahu*: memerangi Allah dan rasul-Nya. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat.

Imam Malik memahaminya, dalam arti mengangkat senjata untuk merampas harta orang lain yang sejatinya tidak ada permusuhan antara yang merampas dan yang dirampas. Baik perampasan tersebut terjadi di dalam kota atau di tempat terpencil. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perampasan itu harus terjadi di tempat terpencil sehingga jika terjadi di kota atau keramaian, ia tidak termasuk dalam kategori *yuharribuun*.

Ulama-ulama bermadzhab Syafii dan Abu Hanifah memahami kata “aw” pada ayat ini berfungsi sebagai perincian yang disebutkan sanksinya secara berurutan sesuai dengan jenis dan bentuk kejahatan yang telah mereka lakukan. Yakni jika pelaku kejahatan itu sekadar membunuh, maka ia juga harus dibunuh tanpa ampun. Sedangkan ia membunuh, merampok, dan menakuti masyarakat, maka ia

dibunuh dan disalib. Jika sekadar merampok tanpa membunuh, kaki dan tangannya dipotong menyilang. Dan jika tidak melakukan apa-apa, hanya menakuti masyarakat maka ia dibuang atau dipenjarakan.

Firman Allah: *Dibuang dari negeri tempat tinggalnya* dipahami sebagian Ulama dalam arti ditempatkan dalam sebuah lokasi yang jauh, terpencil, dan tidak mudah untuk meninggalkannya. Di Indonesia misalnya Pulau Nusakambangan. Imam Abu Hanifah memahaminya dalam arti dipenjarakan. Ada juga yang menekankan pada substansi hukuman ini yaitu bahwa hukuman ini bermaksud untuk menghalangi pelaku kejahatan agar tidak mengganggu masyarakat. Sehingga cara apapun untuk mencapai tujuan ini dapat dibenarkan.

Yang dimaksud dengan “*Sebelum kamu menguasai mereka*” adalah sebelum mereka ditangkap atau walau sebelum mereka ditangkap tetapi mereka telah terkepung. Kata tersebut memberikan kesan bahwa saat itu mereka masih memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian siapa yang masih memiliki kemampuan untuk melakukan kejahatan, tetapi ia datang dan menyerah secara sukarela dan menyesali kesalahannya, seluruh sanksi hukum yang disebutkan dalam ayat ini gugur baginya. Ketentuan ini merupakan bukti bahwa tujuan



hukuman dalam tuntunan ayat al-Quran bukan sekadar pembalasan tetapi lebih banyak berpihak pada aspek Pendidikan. Ayat ini dijadikan sebagian ulama sebagai media untuk menggugurkan berbagai macam sanksi hukum apabila pelakunya benar-benar bertaubat.

Hal ini dikuatkan pula dengan sebuah riwayat yang mengatakan bahwa seorang sahabat datang menemui Nabi Muhammad agar ia diberi sanksi hukum atas tindak kejahatan yang telah ia lakukan. Sahabat itu mendatangi rasul selepas wudhu dan melaksanakan salat. Usai salat ia mengulangi permohonannya. Maka Nabi Muhammad pun bersabda, “*Bukankah tadi Anda sudah berwudu dan salat bersama?*” Sebagian ulama berpendapat sanksi yang dimaksudkan oleh pemohon berupa *had* akibat pelanggaran yang mengharuskan ia didera. Jika demikian sanksi dapat gugur apabila yang bersangkutan bertaubat dan melakukan hal-hal baik. Sementara ulama lain memahami hadis ini bukan termasuk dalam kaitan sanksi seperti yang dipahami oleh pakar-pakar hukum. Dosa yang dimaksud oleh ulama ini ialah dosa-dosa kecil yang tidak terlibat sanksi duniawi.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Lentera Hati, Ciputat, 2000, h. 124-127.

### **Term *al-Saraqah***

Setelah sebelum ini menjelaskan sanksi hukum bagi perampok, kini dijelaskan sanksi hukum untuk pencuri. Yaitu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah pergelangan tangan keduanya sebagai balasan duniawi atas apa yang mereka lakukan. Dan sebagai siksaan yang menjadikan ia jera dan orang lain takut melakukan hal serupa dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana dalam menetapkan ketentua-Nya.

Tetapi jika ia menyadari kesalahan dan menyesalinya dan bertaubat, maka barang siapa bertaubat di antara pencuri itu sesudah melakukan penganiayaannya, yakni pencuriannya itu walaupun telah berlalu waktu yang lama dan memperbaiki diri, antara lain mengembalikan apa yang telah dicurinya atau nilainya kepada pemilik yang sah maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sehingga ia tidak akan disiksa di akhirat nanti. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kata *as-sariq* (pencuri) memberikan kesan bahwa yang bersangkutan telah berulang-ulang melakukan pencurian sehingga wajar kalau ia disebut sebagai pencuri. Jika kita memahami demikian, ini berarti orang-orang yang baru sekali melakukan pencurian belum wajar dinamai pencuri. Dengan demikian ia belum atau tidak dikenai sanksi

yang disebutkan dalam ayat di atas. Berbeda lagi jika kata tersebut dimaknai sebagai “lelaki yang mencuri” sebagaimana terjemahan Tim Departemen Agama dalam *al-Quran dan Terjemahnya* (Cetakan Saudi Arabia, Rajab 1415 H).

Memang mayoritas ulama memahami kata *as-sariq* dan *as-sariqah* dalam arti sebagaimana terjemahan Departemen Agama itu. Jika demikian, meskipun hanya sekali seseorang tertangkap mencuri, maka sanksi dalam ayat ini harus dijatuhkan kepadanya.

Jika memang demikian bagaimana dengan redaksi yang digunakan dalam ayat al-Quran di atas? Jawabannya di antaranya ditemukan dalam memahami sifat-sifat Allah, *al-Ghaffar* yakni Sang Maha Pengampun. Imam Ghazali menjelaskan bahwa *al-Ghaffar* adalah yang menampakkan keindahan dan menutupi keburukan. Dosa-dosa adalah bagian dari keburukan yang ditutupi dengan tidak menampilkannya di dunia serta mengesampingkannya di akhirat.

Sesungguhnya pencuri yang telah tertangkap telah melakukan pencurian berulang-ulang menutupi kesalahannya sehingga tidak diketahui orang lain. Tetapi karena ia tidak menghentikan kelakuannya, Allah tidak lagi menutupi kesalahannya dan ketika itu pencurinya tertangkap. Orang

lain yang tidak mengetahui bahwa selama ini Allah menutupi kesalahan yang bersangkutan.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Lentera Hati, Ciputat, 2000, h. 319-321

### **BAB III**

## **RESPON WACANA KORUPSI DI KALANGAN SIVITAS AKADEMIKA UIN WALISONGO SEMARANG**

### **A. Sejarah dan Perkembangan UIN Walisongo Semarang**

#### **1. Proses pendirian**

Ide perlunya pendirian Perguruan Tinggi Islam di Jawa Tengah muncul dari Drs. Soenarto Notowidagdo, bupati Kudus. Gagasan dan pemikiran tersebut berangkat dari kenyataan bahwa mayoritas penduduk Jawa Tengah, Khususnya bagian utara, beragama Islam dengan mata pencaharian sebagai pedagang dan petani. Di sisi lain, Jawa Tengah merupakan salah satu basis dan kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kehadiran Perguruan Islam selain untuk mendalami dan mendakwahkan ajaran Islam, juga diharapkan bisa menanggulangi dan membendung kekuatan dan gerakan komunis.

Drs. Soenarto Notowidagdo menyebarluaskan gagasan tersebut sejak tahun 1958, ketika masih menjadi ketua lembaga pendidikan Ma'arif NU Jawa Tengah. Gagasannya baru terealisasi pada tahun 1962, ketika ia terpilih menjadi bupati Kudus.

Meskipun mendapatkan tantangan yang berat dari pihak komunitas, prakarsa Bupati tetap berjalan, bahkan semakin mendapat dukungan dari masyarakat luas. Akhirnya pada

Oktober 1963, dua Fakultas berhasil didirikan, yaitu Fakultas Ekonomi dan Fakultas Agama. Fakultas Ekonomi di bawah bimbingan dan pengawasan Universitas Diponegoro Semarang. Sedangkan Fakultas Agama dibimbing oleh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Fakultas Ekonomi tersebut kemudian berubah menjadi Fakultas Ekonomi Sunan Muria Kudus. Sedangkan Fakultas Agama yang semula direncanakan bernama Fakultas Dakwah, demi strategi pencapaiannya, diputuskan bernama Fakultas Tarbiyah Kudus dengan satu jurusan, yakni Pendidikan Agama.

Fakultas Tarbiyah Kudus menjadi bekal bagi dirintisnya IAIN Walisongo di Semarang pada bulan Desember 1996. Drs. Soenarto Notowidagdo berkonsultasi dengan beberapa pejabat dan bermusyawarah dengan beberapa tokoh muslim untuk merintis berdirinya Fakultas Syari'ah di Semarang. Untuk tujuan itu, dibentuk dua badan yang berbentuk edukatif dan yayasan yang bertanggung jawab untuk mengusahakan dana. Badan edukatif sendiri diketuai oleh Drs. Soenarto Notowidagdo, sedangkan yayasan al-Jami'ah dipimpin oleh KH. Ali Masyhar, Kepala Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah waktu itu.

Dalam melaksanakan tugasnya, ternyata terjadi perbedaan yang mendasar antara ketua badan edukatif dan ketua yayasan al-Jami'ah, sehingga pendirian Fakultas Syari'ah di

Semarang menjadi Terbengkalai. Perbedaan tersebut berpusat pada masalah apakah Fakultas Syari'ah akan didirikan secara otonom ataukah menginduk ke IAIN Sunan Kalijaga. Perbedaan tersebut tidak dapat didamaikan dan jalan sebagai jalan keluarnya, rencana pendirian Fakultas Syari'ah diubah menjadi Fakultas Dakwah. Kemudian realisasinya diserahkan kepada Drs. H. Masdar Helmy dengan dasar Putusan MPRS No. II/1962.

Adanya dua pandangan tentang proses pendirian IAIN Jawa Tengah di Semarang, selesai setelah IAIN Walisongo berdiri, dengan kesatuan misi yakni untuk mendirikan perguruan tinggi Islam di Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dengan adanya dukungan penuh dari K.H Ali Masyhar, dengan menyediakan fasilitas gedung, kantor dan sarana perkuliahan milik yayasan al-Jami'ah yang dipimpinnya guna menunjang kegiatan belajar-mengajar mahasiswa IAIN Walisongo. Gedung tersebut digunakan hingga IAIN Walisongo memiliki kampus sendiri di Jerakah, Kecamatan Tugu, Ngaliyan, Semarang pada tahun 1975.

Akhirnya, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 40 Tahun 1969 tertanggal 22 Mei 1969, Panitia Pendiri IAIN Walisongo Jawa Tengah resmi berubah menjadi panitia negara, yang kemudian merintis pendirian beberapa fakultas di berbagai kota yang ada di Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Drs. H. Masdar Helmy bersama beberapa anggota panitia setempat ditugasi merealisasi berdirinya Fakultas Dakwah di Semarang.
2. S. A. Basori dibantu oleh Drs. M. Amir Thoha dan anggota dan anggota panitia setempat ditugasi merealisasi berdirinya Fakultas Syari'ah di Bumiayu.
3. K.H. A hmad Malik bersama dengan Doemami, SH., Bupati Kepala Daerah Kabupaten Demak, dibantu panitia setempat ditugasi merelaisasi berdirinya Fakultas Syari'ah di Demak.
4. Drs. Soenarto Notowidagdo (Ketua Umum Panitia Pendiri), dibantu oleh K.H Abu Amar, Soekarno, BA., Drs. Edi Sarjono dan beberapa anggota panitia setempat mendirikan Fakultas Ushuluddin di Kudus.
5. K.H. Zubair dan panitia pendiri Fakultas Tarbiyah Nahdlatul Ulama yang telah beberapa tahun berdiri, merintis penggabungan fakultas tersebut menjadi fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo dan berkedudukan di Salatiga.

Dalam perjalannya, panitia pada tiap-tiap fakultas berhasil menunaikan tugasnya, juga berhasil membuka penerimaan mahasiswa baru dan perkuliahan perdana dibuka secara berantai oleh panitia pendiri IAIN Walisongo. Dengan demikian, sampai dengan tahun 1969, sebelum penegeriannya, IAIN Walisongo telah memiliki lima fakultas.



Adapun susunan pimpinan IAIN Walisongo pada periode perintisan (masa persiapan penegerian 1968 s.d. 1970) adalah sebagai berikut:

Rektor : Drs. Soenarto Notowidagdo  
 Wakil Rektor I : K.H. Moh Sowwam  
 Wakil Rektor II : Hasan Salim al-Habsyi, MA.  
 Wakil Rektor III : Drs. H. Masdar Helmy

Sedangkan susunan Dekan Fakultas saat itu adalah:

Fakultas Dakwah di Semarang : Drs. H. Masdar Helmy  
 Fakultas Syari'ah di Demak: K.H. Ahmad Malik  
 Fakultas Syari'ah di Bumiayu : Drs. M. Amir Thoha  
 Fakultas Ushuluddin di Kudus : K.H. Abu Amar  
 Fakultas Tarbiyah di Salatiga : K.H. Zubair

Untuk memperlancar mekanisme kerja pada tingkat institut, di samping dana bantuan yang diterima dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah, keseluruhan pembiayaan ditanggung oleh tiap-tiap panitia pendiri.

Setelah keluar keputusan Menteri Agama RI No. 30 dan 31 tahun 1970 pada tanggal 6 April 1970, Menteri Agama meresmikan penegerian IAIN Walisongo. Upacara peresmian bertempat di gedung Balaikota Kotamadya (Kota) Semarang, yang ditunjuk selaku rektor saat itu (rektor pertama sejak IAIN Walisongo denegerikan) adalah K.H Zubair yang menjabat hingga tahun 1973.

## **2. Faktor-faktor Pendorong Berdirinya IAIN Walisongo**

Rencana pendirian IAIN Walisongo tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat yang melatarbelakanginya. Mulai dari faktor politik, budaya, dan keagamaan yang melingkupinya.

### **a) Situasi Politik**

Setelah kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih disibukkan dengan penanganan separatisme dan pemberontakan. G 30 S/PKI menjadi pemberontakan paling besar yang terjadi pada tahun 1965. Gerakan ini menorehkan sejarah buruk bagi perjalanan Bangsa Indonesia. PKI dinyatakan menjadi organisasi terlarang, karena telah melakukan kudeta terhadap Negara yang sah. Pengalaman pahit ini menjadikan Islam menjadi tumbuh berkembang. Demikian pula partai NU semakin kuat bersama partai PNI, setelah Masyumi dibubarkan.

Karena kuatnya representasi NU dalam struktur kekuasaan di Jawa Tengah pada waktu itu, maka para pendiri IAIN yang notabene adalah aktifis-aktifis NU dengan mudah bisa melakukan pendekatan kepada pihak kekuasaan dan militer/ABRI (sekarang TNI). Pendirian IAIN memperoleh dukungan dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah (Brigjen Moenadi), Pangdam VII

Diponegoro (Mayjen Soerono), Pandak IX (Brigjen Pol. Soemantri Sakimi), dan Kajati Propinsi Jawa Tengah (Soegiri, SH).

**b) Latar Belakang Budaya**

Cikal bakal IAIN Walisongo adalah Fakultas Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama (STA) yang didirikan di Kudus, Jawa Tengah pada tahun 1963. Secara geografis dan ekologis, Kudus terletak di lingkungan wilayah maritim di pesisir Utara Jawa. Sejak abad XVI, Kudus tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan pelabuhan Gresik, Surabaya, Sedayu, Tuban dan Jepara di pesisir bagian timur dan pelabuhan lain di pesisir bagian barat, yakni Tegal, Pemalang dan Pekalongan. Kota-kota pelabuhan tersebut merupakan mata rantai perhubungan antara pusat pertumbuhan ekonomi maritim Islam di Jawa dengan perdagangan internasional di Malaka dan pelabuhan lain di Nusantara.

Dalam sejarah, Sunan Kudus (Ja'far Shodiq) dikenal sebagai tokoh yang berperan dalam penyebaran Islam di wilayah Kudus. Setelah Islam berkembang, Kudus dikenal sebagai masyarakat yang agamis dan toleran. Nilai dan norma yang berjalan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari adalah nilai Islam.

Selain sebagai kota santri, Kudus dikenal sebagai kota industri. Beberapa tempat bisnis seperti pasar dan pabrik

rokok telah muncul sejak abad ke-19. Perpaduan antara latar kultural sebagai kota santri dan industri inilah yang mengilhami ide didirikannya perguruan tinggi di Kudus.

**c) Tradisi Keagamaan**

Tradisi dakwah semakin lama semakin berkembang mengingat kondisi masyarakat yang semakin lama semakin kompleks. Atas dasar ini, muncul ide untuk membekali para mubaligh dengan materi-materi pengkaderan, terutama dalam bidang manajemen. Ide didirikannya IAIN muncul dengan alasan agar para mubaligh di samping menguasai materi juga mampu berdakwah di masyarakat dengan berbagai metode dan pendekatan.

Di samping dukungan dari pemerintah daerah, pendirian IAIN di Semarang juga mendapat dukungan dari para ulama dan kalangan pesantren. Meskipun demikian, sebagian komponen masyarakat tradisional (santri NU) mengkhawatirkan jika berdirinya IAIN akan menggeser pemahaman keagamaan yang selama ini dipegang kuat oleh kaum tradisional.

**d) Aspirasi Masyarakat Jawa Tengah**

Bila dibandingkan dengan IAIN lain, berdirinya IAIN Walisongo tergolong terlambat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada upaya dari IAIN Sunan Kalijaga untuk menghalangi pendirian IAIN di Jawa

Tengah, karena secara kuantitatif akan mengurangi animo mahasiswa yang akan kuliah ke Yogyakarta, terutama dari kawasan pantai utara Jawa. Ke-dua, tidak adanya promotor yang menggagas berdirinya IAIN di Jawa Tengah. Ketiga, secara politis, kekuasaan pemerintah Jawa Tengah pada tahun 1960-an berada di tangan PNI dan PKI; kedua partai ini misinya bukan keislaman.

Sejak tahun 1963, pendirian IAIN di Jawa Tengah terus dilakukan dengan pendirian beberapa fakultas di kawasan pantai utara. Secara sosiologis, terbentuknya beberapa fakultas tersebut merupakan refleksi dari keinginan kuat masyarakat di Jawa Tengah. Keberadaan pesantren di sepanjang pantura merupakan aset yang menjanjikan dari aspek human resources. Dalam realitas sejarah IAIN Walisongo, mayoritas mahasiswa berasal dari daerah pantura. Seperti daerah Brebes, Pekalongan, Kaliwungu, Kendal, Demak, Kudus, Pati, Rembang, Lasem, dan lain sebagainya. Kultur ini pun masih bertahan sampai sekarang.

### **3. Pertumbuhan dan Perkembangan IAIN Walisongo**

Secara institusional, IAIN Walisongo setelah resmi menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pada tanggal 6 April 1970, telah membawahi lima fakultas. Seiring berjalannya waktu, beberapa fakultas yang telah dibawah menginduk langsung ke IAIN Walisongo termasuk beberapa fakultas cabang. Raker

Rektor IAIN se-Indonesia tahun 1973 di Ciumbuleuit, Bandung dan Intruksi Diperta No. D.VI/Ed/166/73, menghasilkan rasionalisasi komposisi fakultas di lingkungan IAIN Walisongo sebagai berikut; Fakultas Dakwah di Semarang, Fakultas Syari'ah di Semarang, Fakultas Tarbiyah di Semarang, Fakultas Ushuluddin di Semarang, Fakultas Tarbiyah di Salatiga (fakultas cabang), Fakultas Ushuluddin di Kudus (fakultas cabang), Fakultas Syari'ah di Pekalongan (fakultas cabang).

Secara yuridis, keberadaan IAIN Walisongo menjadi lebih mantap setelah terbit Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1985 tentang pokok-pokok Organisasi IAIN dan Keputusan Presiden No. 9 Tahun 1987 tentang susunan Organisasi IAIN. PP No. 33 Tahun 1985 dan Kepres No. 9 Tahun 1987 ini memperjelas sosok IAIN Walisongo dan membuat kedudukan IAIN Walisongo setara dengan perguruan tinggi negeri lainnya.

Perubahan yang cukup mendasar terjadi pada tahun 1983/1984, ketika Rektor melalui surat keputusannya No. 16 Tahun 1983 memberlakukan program pendidikan Strata 1 (S.1) bagi semua fakultas yang ada di lingkungan IAIN Walisongo. Melalui SK Rektor No. 16 Tahun 1983 ini, semua fakultas memiliki strata sama, yakni fakultas madya, dan sebutan fakultas cabang sudah tidak diberlakukan lagi.

Perubahan lain yang cukup penting juga terjadi pada tahun 1992, dimana beberapa fakultas mengalami relokasi

sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Agama RI No. 170 Tahun 1992. Dalam hal ini, Fakultas Ushuluddin Kudus dan Fakultas Syari'ah Pekalongan dipindah lokasinya ke Surakarta sehingga menjadi Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo di Surakarta.

Pada tahun 1997 lahir KEPRES No. 11 yang mengatur tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Lembaga yang terkena aturan ini adalah semua fakultas di IAIN yang bertempat di luar kota domisili IAIN Walisongo. Kemudian status fakultas-fakultas tersebut secara kelembagaan terpisah dari IAIN Walisongo. Status mereka dikembangkan dan ditingkatkan menjadi perguruan tinggi yang berdiri sendiri dengan bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

Bersamaan dengan itu, lahirlah SK Menteri Agama RI No. 209 Tahun 1997. SK Menteri Agama No. 209 ini mengatur tentang penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana (S-2) Studi Ilmu Agama Islam pada Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Pendidikan Program Pascasarjana dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS), dengan beban kredit 42 SKS (termasuk tesis).

#### **4. Penetapan Badan Layanan Umum (BLU)**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 68/ KMK.05/2009, tanggal 5 Maret 2009, tentang Penetapan IAIN Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai

Instansi Pemerintah yang menerapkan pola keuangan BLU, maka sistem manajemen IAIN Walisongo Semarang harus berpotensi pada peningkatan pelayanan masyarakat secara maksimal. Jenis pelayanan yang dilaksanakan meliputi seluruh aspek yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab IAIN Walisongo Semarang.

#### **5. Transformasi IAIN Walisongo menjadi UIN Walisongo**

Pengembangan IAIN menjadi UIN menandakan sebuah proses kesadaran yang lebih maju. Salama ini IAIN dianggap sebagai kampus yang memproduksi guru-guru agama baru, pengganti imam masjid, takmir, dan pengisi acara pengajian. Stigma ini terpersepsi ketika alumni IAIN tidak berkembang karena ijazah yang dihasilkan tidak memenuhi standar yang diminta oleh pasar.

Pembentukan UIN merupakan bagian dari usaha mengintegrasikan beragam keilmuan untuk mengeliminasi dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama. Dengan ini, IAIN harus menjadi UIN untuk dapat mendirikan fakultas-fakultas umum. Hal ini juga membuka peluang bagi para lulusan untuk memasuki lapangan kerja yang lebih luas.

Dengan adanya perubahan IAIN menjadi UIN, juga menjadi momentum perubahan jumlah fakultas yang ada di UIN. Dari lima fakultas yang sudah ada, UIN Walisongo berubah menjadi delapan fakultas, yaitu; Fakultas Syari'ah dan Hukum,



Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, dan Fakultas Sain dan Teknologi.

## **6. Dasar Hukum**

Dasar yang dipegangi dalam rangka menjalankan kegiatan di UIN Walisongo adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Pengelolaan Pendidikan
- d. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- e. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2015 tentang Status Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- f. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 383 tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program S.1 IAIN dan STAIN
- g. Surat Keputusan Rektor Nomor 51 tahun 2015 tentang Pedoman Akademik Program Sarjana (S.1) dan Diploma 3 (D.3) UIN Walisongo Semarang

- h. Surat Keputusan Rektor Nomor 35 tahun 2015 tentang Kurikulum UIN Walisongo
- i. Surat Keputusan Rektor Nomor 47 tahun 2015 tentang Fakultas dan Jurusan/Program studi pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

**7. Visi, Misi, Tugas, Fungsi, dan Jati Diri Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**

**a. Visi**

Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038.

**b. Misi**

- i. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni) berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan lulusan professional dan berakhlak al-karimah
- ii. Meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu, dan masyarakat
- iii. Menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat
- iv. Menggali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal

- v. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional, dan internasional
- vi. Mewujudkan tata pengelolaan kelembagaan professional berstandar internasional

**c. Tujuan**

Universitas Islam Negeri Walisongo mempunyai tujuan:

- 1. Melahirkan lulusan yang memiliki kapasitas akademik dan profesional dengan keluhuran budi yang mampu menerapkan dan mengembangkan kesatuan ilmu pengetahuan; dan
- 2. Mengembangkan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang kontributif bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam beragama, berbangsa, dan bernegara.

**d. Tugas**

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, keagamaan Islam, dan ilmu umum sesuai ketentuan perundang-undangan.

**e. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugasnya Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan , dan perencanaan program
2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, keagamaan Islam, dan ilmu umum
3. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademik, dan
4. Pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

## **8. Lambang**

Lambang Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang berbentuk lentera, melambangkan ilmu pengetahuan yang menyinari kehidupan. Fungsi utama lentera tampak pada peran UIN Walisongo dalam mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi: pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Lambang UIN Walisongo terdiri dari unsur-unsur dan pengertian sebagai berikut;

1. Gunungan adalah simbol yang mengandung beberapa arti. Pertama, wayang yang bentuknya meruncing ke atas, seperti bentuk puncak guung. Menegaskan misi UIN Walisongo dalam menggali, mengembangkan dan mnerapkan kearifan lokal. Kedua, simbol mustaka masjid. Ketiga, gambar gunungan terbalik yang menyerupai jantung manusia, yang mengandung makna tersirat bahwa setiap orang dengan

hatinya harus selalu ingat untuk beribadah kepada Allah SWT.

2. Lima sisi gunung melambangkan lima sisi pancasila.
3. Empat simpul geometri. Geometri ini terinspirasi dari ornamen dinding Masjid Mantingan, Jepara. Geometri ini mewakili *Islaic art* Nusantara klasik. Ia memiliki empat ruas yang saling bersinggungan dan berpadu, yang mewakili empat aspek utama pembangunan UIN Walisongo yaitu; *theo-anthroposentris*, humanisme ilmu-ilmu keislamaan, spritualisasi ilmu-ilmu modern, dan revitalisasi kearifan lokal.
4. Lima ruang kuning melambangkan lima rukun Islam
5. Bintang Sembilan merupakan simbol jumlah Sembilan komite wali pembaharu di pulau Jawa
6. Titik putih di tengah mengisyaratkan poros Ketuhanan yang maaha Esa
7. Kitab atau buku terbuka melambangkan dasar keilmuan. Buku terbuka membentuk tulisan UIN sebagai identitas UIN Walisongo
8. Tulisan Walisongo sebagai nama Universitas.

## 9. **Bendera Universitas, Fakultas, dan Pascasarjana**

Bendera UIN Walisongo Semarang berbentuk segi empat, bewarna hijau yang melambangkan perjuangan menegakkan kebenaran dan pembangunan nasional. Di tengah

bendera terpampang lambang UIN Walisongo dengan tulisan “UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG” dibawahnya.

#### **10. Mars dan Hymne**

Mars UIN Walisongo merupakan lagu bernada sedang (bari-ton), tinggi (sopran) dan rendah (bas) berkombinasi, bertempo agung, tenang dan optimis, berjiwa Pancasila, dan mencerminkan cita-cita Universitas.

Sedangkan Hymne Universitas merupakan lagu bernada sedang (bariton), bertempo lambat, berwibawa dan mengandung makna pujian, jiwa Pancasila dan berdasarkan ajaran Islam serta mencerminkan cita-cita Universitas.

#### **B. Paradigma *Unity of Science***

Umat muslim mulai sadar bahwa dikotomi ilmu pengetahuan yang terbagi dalam ilmu dunia (sains) dan ilmu akhirat (agama), tidak menghasilkan sebuah kemajuan. Bahkan pemisahan tersebut mengakibatkan kemunduran umat muslim pasca *The Golden Age of Islam* pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid Bani Abbasiyyah. Ismail Raji al-Faruqi berusaha menyatukan pemisahan sumber ilmu pengetahuan tersebut. Ia melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan ilmu pengetahuan kepada satu pusat, yaitu tauhid. Tujuannya agar terdapat kesinambungan antara ilmu pengetahuan dan iman. Tokoh-tokoh pemikir Islam lainnya juga mengusung

gagasan serupa, seperti Fazlur Rahman, Ziauddin Sardar, dan Naquib al-Attas.

Lebih dari itu, Ismail Raji al-Faruqi telah menawarkan beberapa hal untuk menghilangkan batas dikotomi antara kedua jenis ilmu pengetahuan tersebut.

1. Penguasaan terhadap khazanah ilmu pengetahuan modern.
2. Penguasaan terhadap warisan dan sejarah Islam.
3. Membangun sebuah koneksi agar ilmu pengetahuan agama dan sains bisa relevan.
4. Memadukan antara warisan dan khazanah keilmuan Islam dengan keilmuan modern dengan daya kreativitas yang tinggi.
5. Mengarahkan arah pemikiran Islam ke jalan yang mencapai pemenuhan pola rencana Allah.<sup>57</sup>

Gagasan islamisasi ilmu pengetahuan di atas menjadi pijakan bagi pemikir muslim Indonesia melanjutkan gagasan serupa. Gagasan tersebut menjadi landasan bagi beberapa perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia. Beberapa tokoh universitas ternama seperti Amin Abdullah (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Azyumardi Azra (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), serta Imam Suprayogo (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) mengusung konsep masing-masing.

---

<sup>57</sup> Ismail Raji al-Faruqi, *Islamisasi Pengetahuan*, terj. Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka.1995.

Amin Abdullah mengusung konsep "Jaring laba-laba" yang menjadi bangunan keilmuan di UIN Sunan Kalijaga. Gagasan Amin Abdullah ini bermula dari pengayaan studi keislaman menuju ke gagasan *reintegrasi-interkoneksi* yang berdasar pada al-Quran dan hadis.<sup>58</sup> Sementara itu di UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra mencoba mengusung "*reintegrasi ilmu-ilmu*" yang mengemukakan tiga macam respon cendekiawan muslim terhadap hubungan antara ilmu agama dan sains.

Pertama kelompok restorasionis, mereka menganggap bahwa ilmu yang dibutuhkan umat manusia hanyalah praktik ibadah (agama). Kedua, kelompok rekonstruksionis, yang memandang keberadaan ilmu agama sebagai sebuah media untuk memperbaiki hubungan antara peradaban modern dengan dunia Islam. Ketiga, kelompok reintegrasi. Kelompok ini merekonstruksi ilmu-ilmu yang bersumber dari teks al-Quran dan ayat-ayat kauniyah kembali kepada kesatuan ilmu pengetahuan yang transendental.<sup>59</sup>

Gagasan serupa juga dikemukakan oleh Imam Suprayogo di UIN Maulana Malik Ibrahim dengan menggunakan istilah (pohon ilmu). Imam mengibaratkan al-Quran, hadis, sirah nabawiyah, dan keilmuan Islam lainnya sebagai sebuah pohon. Sementara bahasa Arab, bahasa Inggris, Pancasila diibaratkan sebagai akar, serta

---

<sup>58</sup> M. Amin Abdullah, *New Horizons of Islamic Studies Through Socio-Cultural Hermeneutics*, al-Jami'ah, Vol. 41, no 1, (2003), h.1-24.

<sup>59</sup> Azyumardi Azra, *Reintegrasi Ilmu-ilmu dalam Islam*, dalam Zainal Abidin Bagir (ed) *Integrasi Ilmu dan Agama, Interpretasi dan Aksi*, Mizan, Bandung, 2005, h. 206-211



ekonomi, hukum, psikologi, dan MIPA sebagai cabang. Inti dari konsep ini ialah tidak ada perbedaan antara ilmu agama dan umum, sebab semua ilmu-ilmu tersebut berpijak pada sumber yang sama.<sup>60</sup>

Menyusul tiga UIN sebelumnya, UIN Walisongo juga mulai mengembangkan paradigma serupa seiring transformasinya dari IAIN menjadi UIN pada tahun 2014 lalu. Perubahan ini disertai dengan perubahan kerangka berpikir para pimpinan perguruan tinggi ini untuk mengembangkan ranah keilmuan yang selama ini telah berjalan. Perubahan struktur keilmuan tersebut menjadi sebuah prioritas dalam konversi perguruan tinggi, tidak hanya sekadar mengedepankan perubahan legal-formal-administratif semata.

Dengan demikian pemikiran dan pengembangan studi agama Islam yang berkembang di UIN Walisongo memiliki cakupan yang lebih luas dan kompleks. Tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan sains. Kondisi semacam ini pernah terjadi pada masa kejayaan Islam ketika berada dibawah kekuasaan Dinasti Abbasiyyah. Lahir banyak ilmuwan muslim pada masa ini, seperti Ibnu Haitam dengan ilmu optiknya, Ibnu Rusyd dengan filsafatnya yang luas, Ibnu Shina dengan ilmu kedokterannya, Ibnu Khaldun dengan wawasan kesejarahannya, dan masih banyak lagi.<sup>61</sup>

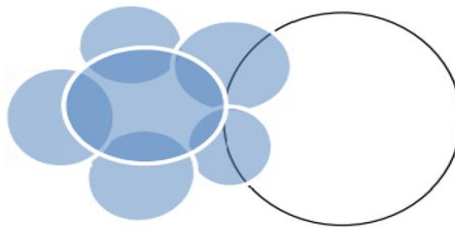
---

<sup>60</sup> <http://khudorisoleh.blogspot.com.integrasi-ilmu.html>, download tanggal 15 Desember 2017.

<sup>61</sup> Akh. Minhaji, *Transformasi IAIN Menjadi UIN, Sebuah Pengantar*, dalam, M. Amin Abdullah, dkk, *Menyatukan Kembali Ilmu-Ilmu Agama dan Umum; Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum*, Yogyakarta : SUKA-Press, 2003

Di UIN Walisongo sendiri, integrasi ilmu-ilmu pengetahuan didasarkan pada paradigma kesatuan ilmu-ilmu pengetahuan (*wahdat al-ulum* atau *unity of sciences*). Paradigma ini menegaskan bahwa pada dasarnya semua ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun sains, berasal dari satu sumber yang sama yaitu Allah. Tujuannya, mengantarkan para pengkaji ilmu pengetahuan agar semakin dekat kepada Allah yang Maha Tahu.<sup>62</sup>

Kehadiran paradigma baru ini diharapkan mampu melahirkan sivitas akademik UIN Walisongo yang memiliki wawasan keilmuan yang lebih luas dan mendalam. Memandang semua cabang ilmu pengetahuan sebagai kesatuan holistic dan mampu mendialogkan ilmu-ilmu tersebut untuk menghasilkan produk keilmuan baru yang bijak dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. poin utama dari *unity of sciences* di UIN Walisongo ialah menyatukan semua cabang ilmu pengetahuan dan memberikannya landasan berupa wahyu sebagai pengikatnya. Sebagaimana ilustrasi pada gambar berikut:

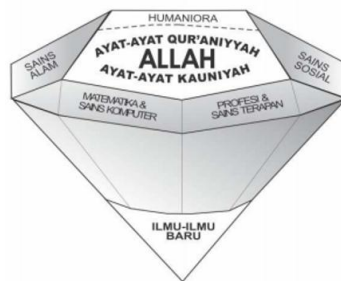



---

<sup>62</sup> Tsuwaibah, *Epistemologi Unity of Science Ibn Sina Kajian Integrasi Keilmuan Ibn Sina dalam Kitab Asy-Syifa Juz I dan Relevansinya dengan Unity of Science IAIN Walisongo*, Semarang, Walisongo Press, 2014, h. 75

Lingkaran yang berada di tengah adalah wahyu, sementara lingkaran paling luar adalah alam. Sedangkan 5 bundaran lainnya adalah ilmu agama dan humaniora, ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu kealaman, ilmu matematika dan sains komputer, serta ilmu profesi dan terapan. Gambar di atas meniscayakan kesatuan ilmu dalam arti semua ilmu pastilah bersumber dari wahyu baik langsung maupun tidak langsung dan pasti pula berada dalam wilayah alam yang kesemuanya bersumber dari Allah.<sup>63</sup>

Konsep *unity of sciences* di UIN Walisongo digambarkan sebagai sebuah berlian. Berlian tersebut memiliki banyak sisi yang saling terhubung satu sama lain, masing-masing sisi memiliki pancaran yang sangat indah. Sumbu yang berada di tengah menggambarkan Allah yang menurunkan wahyu sebagai sumber nilai, doktrin, dan ilmu pengetahuan. Jadi semua ilmu-ilmu tersebut hadir untuk saling melengkapi, bukannya saling bertentangan satu sama lain. Lihat gambar ilustrasi berikut ini:




---

<sup>63</sup> Tsuwaibah, *Epistemologi Unity of Science Ibn Sina Kajian Integrasi Keilmuan Ibn Sina dalam Kitab Asy-Syifa Juz I dan Relevansinya dengan Unity of Science IAIN Walisongo*, Walisongo Press, Semarang, 2014, h. 78

Rektor UIN Walisongo, Muhibbin berkomitmen untuk menghilangkan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum seiring dengan perubahan status dari IAIN ke UIN. “Kami ingin agar kedua ilmu itu, yakni ilmu agama dan umum terintegrasi dan terinterkoneksi satu sama lain. Tak ada lagi dikotomi. Sebab, kajian-kajian keilmuan yang dilakukan bisa lebih intensif”.

Dengan menjadi universitas, kata dia, mengharuskan membuka program studi eksakta, seperti matematika, Fisika, Biologi, dan sains yang saat ini sumber daya manusia (SDM) atau dosennya sudah disiapkan. Meski demikian, ia menegaskan perubahan bentuk IAIN menjadi UIN tidak akan menghilangkan kekhasan kajian keislaman yang selama ini dihasilkan melainkan justru semakin diperkuat dengan kajian ilmu umum”.<sup>64</sup>

### **C. Corak Kajian Tafsir di UIN Walisongo**

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagai salah satu kampus Islam negeri di Indonesia yang selain sudah mengikuti kemajuan zaman di dunia pendidikan di era modern seperti sekarang ini, seperti halnya sudah banyaknya jurusan-jurusan yang umum di fakultas-fakultas, kajian keilmuan sains modern dan lain sebagainya, namun pada praktiknya, penyelenggaraan lingkungan dan proses pendidikan di UIN Walisongo tetap menjaga prinsip keislaman yang

---

<sup>64</sup> <http://www.antaranews.com/berita/360483/iainalwalisongo-target-tahun-ini-jadi-universitas>, Selasa, 11 Desember 2017 20: 25 WIB

sebagaimana diketahui bersama, bersandar pada al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama umat Islam di dunia.

Meski pemikiran dan pengembangan studi agama Islam yang berkembang di UIN Walisongo Semarang memiliki cakupan yang lebih luas dan kompleks, namun menurut Amin Abdullah di dalam bukunya mengungkapkan bahwa tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan sains. Sehingga dengan demikian, kajian-kajian agama yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah di kampus-kampus Islam tetap dapat berjalan dan berkembang untuk kemajuan ilmu pengetahuan di dunia khususnya di masyarakat Islam itu sendiri.

Selain Amin Abdullah, Ahli Tafsir dan Hukum serta sekarang menjabat Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Walisongo Semarang, Muhyar Fanani juga mengungkapkan hal yang tidak jauh berbeda. Ia menjelaskan bahwa alam ilmu yang kita sebut sebagai ilmu umum atau lebih tepatnya sains modern dalam hal ini sebenarnya terdapat pula nilai-nilai ketuhanan di dalamnya.

“Sebaliknya di dalam ilmu keislaman, yaitu ilmu yang berbasis pada wahyu di situ juga terdapat nilai-nilai kemanusiaan. Maka tafsir al-Quran yang mempelajari tentang wahyu itu juga harus bisa menyentuh persoalan manusia di suatu waktu dan tempat,” ungkapnya.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Wawancara, Dr. Muhyar Fanani, M.A., Pakar Hukum Islam dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo, tanggal 22 Januari 2018

Muhyar juga memberi contoh seperti halnya persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat yang nyata adanya, seperti *gate* antara kaya dan miskin. Dalam hal ini, bagaimana tafsir dan paradigma *unity of science* sebagai visi UIN Walisongo yang berkemajuan itu mampu menjawab persoalan tersebut. Dan hal itulah yang harus dipelajari kemudian betul-betul bisa diterapkan.

Di dalam memahami ilmu-ilmu yang bersumber dari wahyu sendiri, yakni ilmu al-Qur'an, UIN Walisongo Semarang masih menjaganya dengan tetap memiliki departemen tersendiri yakni di Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang ada di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, meskipun di fakultas-fakultas lain pun juga mahasiswa yang belajar di UIN Walisongo tetap diberikan pelajaran tentang Ulumul Qur'an.

Pembelajaran dalam memahami al-Qur'an di UIN Walisongo, menurut kepala jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (IAT), Ahmad Sya'roni, mengungkapkan bahwa corak penafsiran ilmu al-Qur'an yang digunakan adalah berbagai macam. Namun, corak penafsiran yang paling banyak diterapkan di dalam praktik pembelajaran ilmu al-Qur'an adalah *Tafsir bi Ijtima'i* dan ada pula sebagian menggunakan corak sufistik serta teologi.

“Paling banyak *bi Ijtima'i*, sebagian sufistik dan teologi,” ungkapnya.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Wawancara Muhammad Sya'roni, M.Ag, Kepala Jurusan Ilmu al-Quran dan Tafsir, UIN Walisongo, tanggal 18 Januari 2018

Sedangkan metode yang diterapkan dalam mempelajari al-Qur'an sendiri, menurut Sya'roni yakni melalui mata kuliah penafsiran, seperti halnya mata kuliah Ulumul Qur'an, Madzahibut tafsir, Qowaid tafsir, dan lain sebagainya.

Menurutnya, di zaman modern dan berkemajuan seperti sekarang, sudah banyak prespektif keilmuan dalam memandang tafsir al-Qur'an terkait sains dan ilmu sosial. Di mata kuliah sendiri sudah terdapat mata kuliah al-Qur'an dan Ilmu Sosial Budaya, Hermeneutik, serta mata kuliah Qur'an dan IT.

Selain itu juga, menurut Sya'roni, dalam proses mempelajari ilmu al-Qur'an memang masih memiliki kendala-kendala bagi civitas akademika UIN Walisongo. Kendala-kendala tersebut seperti halnya masih sulitnya dalam memahami ilmu alat, bahasa, metode, dan kaidah-kaidah al-Qur'an.

“Jika sudah dikuasi akan cepat selesai memahami al-Qur'an. Al-Qur'an itu qiroah dan tilawah untuk memahaminya. Dalam memahami al-Qur'an juga dengan tekstual dan kontekstual,” ungkapnya saat diwawancarai peneliti.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Wawancara, Dr. Muhyar Fanani, M.A., Pakar Hukum Islam dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo, tanggal 22 Januari 2018

#### **D. Representasi Wacana Korupsi di Kalangan Sivitas Akademika UIN Walisongo**

Problem dan ironi bangsa Indonesia yang terkenal dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam ini yakni korupsi dan sudah seperti membudaya di masyarakat yang sudah hampir di segala lini, menurut mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, mengatakan bahwa problem korupsi ini di zaman sekarang dapat lebih mudah menghancurkan sebuah peradaban suatu negara. Lebih parahnya jika sudah menjangkit di generasi muda sebuah bangsa tersebut.

“Untuk menghancurkan peradaban pada sebuah negara, kita tidak perlu misalnya memakai roket, memakai bom, tapi cukup dengan membiarkan generasi mudanya berbuat curang dan berperilaku korup.” tutur Abraham Samad.<sup>68</sup>

Samad juga menambahkan bahwa perilaku korup yang menjangkit masyarakat tersebut disebabkan oleh moralitas, bahasa agamanya adalah akhlak. Jika integritas rapuh, kemudian ada kesempatan melakukan korupsi, pasti akan terjadi praktik korupsi. Namun jika integritas dan perilaku bagus, maka apabila ada kesempatan untuk korupsi, tidaklah akan terjadi praktik korupsi.

Juniadi Suwartojo menyatakan bahwa korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau

---

<sup>68</sup> <http://kpi.fuad.iainpekalongan.ac.id/index.php/item/310-abraham-samad-pentingnya-pendidikan-anti-korupsi-sejak-dini>



menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara atau masyarakat.<sup>69</sup>

Transparency International sebagaimana dikutip Saiful Amin Ghufro mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya pihak-pihak yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Joseph S. Nye mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri).

Hampir senada dengan Joseph S. Nye, Brooks sebagaimana dikutip Ali Alatas mengartikan korupsi sebagai perbuatan yang dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban atau tanpa hak menggunakan kekuasaan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang bersifat pribadi.

---

<sup>69</sup> Ahmad Asroni, *Membumikan Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi* dalam *Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi*, Globethics.net, Focus, 2015, h. 109

Akar penyebab korupsi sangatlah banyak dan beragam. Pada masa lalu, rendahnya kesejahteraan dituding sebagai akar penyebab korupsi. Namun, saat ini hipotesis tersebut diragukan oleh banyak kalangan. Banyak faktor atau variabel lain yang dianggap sebagai penyebab munculnya praktik korupsi seperti nilai, budaya, perilaku, lingkungan sosial, pranata hukum dan sebagainya.

Lebih parahnya lagi, problem korupsi ini juga masuk ke dalam lembaga-lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi, baik lembaga umum maupun yang berlatarbelakang atau *background* agama sekalipun. Sebagaimana yang telah disebutkan di bab sebelumnya tentang korupsi yang merajahi hingga dunia pendidikan di Indonesia. Sehingga memicu pertanyaan-pertanyaan hingga yang paling mendasar di masyarakat kita yakni masalah moralitas dan peranan ajaran agama itu sendiri sehingga membuat korupsi bisa dapat membudaya.

Berpijak dari faktor-faktor penyebab korupsi bahwa korupsi bukan semata-mata disebabkan oleh masalah ekonomi, namun terutama masalah etika atau moralitas. Korupsi merupakan permasalahan mental di mana nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral diabaikan dan lebih dipenuhi oleh masalah-masalah dunia yang cenderung materialistik.<sup>70</sup>

Di UIN Walisongo, sebagai lembaga Islam terkemuka dan sebagai lembaga yang di dalamnya terdapat lingkungan terjadinya

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, h.110

transfer ilmu-ilmu agama dan terapannya di dunia nyata memandang masalah korupsi ini cukup dialektis oleh sivitas akademiknya, khususnya saat korupsi sudah masuk ke ranah-ranah lembaga pendidikan. Karena UIN Walisongo juga adalah lembaga pendidikan Islam tingkat perguruan tinggi yang tidak dapat dipungkiri dapat pula terjangkau masalah korupsi ini.

Muhyar Fanani, Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang mengutarakan bahwa pendidikan dan berjalannya lembaga di dalamnya juga merupakan persoalan yang sangat dekat dengan tugas-tugas keimanan. Namun yang terjadi malah juga marak terjadi praktik korupsi di dunia pendidikan, tidak terkecuali dunia pendidikan Islam.

“Tapi mengapa malah marak terjadi korupsi, ya karena umat Islam hanya melihat Islam sebatas ada di masjid, pada saat salat, dan forum pengajian saja.” ungkap Muhyar saat diwawancarai di kantornya.<sup>71</sup>

Mukhsin Jamil, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (FUHum) UIN Walisongo menjelaskan bahwa adanya korupsi yang membudaya hingga kini adalah terutama di dunia politik yang membutuhkan biaya yang tinggi. Selain itu juga karena gaya hidup masyarakat kita dan lemahnya moral manusia. Sehingga dapat memicu terjadinya praktik korupsi khususnya di Indonesia.

Terkait terjadinya korupsi di lembaga-lembaga pendidikan, menurut Mukhsin, semestinya lembaga pendidikan khususnya kampus adalah garda terdepan dalam pemberantasan korupsi ini.

---

<sup>71</sup> Wawancara Dr. Muhyar Fanani, M.A., Pakar Hukum Islam dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo, tanggal 22 Januari 2018

“Kampus itu semestinya menjadi garda terdepan. Birokrasi dan tata kelola yang *Clean goverment*, sehingga tercipta *Good University Government*. Selain itu juga untuk terus melakukan penguatan dan pengembangan sistem,” ungkapny saat diwawancarai.<sup>72</sup>

Sedangkan menurut Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK), Priyono, terkait korupsi yang terjadi di dunia pendidikan , ia tidak memungkiri terjadi karena menurutnya data tersebut juga berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.

“Data yang menunjukkan dunia pendidikan menempati angka korupsi yang tinggi, tentunya sudah didasari dengan survey. Meskipun kita tidak bisa membuktikan siapa yang mengeluarkan, tentu hasil data itu tidak sembarangan. Intinya bahwa, angka korupsi di dunia pendidikan itu tinggi. Mungkin yang menyatakan itu, pertama berdasarkan hasil survey tenanan. Kedua, dengan melihat fakta. Misalnya, sekarang banyak pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan. Ada pembangunan gedung, contoh di Unsoed yang rektornya kena (kasus). Kemudian di kantor wilayah itu juga ada satu kasus. Fenomena yang ada itu tentunya menjadi dasar yang mengatakan bahwa dunia pendidikan itu ini dan itu,” ungkap Priyono di ruang kerjanya saat diwawancarai.<sup>73</sup>

Dalam menanggapi wacana korupsi dan pemberantasan budaya korupsi di UIN Walisongo sendiri, menurut Mukhsin Jamil, sudah melakukan evaluasi secara baik dalam rangka menanggulangi

---

<sup>72</sup> Wawancara Dr. M. Mukhsin Jamil, M.Ag., Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, tanggal 19 Januari 2018

<sup>73</sup> Wawancara Priyono, M.Pd. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan UIN Walisongo, tanggal 08 Juni 2018

terjadinya praktik korupsi di lembaga perguruan tinggi Islam di Semarang ini.

“Sistem-sistem sudah dilakukan secara *online* dan transaksi non-tunai dengan mengedepankan keterbukaan. Pak Rektor juga selalu mengingatkan, bahwa hingga hal seperti penerimaan parsel, semua pejabat di UIN Walisongo sama sekali tidak boleh menerima parsel,” jelasnya di kediamannya.

Senada dengan Mukhsin Jamil, menurut Dekan FISIP, Muhkyar Fanani mengutarakan bahwa UIN Walisongo adalah termasuk Universitas Islam di Indonesia yang bisa dicontoh dalam rangka kelembagaan dan lingkungan yang jauh dari lingkaran korupsi.

“Menurut saya, UIN Walisongo ini termasuk yang bisa dicontoh karena saya melihat, kita punya pemimpin yang sah untuk menciptakan wilayah bebas korupsi di UIN Walisongo. Misalkan mahasiswa yang telat membayar SPP dia harus mangkir dan tidak bisa melakukan permohonan pemaafan. Padahal di kampus-kampus lain masih ada nego terkait ini. Dampak dari keinginan untuk memastikan semua harus ikut peraturan. Kalau banyak pemaafan kesulitan utama ialah kesulitan administrasi keuangan. Kalau administrasi keuangan tidak bisa dijelaskan nanti tuduhannya adalah korupsi,” jelasnya.<sup>74</sup>

Di UIN Walisongo Semarang, menurut Biro AUPK, Priyono, ia menilai bahwa tidak ada praktik sampai sekarang. Sebab menurutnya, kebijakan pimpinan (Rektor) sangat disiplin terhadap kegiatan-kegiatan yang ada.

---

<sup>74</sup> Wawancara Dr. Muhyar Fanani, M.A., Pakar Hukum Islam dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo, tanggal 22 Januari 2018

“Sudah banyak contoh yang mungkin mahasiswa belum tahu, penegakkan disiplin, transparansi, dan korupsi sudah kita tegakkan. Ada beberapa pejabat yang sudah kami tindak, misalnya turun pangkat karena memang menyimpang,” terangnya.<sup>75</sup>

Priyono juga menambahkan bahwa sejak Rektor (Prof. Muhibbin) menjabat, rektor memberikan kebijakan bahwa semua pembangunan yang tadinya ditemukan adanya fee, kini sudah tidak lagi diberlakukan.

“Apa buktinya? Kita setiap tahun mengedarkan surat kepada rekanan terutama menjelang lebaran ini. Besok kan pada nerima parsel, saya kumpulkan dari rekanan. Padahal sudah ada sumpah, sudah ada pasalnya, kita tidak boleh menerima pemberian jenis apapun berkaitan dengan jabatan,” imbuhnya.

Muhammad Sya’roni, Kajar Ilmu al-Qur’an dan Tafsir (IAT) menjelaskan terkait problematika korupsi yang membudaya di Indonesia dan masyarakat muslim ini memang harus terus melakukan pencegahan dan pemberantasan, tidak terkecuali di lingkungan UIN Walisongo Semarang.

“Korupsi kan sudah jelas aturannya. *Wassariqu wassariqotu*, mengambil yang bukan haknya. Pak Rektor juga terus menyampaikan UIN Walisongo berada di zona integritas wilayah anti korupsi,” ungkap Sya’roni di kantor Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (Fuhum) UIN Walisongo Semarang.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Wawancara Priyono, M.Pd. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan UIN Walisongo, tanggal 08 Juni 2018

<sup>76</sup> Wawancara Muhammad Sya’roni, M.Ag, Kepala Jurusan Ilmu al-Quran dan Tafsir, UIN Walisongo, tanggal 18 Januari 2018

Hal tersebut, menurut Sya'roni adalah sebagai salah satu penafsiran untuk agenda pemberantasan budaya korupsi yang ada di sekitar kita. Terkait bagaimana sivitas akademika UIN Walisongo Semarang dalam pendalaman memahami ayat-ayat korupsi sendiri, menurutnya, sivitas akademika UIN Walisongo sangat setuju dengan apa yang juga telah disebutkan di dalam al-Qur'an maupun dalil keislaman lain.

“Karena ayat dan hadisnya sudah jelas. Bahkan nabi mengancam, *lau tsaraqat fathimatu laqotho'tu yadaha*. Meskipun anaknya sendiri pun tetap terkena kena hukum,” imbuhnya kepada peneliti.

Mukhyar Fanani, yang mana sebagai pakar hukum Islam di UIN Walisongo memaparkan terkait cara agar tercipta lingkungan yang bebas dari budaya korupsi, serta sivitas yang ada di dalamnya benar-benar memahami suatu masalah dengan tetap berlandaskan kitab suci al-Qur'an.

“Caranya pertama yakni dengan menggunakan ilmu pengetahuan paling mutakhir dalam memahami kitab suci. Dengan demikian, kitab suci akan lebih mudah dihubungkan dengan alam riil. Contohnya bagaimana cara agar warga UIN Walisongo dalam memahami ayat anti korupsi, harus pula dengan menggunakan pengetahuan berupa teori paling mutakhir untuk memahami ayat itu.” jelasnya.<sup>77</sup>

Ia menambahkan bahwa jika mengacu pada kitab tafsir klasik atau fiqh zaman dulu, yakni berupa contoh-contoh *syariqoh* seperti halnya mencuri dalam konteks kepemilikan pribadi. Dalam

---

<sup>77</sup> Wawancara Dr. Mukhyar Fanani, M.A., Pakar Hukum Islam dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo, tanggal 22 Januari 2018

penindakannya terdapat tiga macam. Pertama, *jarimah hudud*, yaitu tidak pidana yang hukumannya sudah ada di dalam alquran, misalnya zina dan mencuri. Ketika berbicara mengenai syariqoh, sangat sedikit fuqoha yang berbicara mengenai korupsi.

UIN Walisongo dengan Visi dan paradigma *Unity of science*, serta yang sudah terus mengembangkan diri dalam perbaikan sistem dan kualitas di semua lini, menurut Mukhsin Jamil, harus juga tetap menjaga landasan moral keislaman di lingkungan UIN Walisongo.

“Dengan paradigma *unity of science* yang ada, UIN Walisongo terus melakukan evaluasi dan pengembangan sebagai wadah ilmu pengetahuan yang inspiratif, serta memiliki landasan moral dalam setiap sikap atau tindakan. Pada prinsip besarnya warga UIN Walisongo paham bahwa Korupsi bertentangan dengan al-Qur’an,” ungkap Mukhsin Jamil.<sup>78</sup>

Muhyar Fanani menilai bahwa korelasi antara ilmu agama, dalil, dan ilmu-ilmu mutakhir yang harus dipahami oleh setiap orang yang belajar *unity of science*. Sebab menurutnya, memahami kitab suci tidak cukup hanya secara harfiah saja. Namun harus juga melibatkan alam pikiran pada wilayah dan konteks tertentu. Seperti itulah cara berpikir yang secara tidak langsung diwariskan oleh para ulama zaman dahulu.

Terkait korelasi sebagaimana Sya’roni, Mukhsin Jamil, dan Muhyar Fanani, Kepala Biro AUPK Priyono setuju bahwa sumber tindakan yang ada di UIN Walisongo pun harus bersumber dari al-

---

<sup>78</sup> Wawancara Dr. M. Mukhsin Jamil, M.Ag., Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, tanggal 19 Januari 2018



Qur'an, khususnya dalam pembahasan terkaait korupsi di UIN Walisongo.

“Saya kira memang sumbernya di situ, tapi dalam kegiatan sehari-harinya jelas sudah memahami. Tidak hanya pegawai di UIN Walisongo, semuanya juga sudah tahu kalau korupsi itu dosa. Ingat, korupsi itu tidak hanya uang, waktu juga bisa dikorupsi. Di UIN Walisongo, korupsi uang itu tidak signifikan karena dananya tidak seberapa. Tapi meskipun tidak signifikan kalau ada yang melanggar tetap kita sanksi. Bahkan ada yang kita keluarkan.” ungkapnya.<sup>79</sup>

Mengenai Terkait pendalaman penerapan al-Qur'an dengan segala hal tentang sosial dan lainnya, khususnya korupsi, kajur IAT, Sya'roni, mengungkapkan bahwa di dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) terus dilakukan evaluasi kinerja.

“Yang masih perlu adalah kajian di luar itu. Misalkan kajian dan seminar tentang al-Qur'an,” ungkapnya<sup>80</sup>

Dekan FUHum, Mukhsin Jamil mengutarakan bahwa UIN Walisongo sangat penting untuk memperhatikan aspek moral. Menurutnya kajian-kajian terkait anti korupsi masih belum masif. Selain itu, Mukhsin Jamil menambahkan bahwa dalam mencapai suksesnya bentuk atau sistem yang diharapkan, menurutnya eksekusi dilakukan dari tingkat paling bawah. Sehingga sistem yang sudah direncanakan semakin kuat.

“Kalau sudah demikian, kepribadian dalam hal ini, moral di lingkungan UIN Walisongo dapat membudaya, *punishment*

---

<sup>79</sup> Wawancara Priyono, M.Pd. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan UIN Walisongo, tanggal 08 Juni 2018

<sup>80</sup> Wawancara Muhammad Sya'roni, M.Ag, Kepala Jurusan Ilmu al-Quran dan Tafsir, UIN Walisongo, tanggal 18 Januari 2018

telah benar-benar ditegakkan, serta dibarengi dengan inovasi inspiratif seperti event-event penting tentang anti korupsi.” Imbuhnya.<sup>81</sup>

Menanggapi representasi korupsi dan anti korupsi di UIN Walisongo, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2012, Hafidzil Mustaqim menilai bahwa di kampus UIN Walisongo, yang perlu diperhatikan adalah terkait transparansi. Baginya, perlunya sistem yang berbasis online terkait transparansi baik berupa informasi, kegiatan maupun keuangan agar tidak ada lagi kecurigaan-kecurigaan terhadap lembaga.

“Berharap UIN Walisongo lebih terbuka dalam segala hal, untuk jelasnya adalah mungkin bisa diterapkan sistem online yang transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Misalkan terkait beasiswa, pembagian dana kegiatan dan lain sebagainya bisa dicamtumkan beserta prosesnya sampai selesai di website agar semua bisa mengetahui keterbukaan yang ada di UIN Walisongo,”ujarnya.<sup>82</sup>

Mahasiswa angkatan 2016 FUHum, Bela Maesaroh mengutarakan bahwa masih banyak PR untuk lembaga UIN Walisongo untuk menjadi lembaga yang benar-benar bersih dan berjalan dengan sistem yang memuaskan. Bela berpendapat bahwa masih banyak pegawai yang kurang kompatibel di bidangnya atau kurang profesional, pegawai-pegawai yang bekerja tersebut sering pergi di jam kerja atau telat ke kantor, dan banyak lagi. Karena

---

<sup>81</sup> Wawancara Dr. M. Mukhsin Jamil, M.Ag., Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, tanggal 19 Januari 2018

<sup>82</sup> Wawancara Hafidzil Mustaqim, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo di depan Perpustakaan Syariah kampus 3, tanggal 03 April 2018

baginya hal tersebut bagian dari korupsi di sebuah lembaga. Yakni korupsi waktu, tanggung jawab, dan lainnya.

“Mungkin korupsi di bidang kinerja, karena banyak pegawai yang kurang profesional saat sedang mengurus sesuatu. Saya curiga bahwa saat penerimaan dan seleksi pegawai masih kurang bagus sistemnya. Itu harus segera dievaluasi dan diperbaiki lagi,”ungkapnya saat diwawancarai.<sup>83</sup>

Sedang Gigih Firmansyah, Alumni S1 UIN Walisongo yang sekarang sedang menempuh S2 UIN Walisongo mengungkapkan bahwa perlunya kajian-kajian mendalam terkait pribumisasi atau aktualiasasi al-Qur'an maupun Hadis nabi untuk bisa dibedah dan diterapkan di lingkungan kampus.

“Kajian-kajian dan penelitian tentang kontekstualisasi ilmu-ilmu al-Qur'an maupun hadis kemudian korelasiannya dengan sosial budaya, agar segera diaktualisasi kepada sisvitas akademika. Baik dalam bentuk program-program yang inspiratif dan kekinian, korupsi juga masuk dalam hal ini, karena problem ini sudah membudaya dan harus di berantas,”jelanya saat diwawancarai usai melakukan perkuliahan di kampus 1 UIN Walisongo.<sup>84</sup>

Untuk pendalaman representasi korupsi dan anti korupsi di UIN Walisongo ini peneliti juga berencana mewawancarai wakil rektor II, Imam Taufiq, yang mana juga sebagai guru besar ilmu al-Qur'an, namun peneliti kesulitan untuk menemui narasumber.

---

<sup>83</sup> Wawancara Bela Maisyaroh, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo di depan Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa FUHum tanggal 05 Mei 2018

<sup>84</sup> Wawancara Gigih Firmansyah, mahasiswa Pascasarjana UIN Walisongo tanggal 09 Maret 2018

### **E. Upaya Preventif Pencegahan Praktik Korupsi di UIN Walisongo Semarang**

Pentingnya peran perguruan tinggi sebagai penjaga dan pengembang integritas bangsa, bukan saja sebagai bagian dari gerakan antikorupsi saja. Pada saat yang sama institusi pendidikan ini bisa menjadi tonggak bagi pembangunan akuntabilitas dan transparansi. Perguruan tinggi bisa menjadi motor penggerak integritas karena mampu berperan penting memberhentikan “*supply*” koruptor di negeri ini.

Memerangi korupsi melalui pendayagunaan jalur pendidikan formal sebagai suatu bagian menangani korupsi merupakan salah satu strategi yang diharapkan cukup signifikan, mengingat masyarakat terdidik inilah yang perannya dimasyarakat cukup dominan. Mereka tidak cukup hanya dibekali pengetahuan dan kemampuan bagaimana melakukan sesuatu pekerjaan atau jabatan dalam masyarakat, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana menggunakan ilmu dan cara-cara tersebut dengan benar, tanpa harus melakukan korupsi, bahkan termasuk kiat-kiat untuk melawan korupsi, dorongan atau motivasi untuk aktif berperan dalam upaya memerangi atau memberantas korupsi.<sup>85</sup>

Suseno (Djabbar, 2009) berpendapat bahwa pendidikan yang mendukung orientasi nilai adalah pendidikan yang membuat orang

---

<sup>85</sup> Wayan Gede Suacana. *Pendidikan Anti-Korupsi Di Perguruan Tinggi*, Tim LP3, UMY, 2004, h. 212.

merasa malu apabila tergoda untuk melakukan korupsi, dan marah apabila ia menyaksikannya. Menurut Suseno, ada tiga sikap moral fundamental yang akan membuat orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi. Ketiga sikap moral fundamental tersebut adalah kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab.<sup>86</sup>

Lipset dan Lenz mengatakan bahwa dalam masyarakat yang terlalu mengagungkan kesuksesan materi, tetapi tidak memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anggota masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, cenderung memiliki tingkat korupsi yang tinggi.<sup>87</sup> Sementara itu, nilai-nilai masyarakat yang mendorong *self expression* cenderung mendorong terciptanya integritas di kalangan para birokrat, dalam kaitan dengan korupsi, integritas merupakan faktor kunci dalam menekan korupsi.<sup>88</sup>

Tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi dan Nepotisme (KKN) mengakibatkan reformasi birokrasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh instansi. Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara

---

<sup>86</sup> Faisal Djabbar, *Tentang Kurikulum Antikorupsi* dalam <http://smk3ae.wordpress.com/2009/02/02/tentang-kurikulum-antikorupsi-2/> diakses pada 23 Januari 2018

<sup>87</sup> Lipset S. M. dan Lenz G.S, *Corruption, Culture and Markets*, International Review of Sociolgy Vol. 15, No. 1, Maret 2015, h. 131.

<sup>88</sup> Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009, h. 32

cepat, tepat dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Dalam mengakselerasi percepatan pencapaian sasaran hasil tersebut maka instansi pemerintah perlu membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi unit percontohan penerapan pada unit-unit lainnya. Guna melaksanakan hal tersebut, terbitlah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Di UIN Walisongo Semarang, melalui Rektor Prof. Dr. Muhibbin M.Ag memastikan tekadnya untuk menjadi kampus yang sudah berada di Zona Integritas (ZI) menuju kampus Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sekaligus Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dalam hal ini, Rektor UIN Walisongo mengutarakan, bahwa langkah ini merupakan langkah untuk membangun birokrasi yang tidak koruptif.

“Alhamdulillah, setidaknya sejak 2012 UIN Walisongo telah mendeklarasikan diri sebagai kampus yang bebas dari korupsi, bukan kampus yang bebas korupsi,” terangnya.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> <https://www.hariansemarang.com/2016/06/07/sejak-2012-uin-walisongo-bebas-korupsi/>

Salah satu strategi peningkatan kinerja UIN Walisongo menurut rektor adalah dengan melakukan penguatan di Satuan Pengawas Internal (SPI). Rektor UIN Walisongo berharap unit SPI tersebut dapat berperan penting untuk mendampingi dan membimbing unit-unit lainnya, terutama di dalam pelaksanaan kinerja, dari penyiapan proposal hingga pertanggungjawaban. Namun hal tersebut tidak serta merta terjadi jika seluruh komponen tidak mendukung.

Di UIN Walisongo Semarang, dalam rangka memberantas budaya korupsi yang sudah menjadi ironi dan sebagainya yang sudah dijelaskan rektor, memiliki Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang mana memiliki tanggung jawab terhadap proses laporan pertanggungjawaban keuangan terkait bidang non-akademik. Tugasnya yakni mengawasi dan mengendalikan proses penggunaan anggaran di UIN Walisongo.<sup>90</sup>

Menurut Sekretaris SPI, Andi Fadlan, SPI sudah efektif terutama di tahun 2016 dan 2017 dengan memberlakukan sistem “*Preventif Audit*” dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan. Menurutnya, sistem tersebut adalah bentuk upaya dari SPI UIN Walisongo agar setiap satu rupiah anggaran digunakan sesuai dengan perencanaan yang sudah di susun, tepat sasaran, tepat waktu, dan menghasilkan *output* yang jelas.

---

<sup>90</sup> Wawancara Andi Fadlan, Sekretaris Satuan Pengawasan Internal UIN Walisongo tanggal 08 Juni 2018

“SPI UIN Walisongo ini punya landasan hukum tentunya. Yakni PMA tahun 2017 nomor 25. Di situ diatur, bahwa setiap PTKIN mulai tahun 2017 harus memiliki Satuan Pengawasan Internal (SPI). Yakni semua STAIN, IAIN, dan UIN harus sudah memiliki SPI.”

SPI, menurut Andi, berjalan atas nama Rektor dan mendapat mandat di bawah rektor langsung untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Maka yang SPI lakukan adalah kebijakan rektor untuk mengawal proses penggunaan anggaran.

Salah satu bukti sebagaimana disebutkan sebelumnya yakni UIN Walisongo adalah Zona Integritasi dan wilayah bebas korupsi harapannya adalah terbukti di tahun 2016-2017, UIN Walisongo setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan *zero founded* (tidak ada temuan korupsi atau penyelewengan anggaran).

“SPI UIN Walisongo dengan sistem preventif audit menjadi percontohan SPI PTKIN se-Indonesia. Jika ada SPI dari kampus-kampus lain datang ke Jakarta, disarankan untuk belajar dengan UIN Walisongo Semarang,” ungkap Andi saat diwawancarai di kantor SPI.

Menanggapi fenomena korupsi di dunia pendidikan di Indonesia, di UIN Walisongo sendiri, menurut Priyono AUPK, bahwa birokrasi UIN Walisongo sudah melakukan penegakkan hukum terkait dengan transparansi.

“Kita pimpinan tidak menghendaki adanya suap dan sebagainya. Begitu ada konangan langsung kita panggil. Kita bentuk Tim, kita investigasi. Ada empat orang pejabat yang



sudah kita beri sanksi berupa penurunan pangkat sesuai dengan kesalahan,”ungkapnya.<sup>91</sup>

Ia juga menambahkan bahwa pimpinan selalu melakukan rapat di tiap minggu yakni di hari senin. Disana, Rektor UIN Walisongo selalu mengulang-ulang dan mengingatkan kembali kepada pimpinan di bagiannya masing-masing. Kepada rekanan pun selalu diingatkan.

Untuk sistem keuangan yang terbaru, Priyono mengungkapkan bahwa di UIN Walisongo sudah ada sistemnya.

“Untuk sistem keuangan sekarang kita sudah masuk pada era non tunai, gaji tidak dibayarkan dalam bentuk tunai yang memang agak rawan untuk diselewengkan. Tapi sistem non tunai itu ada plus dan minusnya. Untuk sistem transparansi, tidak semuanya bisa ditransparasikan. Itu ada di UU nomor 14 tahun 2008,” jelasnya.

Andi Fadhlán juga mengatakan bahwa upaya untuk melakukan tindakan korupsi di UIN Walisongo itu tetap ada. Menurutnya, jika dibuat presentase tidaklah banyak dan jika terjadi akan segera ditindak dengan diberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Seperti penurunan pangkat, peringatan tertulis.

“Prosedur sanksi yakni setelah melalui hasil investigasi Tim yang dibentuk, baru kemudian melaporkan hasilnya kepada pimpinan. Kemudian pimpinan (Rektor) yang mengambil keputusan dan tindakan untuk menginvestigasi lebih lanjut

---

<sup>91</sup> Wawancara Priyono, M.Pd. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan UIN Walisongo, tanggal 08 Juni 2018

untuk memberikan peringatan dan sanksi kepada yang bersangkutan,” jelasnya.<sup>92</sup>

Dalam rangka pemberlakuan sistem “Preventif Audit” sebagai upaya pemberantasan penyalahgunaan, SPI UIN Walisongo berjalan dengan melakukan audit secara menyeluruh mulai dari perencanaan sampai pelaporan. Sistem perencanaan yang berlangsung di UIN Walisongo memiliki aturan dalam penyusunan RKKL di tahun sebelumnya. Untuk penganggaran di tahun 2018 misalnya, penyusunannya ada di tahun sebelumnya. Kemudian direview oleh Tim SPI.

Kemudian diverifikasi dari sisi efektifitas dan efesiensinya, serta revelan atau tidak antara susunan anggaran dan apa yang akan dikerjakan. Apakah juga hal tersebut ada hubungannya atau tidak dengan Renstra (Rencana Strategis) ataukah kegiatan tersebut hanya diada-adakan saja. Menurut Andi, Perguruan tinggi harus memiliki visi misi dan rencana strategis.

“Kalau setiap penyusunan kegiatan tersebut hanya untuk menyerap anggaran maka hal itu tidak memiliki orientasi. Di UIN Walisongo melalui pengecekan SPI ini tidak menginginkan hal itu. Kami menginginkan agar anggaran sekecil apapun itu diserap sesuai dengan peruntukannya. Sehingga outputnya jelas,” terangnya saat diwawancarai.

Dalam penyusunan RAB yang diberikan untuk direview oleh SPI misalnya, jika tidak sesuai dengan peruntukannya, maka menurut Andi akan dicoret. Maksudnya untuk diperbaiki atau dihilangkan.

---

<sup>92</sup> Wawancara Andi Fadlan, Sekretaris Satuan Pengawasan Internal UIN Walisongo tanggal 08 Juni 2018

Kemudian proposal harus dikirimkan Lima hari sebelum kegiatan diselenggarakan. Dari proposal itu, SPI melihat lagi tentang rasionalisasi anggarannya, *output*, jika proposal sudah bagus baru bisa dijalankan, yang kemudian baru proses SPJ.

Dalam proses SPJ juga akan menggunakan beberapa standar, salah satunya adalah dengan SBM (Standar Biaya Maksimum), semisal honor narasumber di acara seminar sekian dan sesuai dengan standar maksimumnya dan harus real SPJ-nya. Jika tidak ada di SBM, maka tidak dapat di SPJ-kan. Sebelum SPJ selesai, SPI juga melakukan verifikasi faktual ke lapangan.

“Misalkan ada kegiatan seminar di hotel, SPI melakukan pengecekan secara langsung lokasi, pembicara, dan acara yang sebelumnya direncanakan. Jika direncanakan pembicara akan mengisi materi selama dua jam, kami pun akan mengecek secara langsung kepada narasumber. Atau jika tidak secara langsung, kami langsung menghubungi melalui telepon kepada narasumber. Kemudian peserta kegiatan juga dilakukan pengecekan secara langsung. Apakah nama-nama peserta yang di-SPJ-kan tersebut benar-benar mengikuti acara atau tidak. Untuk diambil beberapa sampling kebenaran laporan pertanggungjawaban,”ungkapnya.<sup>93</sup>

Andi Fadhlán juga menegaskan bahwa setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan faktanya, maka yang ada yakni terjadi penggelembungan dan terdapat indikasi korupsi. Di UIN Walisongo, menurut Andi, bahwa kampus UIN Walisongo sudah membangun sistem agar korupsi di dunia pendidikan berkurang.

---

<sup>93</sup> Wawancara Andi Fadlan, Sekretaris Satuan Pengawasan Internal UIN Walisongo tanggal 08 Juni 2018

“Jadi di sini, kita (SPI) punya kontribusi kesana. Kalau dibilang bagaimana perubahannya ya itu nanti dapat diukur sendiri. Cuma saya merasakan dulu di tahun 2015 di sini, sampai sekarang, saya melihat ada progres yang bagus untuk mengurangi budaya korupsi. Jika menghilangkan, mungkin belum bisa 100 persen, tapi seenggaknya meminimalisir berkembangnya budaya korupsi ini ke arah yang lebih jauh,” ungkap Andi.

Menurut sekretaris SPI ini, angka budaya korupsi di UIN Walisongo terus ditekan dan pegawai yang berpeluang (korup) tidak berani bermain-main dengan anggaran. Meskipun ada satu atau dua orang yang masih terbawa mindset lama. Yakni *mindset* bagi-bagi dan pembengkakan anggaran tapi tidak digunakan dengan semestinya.

Andi menilai, jika melihat kepatuhan penggunaan anggaran per-fakultas dan unit-unit di UIN Walisongo, menurutnya sudah bagus, termasuk ditingkat mahasiswa juga sudah cukup baik. Ia bercerita bahwa dulu awal-awal serba hancur. Bahkan, menurutnya di awal-awal, SPI memperoleh perlawanan dari pengelola anggaran.

“Kok SPJ semakin dipersulit dan lain sebagainya. Itu tantangan tersendiri untuk merubah budaya korup. Demikianlah mindset lama,”terangnya.

Menurut Andi, Rektor UIN Walisongo sangat komitmen dengan pemberantasan budaya korupsi di universitas. Sekiranya, penggunaan anggaran yang ada di UIN Walisongo jika SPI belum melakukan ACC, maka rektor pun tidak berani mengambil

keputusan. Sehingga kini sistem benar-benar terus di tata di UIN Walisongo.<sup>94</sup>

Biro AUPK UIN Walisongo memberi masukan kepada sistem dan sivitas UIN Walisongo yakni tentang model, maksudnya adalah para pemimpin yang *uswatun hasanah*. Menurutnya, contoh itu dari pimpinan.

“Kalau pimpinannya enggak care, ya enggak bisa. Itu kendala utamanya, pimpinannya bisa memberi contoh atau tidak. Harapan saya semua pejabat, khususnya di UIN Walisongo, saya mengajak untuk bertindak dan berperilaku sebagaimana mestinya sesuai dengan tuntunan agama yang pasti sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam organisasi. Mari kita bekerja dengan baik sesuai dengan ketentuan,” ujar Priyono.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Wawancara Andi Fadlan, Sekretaris Satuan Pengawasan Internal UIN Walisongo tanggal 08 Juni 2018

<sup>95</sup> Wawancara Priyono, M.Pd. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan UIN Walisongo, tanggal 08 Juni 2018

## **BAB IV**

### **ANALISIS TAFSIR ANTI KORUPSI DAN IMPLEMENTASINYA DI KALANGAN SIVITAS AKADEMIKA UIN WALISONGO SEMARANG**

#### **A. Tafsir Anti Korupsi dan Implementasinya di Kalangan Sivitas Akademika UIN Walisongo Semarang**

Perkara korupsi adalah tragedi moralitas kebudayaan yang sedang menjadi masalah di hampir segala lini kehidupan di Indonesia. Terdapat suatu kondisi di dalam alam kebudayaan kita yang mendorong orang-orang untuk melakukan tindakan korupsi. Begitu pula, terdapat pula kendala-kendala kultural mengapa korupsi begitu masif terjadi, sehingga pemberantasan terhadap korupsi hampir selalu tidak pernah tuntas. Realitas demikian menunjukkan bahwa korupsi bukanlah sekedar persoalan hukum, melainkan juga persoalan kebudayaan.<sup>96</sup>

Saat dikatakan sebagai budaya, budaya sendiri adalah suatu konsep yang membangkitkan minat. Secara formal,<sup>97</sup> budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hierarki, agama, waktu, peranan, hubungan,

---

<sup>96</sup>Santoso, *Korupsi dan mentalitas: Kendala kultural dalam pemberantasan korupsi di Indonesia*, Jurnal UNAIR, Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik Vol. 27, No. 4, tahun 2014, h. 174

<sup>97</sup> Mulayana dan Rakhmat, *Komunikasi Antarbudaya; Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, h.21.

ruang, konsep alam semesta, objek-objek materi, dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok. Budaya menampakkan diri dalam pola-pola bahasa dan dalam bentuk-bentuk kegiatan dan perilaku yang berfungsi sebagai model bagi berbagai tindakan penyesuaian diri dan gaya komunikasi yang memungkinkan orang-orang tinggal dalam suatu masyarakat di suatu lingkungan geografis tertentu pada suatu tingkat perkembangan teknis pada suatu saat tertentu.<sup>98</sup>

Budaya juga berkenaan dengan sifat-sifat dari objek materi yang memainkan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari.<sup>99</sup> Budaya juga berkesinambungan dan hadir dimana-mana. Budaya meliputi semua peneguhan perilaku yang diterima selama suatu periode kehidupan. Budaya berkenaan dengan bentuk dan struktur fisik serta lingkungan sosial yang mempengaruhi hidup kita. Oleh karenanya, Bennet (1980)<sup>100</sup> merumuskan sebuah definisi tentang budaya yang tidak sulit diterima oleh Antropolog, Sosiolog, maupun filsuf manapun, dengan mengatakan bahwa budaya mencakup segala hal yang membuat hidup dan dunia kita menjadi dapat dipahami. Budaya adalah yang membuat segala sesuatu berbicara. Lebih rinci, Bennet menuturkan bahwa budaya adalah;

---

<sup>98</sup> Mukhtar Lubis, *Negara dan Korupsi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Edisi I, 2008 h. 85

<sup>99</sup> Mulayana dan Rakhmat, *Komunikasi Antarbudaya; Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya*, h. 23

<sup>100</sup> Keith Tester, *Media Budaya dan Moralitas*, Juxtapose, Yogyakarta, 2003, h. 21

*Kebiasaan dan ritual yang mengatur dan menentukan hubungan sosial kita berdasarkan kehidupan sehari-hari sebagaimana halnya dengan teks-teks tersebut –sastra, musik, televisi, film- dan melalui kebiasaan serta ritual tersebut dunia sosial natural diatampilkan kembali atau ditandai – dimaknai – dengan cara tertentu yang sesuai dengan konvensi tertentu.<sup>101</sup>*

Alam kebudayaan masyarakat kita sesungguhnya adalah masyarakat agraris dengan komunalitasnya. Masyarakat yang demikian selalu menunjukkan keinginan untuk hidup bersama secara damai dan harmonis. Karenanya, mereka cenderung menghindari konflik agar harmonisasi dalam masyarakat terjadi. Setiap kegiatan yang melanggar harmonisasi, akan dianggap sebagai anomali (menyimpang) dan layak untuk dikenai sanksi sosial. Dalam konstruksi tersebut, masyarakat cenderung “diam” ketika ada hal-hal yang mungkin tidak disepakatinya. Alasan utama mengedepankan harmonisasi sosial menjadi pilihan untuk membiarkan berbagai kemungkinan pelanggaran hukum seperti korupsi. Misalnya, ketika ada kolega atau tetangga yang melakukan aktivitas yang mengarah pada tindakan memperkaya diri, cenderung dibiarkan, karena khawatir terjadi konflik di dalamnya.

Masyarakat agraris meminjam terminologi Magnis Suseno (1999:43) cenderung memiliki sikap untuk memperkatakan hal-hal yang tidak enak secara tidak langsung. Orang Jawa mampu menutupi

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, h. 23



kekecewaannya melalui kebiasaan berpura-pura (*ethok-ethok*). Kemampuan ini dianggap sebagai keutamaan hidup, sebagai seni yang tinggi dan bernilai positif. Terhadap yang tidak disukainya, orang Jawa akan menyampaikan melalui sikap tidak langsung atau menyembunyikan perasaan kekecewaan tersebut, kecuali pada keluarga inti. Belum lagi, berbagai kendala kebudayaan lainnya yang turut serta menghambat pemberantasan korupsi, tetapi justru menyuburkan peluang korupsi selalu terjadi.

Selama ini masyarakat cenderung memahami bahwa korupsi itu merupakan problema yuridis semata, dan hanya bisa didekati dengan pendekatan hukum. Korupsi itu sesungguhnya terkait juga dengan suatu perilaku yang didorong oleh mentalitas kebudayaan dan alam pikiran yang menjadikan “harta” dan “tahta” sebagai hal yang utama, yakni sebagai alat untuk memperkaya diri bukan untuk pengabdian kepada kepentingan publik. Korupsi terjadi karena pelaku menganggap bahwa dibalik kekuasaan yang dimilikinya, termasuk kekuasaan pengelolaan keuangan, adalah suatu berkah bagi kehidupannya. Kekuasaan tidak lagi menjadi amanah yang suatu saat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan publik. Itulah sebabnya, orientasi kekuasaan yang demikian lebih cenderung menitikberatkan pada pemuasan hasrat kepemilikan “harta” daripada hasrat menyalurkan manfaat bagi publik yang lebih luas.

Kenyataan merebaknya kasus korupsi menunjukkan bahwa, *Pertama*, negara yang tidak mendasarkan pada nilai-nilai agama

merupakan negara yang relatif memiliki komitmen kuat derajat anti korupsinya. Data yang dilansir oleh PERC menempatkan negara seperti Jepang, Amerika Serikat (bersih), Hong Kong (bersih), Australia (bersih) dan Singapura (terbersih) sebagai wilayah yang relatif lebih baik dibandingkan dengan negara religius, seperti Indonesia.

*Kedua*, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, ajaran, doktrin dan nilai-nilai Islam ternyata belum memberi kontribusi yang signifikan bagi terselenggaranya tata pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas korupsi. Pemahaman Islam yang berorientasi pada keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat belum integral dengan sistem hukum yang menjamin mewujudkan pemberantasan korupsi untuk kemakmuran rakyat.<sup>102</sup>

Prespektif agama Islam sendiri di dalam leksikon hukumnya memang tidak ditemukan istilah korupsi, atau istilah lain yang secara definitif sama dengan korupsi sesuai rumusan hukum positif. Namun, ini tidak berarti hukum Islam tidak memiliki ketentuan terkait tindak pidana korupsi. Terdapat sejumlah terminologi yang memiliki kedekatan konseptual dengan korupsi, bahkan dalam maknanya yang lebih luas, seperti *ghulul*, *risywah*, *sariqah*, *qath' al-thariq*, *akl al-suht*, *mukabarah*, *ghashab*, *khiyanah*, *intikhab*, *ikhtilash*, dan yang lain.

---

<sup>102</sup> Maghfur Ahmad, *Fiqh Anti-Korupsi Madzhab Negara: Memadu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 12, Nomor 1, Juni 2014, h. 26

Konsep *ghulul*, misalnya, meski secara historis muncul untuk merespon tindak menggelapkan harta rampasan perang (*ghanimah*) sebelum dibagikan (Ali Imran ayat 161), namun jelas makna dan cara kerjanya tidak sesempit itu. Ghulul pada dasarnya adalah “mengambil sesuatu dan menyembunyikannya di dalam hartanya,”<sup>103</sup>

Berdasarkan hadis-hadis yang muktabar, di dalam literatur fikih kita temukan dua tindakan yang diasosiasikan kepada praktik *ghulul*. *Pertama*, komisi atau mengambil sesuatu atau penghasilan di luar gaji yang telah ditetapkan. Rasulullah Saw bersabda: “*Siapa saja yang telah aku angkat sebagai pekerja dalam satu jabatan, kemudian aku gaji, maka sesuatu yang diterima di luar gajinya adalah ghulul.*” (HR. Abu Dawud)

*Kedua*, hadiah yang diterima seseorang karena jabatan yang melekat pada dirinya. “Hadiah untuk pejabat adalah *ghulul*,” tegas Nabi (HR. Ahmad). *Ghulul* dalam arti penggelapan harta perang dengan *ghulul* dalam dua makna yang disebut terakhir, sesungguhnya disatukan oleh dua sifat mendasar, yaitu adanya khianat atas sebuah

---

<sup>103</sup> Haidar Bagir, *Korupsi dari Perspektif Filsafat Dan Etika Islam, dalam Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi*, Globethics.net Focus, 2015, h. 23-24

pekerjaan dan adanya unsur merugikan pihak lain, baik individual maupun sosial dan negara secara umum.<sup>104</sup>

Dalam maknanya yang luas, *risywah* –sering diterjemahkan ‘suap’– didefinisikan Al-Jurjani sebagai “*Sesuatu yang diberikan untuk menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah.*” Kata *risywah* juga digunakan untuk menyebut sesuatu yang diberikan kepada seorang hakim demi mendapat kepastian hukum atau sesuatu yang diinginkan, selain juga untuk menyebut usaha untuk menyegerakan pengurusan masalah hukum dan yang lain tanpa melalui prosedur yang berlaku. Dalam sabdanya yang tegas, Nabi menyatakan: “*Allah melaknat penyuap dan penerima suap.*” (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Ibn Majah, dan Ahmad). Meski dalam praktik korupsi boleh jadi tak ada unsur suap, satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa beberapa terminologi hukum di atas itu pada dasarnya mengarah pada tindakan korupsi dalam arti luas, yakni segala perbuatan yang menimbulkan fasad di muka bumi.<sup>105</sup>

Begitupun term-term di dalam al-Qur’an lainnya yang cukup detail untuk mendefinisikan dan mengkorelasikannya dengan tujuan

---

<sup>104</sup> Bambang Widjoyanto, Abdul Malik Gisamar, dan Laode M. Syarif (ed.), *Koruptor itu Kafir: Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Mizan, Jakarta, Cet. I, 2010, h. 19-22

<sup>105</sup> Haidar Bagir, *Korupsi dari Perspektif Filsafat Dan Etika Islam*, dalam *Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi*, Globethics.net Focus, 2015, h. 23-24

menjawab pertanyaan tentang korupsi yang membudaya di tengah masyarakat kita.

Onghokham dalam Mochtar Lubis dan James C. Scot (1985:115-116) mengatakan bahwa korupsi adalah satu gejala sosial dan politik dalam sejarah dan masa kini. Dalam tulisan tersebut Onghokham mengungkapkan tentang sumber-sumber tradisional dari gejala korupsi di Indonesia yang bermula dari ketika adanya pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan publik. Pada masa kerajaan, korupsi memang tidak dikenal, karena saat itu belum ada pemisahan secara jelas antara kepemilikan *private* dengan kepemilikan publik. Raja sebagai pemimpin tradisional kerajaan menganggap bahwa keseluruhan sumberdaya dalam wilayahnya adalah milik raja sebagai pribadi. Semua penghasilan kerajaan menjadi bagian dari kepemilikan pribadi.

Menurut Onghokham (1985) selanjutnya, korupsi baru dikenal ketika sistem pemerintahan modern mulai dikenal, justru ketika kolonialisme Belanda mulai memisahkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Dalam sistem tersebut, sudah mulai dikenal istilah pejabat sebagai orang yang diberi wewenang (otoritas/kekuasaan), karena dipercaya umum, dan penyalahgunaan darinya adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan umum yang diberikan kepadanya. Korupsi kemudian menjadi istilah yang menyertainya. Korupsi muncul dari penyalahgunaan kewenangan (*abuse power*) yang berakibat pada kerugian kepentingan umum atau

negara. Korupsi dalam konteks ini berupa penyelewengan kepentingan umum demi kepentingan pribadi yang dapat berupa penyelewengan keuangan negara, pemerasan atau pungutan liar, suap, hingga menarik keuntungan dari kewenangan.

Tingginya tingkat korupsi yang ada dan malah banyak dilakukan di lingkaran birokrasi membuat negara ini seringkali disebut sebagai negara kleptokrasi. Kleptokrasi berhubungan dengan suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan begitu seriusnya tingkat korupsi suatu negara. Gejala kleptokrasi biasanya ditandai dengan keinginan kuat pengelola negara memperoleh keuntungan melalui korupsi sebagai tujuan organisasi, kepentingan negara dan kepentingan penguasa menjadi kabur batasnya.

Kleptokrasi merupakan suatu bentuk korupsi tingkat tinggi (*heavy corruption*). Istilah ini berasal dari istilah penyakit kleptomania yang berarti kebiasaan mencuri dari seseorang yang tidak dilakukan untuk pencaharian. Suatu istilah terkait dengan penyakit psikologis seseorang untuk memiliki barang melalui pencurian. Menurut Muhammad Mustofa, ketika korupsi di Indonesia begitu serius, apalagi jika dilakukan oleh birokrasi, maka dapat dikatakan bahwa kleptokrasi merupakan ciri korupsi di Indonesia. Dengan ciri kleptokrasi, maka tindakan korupsi menjadi budaya atau

dipandang secara lumrah saja oleh sebagian orang. Oleh karenanya, menjadi wajar jika korupsi kemudian sulit diberantas atau dicegah.<sup>106</sup>

Secara garis besar Islam dibangun atas tiga unsur utama, yaitu akidah, syari'at, dan akhlak (akidah, syari'at, dan akhlak merupakan istilah lain dari iman, Islam, dan ihsan).<sup>107</sup> Akidah merupakan pondasi bangunan keyakinan umat Islam secara vertikal, syari'at berisi tentang aturan-aturan dalam membimbing kehidupan manusia disamping juga berisi sanksi-sanksi terhadap yang melanggar aturan tersebut, sementara akhlak berisi tentang tuntunan perilaku dan adab kesopanan baik kepada Allah (*hablum minallah*) maupun terhadap sesama manusia (*hablum minannas*). Ketiga unsur utama ajaran Islam ini pada intinya untuk mencapai tujuan teologis yakni sebagai rahmat bagi sekalian alam (QS. al-Anbiya': 107).

Namun pada kenyataannya, patut disayangkan bahwa sesungguhnya bahwa doktrin-doktrin normatif yang tertuang dalam al-Qur'an terkait korupsi sebagaimana di atas, bagi kebanyakan umatnya tidak memiliki dimensi sosial dan intelektual yang kuat dalam membendung realitas kemungkaran yang terjadi. Sungguh asumsi seperti ini perlu direkonstruksi, sebab Islam bukanlah teologi

---

<sup>106</sup> Santoso, *Korupsi dan mentalitas: Kendala kultural dalam pemberantasan korupsi di Indonesia*, Jurnal UNAIR, Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik Vol. 27, No. 4, tahun 2014, h. 178

<sup>107</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Dar as-Salam, Riyadh, 1998, cet. 1, h. 79

eskapistik yang mengamini umatnya untuk larut dalam buaian spiritual belaka, sehingga lupa akan tanggung jawab sosialnya.<sup>108</sup>

Padahal kita mengetahui bersama bahwa pembahasan terkait korupsi yang ada di dalam al-Qur'an sebagaimana yang dibahas sebelumnya, yang mana al-Qur'an yang telah mewacanakan konsep, teoritis, contoh kasus, dan peringatan agar sebagai Islam yang benar-benar menjauhi tindakan korupsi ini. Dari pembahasan sebelumnya juga terdapat kesamaan pandangan oleh para mufassir, sejarah, dan lainnya bahwa korupsi adalah bentuk tindakan yang jahat yang mempunyai modus *opagandi* beragam dan terus berkembang, mengakibatkan kerusakan yang bersifat massif.

Oleh karenanya, para pelaku korupsi harus ditindak dan diberi efek jera (sanksi) agar tidak semakin membuat kerusakan yang lebih luas.

Di dalam hukum Islam/fikih telah menawarkan berbagai solusi untuk mengatasi tindakan korupsi ini, diantaranya pencegahan, pemberian sanksi hukum dan sanksi moral. Dalam hukum pidana Islam yang tertuang dalam kitab suci al-Qur'an dikenal tiga sistem pemberian sanksi (*Jarimah*), yaitu *Jarimah Hudud*, *Jarimah Qishas*, dan *Jarimah Ta'zir*.

Suatu sanksi hukum diancamkan kepada seorang pelaku tindak pidana agar orang-orang tidak turut melakukan tindak pidana

---

<sup>108</sup> Abdul Karim, *Teologi Anti Korupsi*, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013 h.187



tersebut. Oleh karena itu pada dasarnya pelarangan suatu perbuatan pidana dan penetapan hukum-hukumnya adalah untuk memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat, atau dengan kata lain untuk kemaslahatan umum (*almaslhatul ummah*).

Sanksi hukum *qishos* tentu saja tidak dapat diberlakukan, sebab korupsi berbeda dengan tindak pidana pencurian yang telah jelas hukumnya dalam nash (Al-Qur'an) meskipun sama-sama merupakan pelanggaran terhadap *Hifdzul mal* akan tetapi korupsi tidak ditemukan hukumnya dalam nash. Oleh karena itu, terhadap tindak pidana korupsi ini tidak dapat dikenakan hukuman *Qishas/hadd*.

Namun demikian, bukan berarti tindak pidana korupsi bisa lepas dari hukuman, karena perbuatan tersebut jelas-jelas telah mengganggu kemaslahatan umum, sehingga dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'dzir*, yang dalam pelaksanaannya mungkin menyamai atau bahkan melebihi sanksi hukuman *Qishas* atau *had*.

*Syara'* tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap *jarimah ta'dzir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang sering-an-ringanya kepada yang sampai seberat-beratnya.<sup>109</sup>

Di dalam buku Ayat-Ayat Korupsi, Hakim Muda Harahap menjabarkan terkait prinsip-prinsip hukum pidana Islam, baik yang

---

<sup>109</sup> Hardjono, Anwar, *Hukum Islam; Keluasan dan Keadilannya*, Bulan Bintang, Jakarta, 1968, h. 158

kontemporer maupun klasik. Dari hasil penelusuran tersebut dikemukakan tiga kategori hukuman yang bisa dijatuhkan bagi koruptor dalam perspektif al-Qur'an.

a. Korupsi dalam Batas *Hudud*

Bentuk korupsi dalam batas wilayah jarimah Hudud terdiri dari dua bentuk, yaitu: Jarimah as-Sariqah (pencurian) dan Jarimah al-Hirabah (perampokan). Seperti diuraikan sebelumnya, bahwa kedua jarimah tersebut dapat diamini sebagai salah satu tipologi korupsi. Sehingga jenis-jenis hukuman kedua jarimah tentu dapat disepadankan dengan hukuman korupsi.<sup>110</sup>

Pertama, bentuk hukuman jarimah korupsi pencurian dapat ditetapkan hukuman potong tangan dan penyitaan harta curian, sebagaimana penafsiran dari QS. al-Ma'idah ayat 38. Hukum potong tangan ini tidak berlaku bagi orang tua yang mencuri harta anaknya, pembantu yang mencuri harta tuannya, dan pencurian di musim paceklik. Misalnya, kasus Umar bin Khatab yang membebaskan hukum potong tangan bagi seorang miskin yang mencuri ketika itu sedang terjadi musim *paceklik*.

Dari contoh tersebut, bisa dipahami bahwa ketetapan legal spesifik tidak harus selalu dilakukan, karena yang terpenting adalah dimensi ideal moral, yaitu perlunya menciptakan keadilan sosial. Dari kacamata Fazlurrahman, kalau

---

<sup>110</sup> Hakim Muda Harahap, *Ayat-ayat Korupsi*, Gama Media, Yogyakarta, 2009, h.144

ada pejabat korupsi maka ia harus "dipotong tangannya" (dipecat dari jabatannya) dan uang yang dikorupsi harus disita, serta diproses secara hukum sesuai dengan kadar kesalahannya. Dengan kata lain, pencuri yang baru pertama kali mencuri tidak harus dipotong tangan, tetapi cukup dengan hukuman *ta'zir*.

Sedangkan Muhammad Syahrur merekonstruksi teori Hudud dengan perspektif baru, di mana hukum potong tangan dipandang sebagai hukuman tertinggi. Sehingga hakim dapat berijtihad untuk mempertimbangkan jenis hukuman yang akan diterapkan bagi koruptor sebagaimana kadar sariqah. Dengan demikian, hukum potong tangan boleh di ganti dengan jenis hukuman yang lebih rendah, tetapi tidak boleh di ganti dengan jenis yang lebih tinggi.

Kedua, bentuk hukuman bagi koruptor setingkat hirabah ditetapkan sebagaimana QS. al-Ma'idah ayat 33. Muhammad Syahrur dalam memahami ayat di atas memaparkan secara umum ada tiga bentuk pilihan hukuman bagi pelaku hirabah, yaitu hukuman mati, potong tangan dan kaki, dan penjara seumur hidup. Ketiga bentuk hukuman ini merupakan batasan maksimal. Artinya hakim tidak dapat menetapkan dan memutuskan diluar wilayah tiga hukuman tersebut. Hakim boleh berijtihad di dalam penetapan salah satu dari tiga hukuman tersebut, disesuaikan dengan kadar korupsi yang dilakukan. Lain halnya dengan pendapat jumhur ulama yang menetapkan empat pilihan

hukuman, mati, salib, potong tangan dan kaki, serta pengasingan, di mana penetapannya disesuaikan dengan kadar kejahatannya.<sup>111</sup>

b. Korupsi dalam batas *Ta'zir*

Seperti telah dijelaskan di muka, setiap kejahatan yang telah ditentukan sanksinya dalam al-Qur'an dan hadis disebut sebagai *jarimah hudud*. Sedangkan jarimah yang tidak ditentukan sanksinya disebut *jarimah ta'zir*. Jenis hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir* dapat ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kemaslahatan umum.

Beberapa hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku ini berdasarkan aturan hukum Islam adalah hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman buang, peringatan keras dan dihadirkan di hadapan sidang, dicela, dikucilkan, dinasihati, dipecat dari jabatannya, dicabut hak-hak tertentu (hak jabatan, hak masuk tentara, hak memilih dan dipilih, dan hak menjadi penasihat), diumumkan kesalahannya, tidak dishalatkan, dan diancamkan masuk neraka.<sup>112</sup>

c. Korupsi dalam Batas *Mukha'lafah*

Hukuman korupsi dalam batas jarimah mukhalafah adalah hukuman yang diberikan kepada pegawai negeri atau seseorang yang melakukan kurangdisiplinan atau pelanggaran terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Seperti seperangkat

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, h.149-150

<sup>112</sup> *Ibid.*, h.151-152

operasional kerja yang harus dipenuhi oleh pegawai negeri, seperti mengangkat sumpah jabatan, menyimpan rahasia jabatan, menjaga kemandirian rahasia jabatan, menyimpan surat-surat rahasia, menaati jam kerja masuk, bekerja dengan baik dan berprestasi, berkelakuan baik, meminta izin bila berkeinginan tidak masuk kerja, dan larangan menerima hadiah selama menjabat.

Bila kewajiban-kewajiban tersebut dilanggar maka, ia telah dianggap melakukan korupsi dalam batas *jarimah mukhalafah*. Pelaku dapat dikenai sanksi yang tidak bisa diancam dengan hukuman penjara, tetapi hanya dapat dihukum dengan membayar denda, perincatan keras, atau dipecat dari jabatannya.<sup>113</sup>

Di masyarakat kita kini, semua undang-undang dan peraturan atau hukuman-hukuman yang telah diberlakukan pemerintah Indonesia terhadap semua tindak pidana diantaranya korupsi sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dan yang telah disempurnakan oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 yang hal ini tergolong kedalam *jarimah ta'dzir*, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at dan dapat mewujudkan *maslakhathul ummah*, bisa dikatakan telah sesuai dengan prinsip *ta'dzir* dalam hukum pidana Islam, yang pada prinsipnya memang merupakan hak pemerintah dalam rangka menjaga kemaslahatan masyarakat yang dipimpinnya.

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, h.161-162

## 1. UIN Walisongo dan Penafsiran atas Wacana Korupsi

Setelah meninjau aspek konsepsi-konsepsi dan aspek penafsiran oleh para mufassir sebagaimana dijelaskan di bab sebelumnya, para mufassir al-Qur'an memiliki visi dan misi yang serupa terkait pandangannya terhadap tindak pidana korupsi dengan pandangan al-Qur'an yang sudah ada sejak zaman nabi dan membudaya hingga kini. Bahwa potensi penyebab korupsi sejatinya dimiliki oleh setiap manusia yang tinggal di dunia. Karena pada dasarnya manusia senang dengan kesenangan yang ditawarkan dunia. Sebagaimana dipaparkan di dalam QS. Ali Imran ayat 14 bahwa kesenangan yang berlebihan akan memicu perbuatan korup.

Penafsiran terkait korupsi telah didapatkan penjelasan secara global bahwa pembahasan tentang korupsi yang ada di dalam al-Qur'an menjawab penjelasan secara garis besar serupa dengan tindak kejahatan harta benda dan kejahatan terhadap manusia. Tinjauan dalam tindakan pengambilan harta orang atau pihak lain secara tidak sah diidentikkan dengan *al-Saraqah*. Dari sisi penyalahgunaan amanah yakni *al-Suht* dan *al-Dalw*. Dari sisi penggelapan harta publik yakni *Ghulul* dan dari sisi korupsi yang sangat merusak identik dengan *al-Harabah*.

Sebagaimana kita ketahui juga bahwa tindakan korupsi sesuai dengan pembahasan-pembahasan sebelum adalah tentu sebuah perbuatan dosa yang secara tidak langsung adalah mengkhianati ajaran Allah dan rasulnya yang tertuang di dalam al-Qur'an dan dalil

teologis lainnya. Al-Qur'an di dalam pembahasannya juga mengutarakan terkait ancaman hukum kepada pelaku kejahatan ini agar mendapatkan balasan dunia dan pemberian efek jera.

Korupsi sebagaimana juga yang diketahui bersama bahwa hal tersebut adalah sebuah tragedi moralitas kebudayaan yang sedang menjadi masalah di hampir segala lini kehidupan. Meskipun terdapat kendala-kendala kultural yang kemudian korupsi semakin kesini begitu masif terjadi tanpa mengenal batas, dari sanalah bahwa korupsi bukanlah sekedar persoalan hukum, melainkan juga persoalan kebudayaan yang harus segera diberantas.<sup>114</sup>

Saat korupsi sudah menjadi suatu perkara yang membudaya di tengah lini masyarakat kita, kejahatan korupsi ini telah menjadi ironis bangsa ini karena pada faktanya telah masuk ke dunia pendidikan di Indonesia. Berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) diketahui bahwa selama 2003-2013, penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) berhasil menindak kasus korupsi pendidikan sebanyak 296 kasus dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp 619,0 miliar.<sup>115</sup>

Hal yang menarik adalah ketika lembaga seperti Kemdikbud dan Perguruan Tinggi telah berubah menjadi wilayah korup paling banyak kedua dan ketiga kerugian terhadap negaranya. Meskipun

---

<sup>114</sup> Santoso, *Korupsi dan mentalitas: Kendala kultural dalam pemberantasan korupsi di Indonesia*, Jurnal UNAIR, Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik Vol. 27, No. 4, tahun 2014, h. 174

<sup>115</sup> *Satu Dasawarsa Pemberantasan Korupsi Pendidikan, 2003-2013*, Divisi Monitoring Pelayanan Publik-Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2013

jumlah kasus korupsi yang terjadi di sini secara kuantitas tidak banyak, namun sekali terjadi korupsi mengakibatkan kerugian negara yang banyak.

Problematika korupsi ini yang masuk ke dalam lembaga-lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi, baik lembaga umum maupun yang berlatarbelakang atau background agama sekalipun memicu tanda tanya besar hingga yang paling mendasar yakni tentang persoalan moralitas dan peranan ajaran agama di dunia pendidikan itu sendiri sehingga membuat korupsi bisa dapat membudaya. Berpijak dari faktor-faktor penyebab korupsi bahwa korupsi bukan semata-mata disebabkan oleh masalah ekonomi, namun terutama masalah etika atau moralitas. Korupsi merupakan permasalahan mental di mana nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral diabaikan dan lebih dipenuhi oleh masalah-masalah dunia.<sup>116</sup>

UIN Walisongo Semarang sebagai lembaga Islam yang di dalamnya terdapat lingkungan terjadinya transfer ilmu-ilmu agama dan terapannya di dunia nyata memandang masalah korupsi ini cukup dialektis, khususnya saat korupsi sudah masuk ke ranah-ranah lembaga pendidikan. Karena UIN Walisongo juga adalah lembaga pendidikan islam tingkat perguruan tinggi yang tidak dapat dipungkiri dapat pula terjangkau masalah ironis berupa korupsi ini.

Oleh karena itu, terkait korupsi yang sebagaimana agama juga melarang dengan keras dan merusak. Disinilah juga,

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, h. 110



dipertanyakan pentingnya peranan perguruan tinggi khususnya di UIN Walisongo mampu atau tidak dapat menjadi institusi pendidikan dan bisa menjadi tonggak bagi pembangunan akuntabilitas, transparansi, bisa menjadi motor penggerak integritas.

UIN Walisongo Semarang dengan mengembangkan paradigma perguruan tingginya pasca transformasinya dari IAIN menjadi UIN pada tahun 2014 lalu disertai pula dengan perubahan kerangka berpikir para pimpinan perguruan tinggi untuk mengembangkan ranah keilmuan yang selama ini telah berjalan yakni tidak hanya sekadar mengedepankan perubahan legal-formal-administratif semata. Namun, pemikiran dan pengembangan studi agama Islam yang berkembang dikembangkan dalam cakupan yang lebih luas dan kompleks. Yakni lebih jelasnya adalah tidak adanya dikotomi antara ilmu agama dan sains.<sup>117</sup>

Paradigma yang dikembangkan ini adalah paradigma kesatuan ilmu-ilmu pengetahuan (*wahdat al-ulm* atau *unity of sciences*). Paradigma ini menegaskan bahwa pada dasarnya semua ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun sains, berasal dari satu sumber yang sama yaitu Allah. Tujuannya, mengantarkan para

---

<sup>117</sup> Akh. Minhaji, *Transformasi IAIN Menjadi UIN, Sebuah Pengantar*, dalam, M. Amin Abdullah, dkk, *Menyatukan Kembali Ilmu-Ilmu Agama dan Umum; Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum*, Yogyakarta : SUKA-Press, 2003

pengkaji ilmu pengetahuan agar semain dekat kepada Allah yang Maha Tahu.<sup>118</sup>

Dengan paradigma ini diharapkan mampu melahirkan sivitas akademik UIN Walisongo yang memiliki wawasan keilmuan yang lebih luas dan mendalam. Memandang semua cabang ilmu pengetahuan sebagai kesatuan *holistic* dan mampu mendialogkan ilmu-ilmu tersebut untuk menghasilkan produk keilmuan baru yang bijak dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Poin utama dari *unity of sciences* di UIN Walisongo ialah menyatukan semua cabang ilmu pengetahuan dan memberikannya landasan berupa wahyu sebagai pengikatnya.

Ahli Hukum Islam UIN Walisongo yang sekarang juga menjabat sebagai Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang, Muhyar Fanani juga mengungkapkan menjelaskan bahwa alam ilmu yang kita sebut sebagai ilmu umum atau lebih tepatnya sains modern dalam hal ini sebenarnya terdapat pula nilai-nilai ketuhanan di dalamnya dan sebaliknya di dalam ilmu keislaman, yaitu ilmu yang berbasis pada wahyu di situ juga terdapat nilai-nilai kemanusiaan. Maka baginya, tafsir al-Quran yang

---

<sup>118</sup> Tsuwaibah, *Epistemologi Unity of Science Ibn Sina Kajian Integrasi Keilmuan Ibn Sina dalam Kitab Asy-Syifa Juz I dan Relevansinya dengan Unity of Science IAIN Walisongo*, Walisongo Press, Semarang, 2014, h. 75

mempelajari tentang wahyu itu juga harus bisa menyentuh persoalan manusia di suatu waktu dan tempat.<sup>119</sup>

Seperti halnya persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat yakni *gate* antara kaya dan miskin. Dalam hal ini, bagaimana tafsir dan paradigma *unity of science* sebagai visi UIN Walisongo yang berkemajuan itu mampu menjawab persoalan tersebut. Dan hal itulah yang harus dipelajari kemudian betul-betul bisa diterapkan.

*Unity of Science* disini diharapkan mampu memperdalam sebuah dialektika yang ada di tengah-tengah masyarakat yang sedang dikaji oleh para sivitas akademik di UIN Walisongo, termasuk juga saat mengkaji persoalan korupsi yang ironis. Bagaimana kajian realistik dibedah dengan ilmu-ilmu keilahian sehingga lebih mendalam dan lengkap untuk ditawarkan menjadi wacana dan solusi kepada sosial.

Muhyar Fanani juga mengutarakan bahwa pendidikan dan berjalannya lembaga di dalamnya juga merupakan persoalan yang sangat dekat dengan tugas-tugas keimanan. Namun yang terjadi malah juga marak terjadi praktik korupsi di dunia pendidikan, tidak terkecuali dunia pendidikan Islam. Menurutnya, karena umat Islam hanya melihat Islam sebatas formal saja.

---

<sup>119</sup> Wawancara Dr. Muhyar Fanani, M.A., Pakar Hukum Islam dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo, tanggal 22 Januari 2018

Selanjutnya, Mukhsin Jamil, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (FUHum) UIN Walisongo menjelaskan bahwa korupsi yang membudaya hingga kini adalah terutama di dunia politik yang membutuhkan biaya yang tinggi. Selain itu juga karena gaya hidup masyarakat kita dan lemahnya moral manusia. Terkait terjadinya korupsi di lembaga-lembaga pendidikan, menurut Mukhsin, semestinya lembaga pendidikan khususnya kampus adalah garda terdepan dalam pemberantasan korupsi ini. Birokrasi dan tata kelola yang *clean goverment*, sehingga tercipta *Good University Goverment*. Selain itu juga untuk terus melakukan penguatan dan pengembangan sistem.<sup>120</sup>

Sedangkan Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK), Priyono mengungkapkan bahwa ia tidak memungkirinya terjadinya korupsi di dunia pendidikan karena menurutnya data tersebut juga berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Dengan melihat fakta. Misalnya, ia mencontohkan bahwa sekarang banyak pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan sehingga rektor dari kampus Unsoed Purwokerto terlibat kasus. Kemudian di kantor-kantor wilayah itu juga terjadi kasus korupsi. Fenomena yang ada itu tentunya menjadi dasar yang mengatakan bahwa dunia pendidikan termakan budaya korupsi.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> Wawancara Dr. M. Mukhsin Jamil, M.Ag., Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, tanggal 19 Januari 2018

<sup>121</sup> Wawancara Priyono, M.Pd. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan UIN Walisongo, tanggal 08 Juni 2018

Selain ketiga pejabat kampus di atas, sivitas akademika UIN Walisongo yang lain yakni mahasiswa dan alumni menilai, masih banyak PR yang harus dilakukan UIN Walisongo dalam rangka menciptakan wilayah yang terbebas dari budaya korupsi, yakni terkait transparansi, perbaikan sistem, rekrutmen yang profesional, dan kajian mendalam tentang pribumisasi atau aktualisasi al-Qur'an maupun Hadis nabi untuk bisa dibedah dan diterapkan di lingkungan kampus agar segera diaktualisasi oleh sisvitas akademika UIN Walisongo baik dalam bentuk program-program yang inspiratif dan kekinian, termasuk korupsi karena problem ini sudah membudaya dan harus di berantas.<sup>122</sup>

Sebagaimana juga yang sudah dijelaskan penulis di bab sebelum-sebelumnya yakni bahwa tindak pidana korupsi ini sangat bertentangan dengan al-Qur'an, sebagaimana *Ghulul, Dalw, Suht, Hirabah, Saraqah* dan segala pembahasan konep dan hukum di dalamnya, Mukhyar Fanani, yang mana sebagai pakar hukum Islam di UIN Walisongo memaparkan terkait cara agar tercipta lingkungan pendidikan yang bebas dari budaya korupsi, serta sivitas yang ada di dalamnya benar-benar memahami suatu masalah yakni dengan tetap berlandaskan kitab suci al-Qur'an. Lebih jelasnya yakni dengan menggunakan ilmu pengetahuan paling mutakhir dalam memahami kitab suci. Dengan demikian, kitab suci akan lebih mudah

---

<sup>122</sup> Wawancara Hafidhin, Bela Maesaroh, dan Gigih Firmansyah, mahasiswa dan alumni UIN Walisongo

dihubungkan dengan alam riil. Contohnya bagaimana cara agar warga UIN Walisongo dalam memahami ayat anti korupsi, harus pula dengan menggunakan pengetahuan berupa teori paling mutakhir untuk memahami ayat tersebut.

Untuk mendalami bagaimana sivitas akademika UIN Walisongo dalam bertindak, dikorelasikan dengan pemahaman ayat-ayat terkait korupsi sebagaimana dijelaskan sebelum-sebelumnya, Mohammad Sya'roni, Kepala jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (IAT) mengungkapkan bahwa korupsi sudahlah jelas aturannya. Yakni *Wassariqu wassariqotu* atau mengambil yang bukan haknya. Menurutnya, UIN Walisongo Rektor juga terus menyampaikan UIN Walisongo berada di zona integritas wilayah anti korupsi.<sup>123</sup>

Hal tersebut (Zona Integritas), menurut Sya'roni adalah sebagai salah satu penafsiran untuk agenda pemberantasan budaya korupsi yang ada di UIN Walisongo. Terkait bagaimana sivitas akademika UIN Walisongo Semarang dalam pendalaman memahami ayat-ayat korupsi sendiri, menurutnya, sivitas akademika UIN Walisongo sangat setuju dengan apa yang juga telah disebutkan di dalam al-Qur'an maupun dalil keislaman lain.

Representasi terkait wacana korupsi di kalangan sivitas akademika UIN Walisongo Semarang, sebagaimana Sya'roni, Mukhsin Jamil, dan Muhyar Fanani, Priyono menyetujui bahwa

---

<sup>123</sup> Wawancara Muhammad Sya'roni, M.Ag, Kepala Jurusan Ilmu al-Quran dan Tafsir, UIN Walisongo, tanggal 18 Januari 2018

sumber tindakan yang ada di UIN Walisongo pun harus bersumber dari al-Qur'an, khususnya dalam pembahasan terkait korupsi di UIN Walisongo. Di UIN Walisongo sendiri, korupsi uang meskipun dipandang tidak signifikan karena dananya tidak seberapa. Namun jika ada yang melanggar tetap diberikan sanksi. Bahkan akan dikeluarkan dari birokrasi. Dan segala prestasi yang di dapatkan kini menurut mereka adalah juga sebagai salah satu bentuk penafsiran untuk agenda pemberantasan budaya korupsi yang ada di sekitar kita.

Di dalam proses pengkorelasian dan penerapan antara prinsip berfikir dan tindakan atau sistem yang dipakai di UIN Walisongo menurut berbagai narasumber, terus dilakukan evaluasi dan perbaikan yang intens guna tercapai visi perguruan tinggi.

Pendalaman kajian al-Qur'an misalnya, Kajor IAT, Sya'roni, mengungkapkan bahwa di dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) terus dilakukan evaluasi kinerja. Ia menambahkan bahwa yang masih perlu dilakukan adalah kajian di luar itu, misalkan kajian dan seminar tentang al-Qur'an.

Senada dengan Sya'roni, Dekan FUHum, Mukhsin Jamil mengutarakan bahwa UIN Walisongo kedepannya sangat penting untuk memperhatikan aspek moral. Menurutnya kajian-kajian terkait anti korupsi masih belum masif. Selain itu, dalam mencapai suksesnya sistem yang diharapkan, menurutnya eksekusi harus dilakukan dari tingkat paling bawah. Sehingga sistem yang sudah

direncanakan semakin kuat, serta dibarengi dengan inovasi inspiratif seperti event-event penting tentang anti korupsi.

UIN Walisongo, terutama di lingkungan jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, di dalam mempelajari dan mendalami al-Qur'an memakai corak penafsiran *tafsir bi Ijtima'i* dan sebagian menggunakan corak sufistik serta teologi ini, di zaman modern dan berkemajuan seperti sekarang, meskipun sudah banyak prespektif keilmuan dalam perkembangannya dalam memandang tafsir al-Qur'an terkait sains dan ilmu sosial terus dilakukan progres-progres seperti juga pembahasan Ilmu Sosial budaya, Hermeneutik, serta pembahasan al-Qur'an dan IT.

Menurut kujur IAT ini, sivitas akademika UIN Walisongo dalam mendalami kajian al-Qur'an masih memiliki kendala-kendala yang menghambat seperti halnya masih sulitnya dalam memahami ilmu alat, bahasa, metode, dan kaidah-kaidah al-Qur'an. Namun menurutnya, saat sudah dikuasi akan mudah dalam memahami al-Qur'an. Di dalam memahami al-Qur'an, menurutnya yakni *qiroah* dan *tilawah* untuk memahaminya. Selain itu dengan tekstual dan kontekstual.

UIN Walisongo dengan visi dan paradigma *Unity of science*-nya, serta yang sudah terus menerus mengembangkan diri dalam perbaikan sistem dan kualitas di semua lini, menurut Mukhsin Jamil dan Mukhyar Fanani, harus juga tetap menjaga landasan moral keislaman di lingkungan UIN Walisongo, serta memiliki landasan



moral dalam setiap sikap atau tindakan. Dan korelasi antara ilmu agama, dalil, dan ilmu-ilmu mutakhir yang harus dipahami oleh setiap orang yang belajar *unity of science* (Sivitas UIN Walisongo). Sebab, dalam memahami kitab suci tidak cukup hanya secara harfiah saja. Namun harus juga melibatkan alam pikiran pada wilayah dan konteks tertentu.

Rektor UIN Walisongo, Muhibbin menerangkan bahwa sebagai perguruan tinggi yang berbasis agama, UIN Walisongo diharapkan memiliki integritas dalam segala unsur pengelolaan. Yakni pengelolaan dalam aspek manajemen, tata kelola organisasi, dan sumber daya manusia. Mereka semua harus memiliki komitmen yang sama dapat menjalankan amanahnya yang berintegritas. Zona Integritas harus mampu membangun akuntabilitas yang bisa dipercaya oleh masyarakat.<sup>124</sup>

## **2. UIN Walisongo dan Upaya Pemberantasan Budaya Korupsi**

Dalam lingkup nasional, Pemerintah Indonesia sudah berusaha memberantas korupsi melalui berbagai macam cara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang khusus menangani tindak pidana korupsi, telah melakukan berbagai macam upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

---

<sup>124</sup> <http://jateng.tribunnews.com/2017/09/05/uin-walisongo-bentuk-tim-pembangunan-zona-integritas-demi-hal-ini>

Sementara dalam agama Islam, upaya mencegah dan menindak pelaku korupsi dikenal dengan istilah *darul mafasid wa jalbul mashalih*. Pada dasarnya mencegah terjadinya korupsi sama halnya dengan mencegah terjadinya kerusakan di muka bumi atau dikenal dengan istilah *darul mafasid*. Sedangkan menindak tegas para pelaku korupsi bisa disebut sebagai wujud dari *jalbul masahil*.

Lantas di antara dua prosedur tersebut, manakah yang harus didahulukan? Dalam kaidah-kaidah ilmu fiqih, terdapat urutan dan tata cara dalam menerapkan konsep tersebut. Agama Islam mendahulukan upaya pencegahan kerusakan (pencegahan korupsi) dibandingkan penindakan terhadap pelaku perusakan (pelaku korupsi).<sup>125</sup>

Dalam praktiknya, pencegahan tindak korupsi dapat dilakukan secara personal maupun institusional. Keduanya harus berjalan beriringan untuk benar-benar melenyapkan tindak korupsi. Upaya pencegahan korupsi secara personal lebih menekankan pada penyadaran setiap individu akan hakikat jabatan yang hanya sementara. Selain itu seseorang juga harus menyadari bahwa keberadaannya sebagai makhluk yang memberikan manfaat kepada makhluk lain.<sup>126</sup> Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, "*sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain*".

---

<sup>125</sup> Hifdzil Alim, Mahbub Maafi Ramdhan, dkk, *Jihad NU Melawan Korupsi*, Lapkesdam PBNU, Jakarta Selatan, 2016, h. 8.

<sup>126</sup> Nina Mariani Noor, *Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi dari Konsep ke Praktek di Indonesia*, Globethics.net Focus, Switzerland, 2015, h. 55.

Sedangkan dalam lingkup institusional, pencegahan tindak korupsi dilakukan dengan cara melakukan pengawasan yang ketat terhadap jalur administrasi dan seluruh kebijakan yang diberlakukan oleh suatu lembaga.<sup>127</sup>

Pencegahan secara personal dan institusional semacam ini, juga diberlakukan dalam memberantas tindak korupsi di kampus UIN Walisongo Semarang. Hal ini merujuk pada visi UIN Walisongo Semarang, sebagai universitas Islam riset terdepan yang berpijak pada kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2038.<sup>128</sup>

Untuk bisa mencapai visi tersebut, salah satu aspek yang harus dipenuhi ialah bersihnya sistem birokrasi dari adanya tindak pidana korupsi. Pencegahan secara personal dan institusional tersebut diwujudkan dalam berbagai kebijakan yang telah diberlakukan di UIN Walisongo Semarang, baik secara struktural maupun kultural.

Dalam menanggapi wacana korupsi dan pemberantasan budaya korupsi di UIN Walisongo, menurut dua Dekan di kampus UIN, Mukhsin Jamil dan Muhyar Fanani, bahwa UIN Walisongo sudah melakukan evaluasi secara baik dalam rangka menanggulangi terjadinya praktik korupsi di lembaga perguruan tinggi Islam ini. Seperti sistem-sistem yang sudah dilakukan secara *online* dan transaksi non-tunai. UIN Walisongo juga termasuk Universitas Islam

---

<sup>127</sup> *Ibid* h. 56.

<sup>128</sup> *Buku Panduan Akademik UIN Walisongo Semarang Tahun 2017*, UIN Walisongo, Semarang, 2017

di Indonesia yang bisa dicontoh dalam rangka kelembagaan dan lingkungan yang jauh dari lingkaran korupsi.

Sedangkan menurut Kepala Biro AUPK, Priyono, menilai bahwa tidak ada praktik korupsi sampai sekarang di UIN Walisongo. Sebab menurutnya, kebijakan pimpinan (Rektor) sangat disiplin terhadap kegiatan-kegiatan yang ada. Dari penegakkan kedisiplinan, transparansi, dan pemberantasan korupsi sudah ditegakkan. Ia menambahkan ada beberapa pejabat yang sudah ditindak, misalnya turun pangkat karena memang menyimpang.<sup>129</sup>

Berdasarkan peraturan yang ada, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Instansi pemerintah dirasa perlu untuk membangun *pilot project* dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Reformasi tersebut, di UIN Walisongo Semarang, melalui Rektor Prof. Dr. Muhibbin M. Ag di tahun 2012 hingga sekarang memastikan tekadnya untuk menjadi kampus yang sudah berada di Zona Integritas (ZI) menuju kampus Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sekaligus Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini merupakan langkah yang diambil untuk membangun birokrasi yang tidak koruptif.

---

<sup>129</sup> Wawancara Priyono, M.Pd. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan UIN Walisongo, tanggal 08 Juni 2018

Salah satu strategi yang dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja UIN Walisongo salah satunya adalah dengan penguatan Satuan Pengawas Internal (SPI), sebuah lembaga yang sudah dibuat untuk mengawasi jalannya roda lembaga dan kinerja di dalamnya. Rektor UIN Walisongo berharap, unit ini mampu berperan penting untuk mendampingi dan membimbing unit-unit lainnya, utamanya dalam pelaksanaan kinerja, dari penyiapan proposal hingga pertanggungjawaban.

Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, proses pembangunan zona integritas dilaksanakan melalui penerapan program pencegahan korupsi yang terdiri atas 20 (dua puluh) kegiatan yang bersifat konkrit yang akan diukur melalui indikator proses.<sup>130</sup>

Di UIN Walisongo Semarang, sebagaimana disebutkan Rektor, memiliki Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang mana memiliki tanggung jawab terhadap proses laporan pertanggungjawaban keuangan terkait bidang non-akademik. Tugasnya yakni mengawasi dan mengendalikan proses penggunaan anggaran di UIN Walisongo.

---

<sup>130</sup> <https://www2.kemenag.go.id/berita/238483/serial-bangun-zona-integritas-dirjen-phu-ajak-belajar-dari-filosofi-manggis-dalam-berantas-korupsi>

SPI ini berdasarkan pada PMA tahun 2017 nomor 25. Bahwa setiap PTKIN mulai tahun 2017 harus memiliki Satuan Pengawasan Internal (SPI). Yakni semua STAIN, IAIN, dan UIN harus sudah memiliki SPI.

Dengan memberlakukan sistem “Preventif Audit” yang dimiliki, hal itu merupakan sebuah upaya pemberantasan atas penyalahgunaan yang terjadi (perilaku dan tindakan korup). Sekretaris SPI UIN Walisongo, Andi Fadlan menyebutkan, sistem tersebut adalah bentuk upaya agar anggaran yang digunakan dapat sesuai dengan perencanaan yang sebelumnya sudah di susun, tepat sasaran, tepat waktu, dan menghasilkan *output* yang jelas.

Salah satu bukti sebagaimana disebutkan sebelumnya yakni UIN Walisongo adalah Zona Integritasi dan Wilayah bebas dari korupsi harapannya adalah terbukti di tahun 2016-2017, UIN Walisongo setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan *zero founded* (tidak ada temuan korupsi atau penyelewengan anggaran).

Menurut pihak SPI sendiri, upaya-upaya untuk melakukan tindakan korupsi oleh sivitas di dalam kampus UIN Walisongo dinilai tetap ada (berpeluang). Meskipun presentasinya terbilang tidak banyak. Dan jika benar-benar terjadi tindakan tersebut, akan segera ditindak dengan diberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Seperti peringatan hingga penurunan pangkat.

Proses pemberian sanksi korupsi akan diberikan kepada yang bersangkutan yakni setelah melalui hasil investigasi tim yang sudah dibentuk rektorat melalui SPI, baru kemudian melaporkan hasilnya kepada pimpinan. Kemudian pimpinan (Rektor) yang akan mengambil keputusan dan tindakan untuk menginvestigasi lebih lanjut untuk memberikan peringatan dan sanksi kepada yang bersangkutan.<sup>131</sup>

Pada Mei 2017 lalu, UIN Walisongo telah mengukuhkan sebanyak 40 orang untuk menjadi tim pembangunan zona integritas dan agen perubahan UIN Walisongo untuk benar-benar menjadi kampus Zona Integritas (ZI) menuju kampus Wilayah Bebas Korupsi (WBK), sekaligus Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Selain itu zona integritas, di dalam acara pengukuhan tersebut, Rektor UIN Walisongo juga menjelaskan bahwa esensi yang paling fundamental dalam zona integritas adalah pengawasan berada pada individu masing-masing dan menjadi sebuah keyakinan ataupun perbuatan sehari-hari.<sup>132</sup> Zona integritas harus memiliki prosedur standar operasional yang jelas dalam setiap pelaksanaan programnya.

Dalam pemberlakuan sistem “Preventif Audit”, SPI UIN Walisongo berjalan dengan melakukan audit secara menyeluruh. Mulai dari perencanaan sampai pelaporan. Kesemuanya akan

---

<sup>131</sup> Wawancara Andi Fadlan, Sekretaris Satuan Pengawasan Internal UIN Walisongo tanggal 08 Juni 2018

<sup>132</sup> <http://jateng.tribunnews.com/2017/09/05/uin-walisongo-bentuk-tim-pembangunan-zona-integritas-demi-hal-ini>

direview oleh tim SPI. Kemudian dilakukan verifikasi dari sisi efektifitas dan efesiensinya, serta revelan atau tidaknya antara susunan anggaran dan apa yang akan dikerjakan. Apakah juga hal tersebut ada hubungannya atau tidak dengan Renstra (Rencana Strategis), ataukah kegiatan tersebut hanya diada-adakan saja. Menurut Andi, Perguruan tinggi harus memiliki visi misi dan rencana strategis.

Dalam penyusunan RAB yang diberikan untuk di-review oleh SPI misalnya, jika tidak sesuai dengan peruntukannya, maka menurut Andi akan dicoret. Maksudnya untuk diperbaiki atau dihilangkan. Dari proposal itu, SPI melihat lagi tentang rasionalisasi anggarannya, *output*-nya, jika proposal sudah bagus baru bisa dijalankan, yang kemudian baru proses SPJ. Di proses SPJ juga akan menggunakan beberapa standar, salah satunya adalah dengan SBM (Standar Biaya Maksimum), jika tidak ada di SBM, maka tidak dapat di SPJ kan. Sebelum SPJ selesai, SPI juga melakukan verifikasi faktual ke lapangan.

Andi menyontohkan mislnya ada kegiatan seminar di hotel, SPI akan melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi, kepada pembicara, dan pengecekan RAB acara yang sebelumnya direncanakan. Jika di dalam rencana, pembicara akan mengisi materi selama dua jam, SPI akan mengecek secara langsung dan bertanya kepada narasumber. Atau jika tidak secara langsung, SPI kemudian menghubungi pembicara melalui telepon.



Kemudian lebih dalam yakni terkait jumlah peserta kegiatan juga dilakukan pengecekan secara langsung oleh SPI. Apakah nama-nama peserta yang di-SPJ-kan tersebut benar-benar mengikuti acara atau tidak. Dalam hal ini dilakukan untuk diambil beberapa *sampling* kebenaran laporan pertanggungjawaban dari kegiatan yang dilakukan oleh sivitas akademika UIN Walisongo Semarang.

Andi Fadhlani juga menegaskan bahwa setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan faktanya, maka yang ada yakni terjadi penggelembungan dan terdapat indikasi korupsi. Di UIN Walisongo, menurut Andi, bahwa kampus UIN Walisongo sudah membangun sistem agar korupsi di dunia pendidikan berkurang. Angka budaya korupsi di UIN Walisongo terus ditekan dan pegawai yang berpeluang (korup) tidak berani bermain-main dengan anggaran yang ada. Meskipun menurutnya, terdapat satu atau dua orang yang masih terbawa *mindset* lama. Yakni *mindset* bagi-bagi dan pembengkakan anggaran tapi tidak digunakan dengan semestinya.

Mindset lama disini maksudnya adalah bahwa masih ada orang yang berpikir, dengan sistem baru (Preventif Audit), mereka merasa bahwa SPJ yang sebelumnya dirasa mudah menjadi semakin sulit dan semacamnya yang intinya terjadi protes kebijakan atau sistem oleh beberapa orang yang berpola pikir lama ini.

Menurut lembaga SPI yang sengaja dibentuk untuk terciptanya wilayah yang bersih dan tertata dari tindakan korup melalui sistem, hal tersebut dianggap sebagai tantangan tersendiri

untuk merubah budaya korup yang sebelumnya ada di kalangan sivitas UIN Walisongo.

Andi menilai, jika melihat kepatuhan penggunaan anggaran per-fakultas dan unit-unit di UIN Walisongo, semakin kesini menurutnya sudah cukup bagus, termasuk ditingkat mahasiswa pun juga sudah cukup baik. Ia mengatakan bahwa dulu awal-awal serba hancur. Bahkan, menurutnya di awal-awal, SPI memperoleh perlawanan dari pengelola anggaran karna sistem baru ini dianggap merubah pola yang sudah tertanam dan menjadi *mindsetnya*, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Terkait sistem keuangan di UIN Walisongo, menurut AUPK Priyono, di UIN Walisongo sudah ada sistemnya. Yakni sudah masuk pada era non tunai, gaji pegawai tidak dibayarkan dalam bentuk tunai yang memang agak rawan untuk diselewengkan. Meskipun sistem non tunai itu ada *plus* dan *minusnya*. Untuk sistem transparansi, tidak semuanya bisa ditransparasikan. Itu ada di UU nomor 14 tahun 2008.

Terkait persoalan transparansi anggaran yang sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 oleh Priyono. Yakni meskipun keterbukaan informasi publik sudah dijamin dalam undang-undang, namun keterbukaan tersebut tetap memiliki batasan-batasan yang harus ditaati bersama.<sup>133</sup>

---

<sup>133</sup> Wawancara Priyono, M.Pd. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan UIN Walisongo, tanggal 08 Juni 2018

Dalam bab V pasal 17, menyebutkan 10 poin informasi yang tidak boleh sembarang dipublikasikan kepada masyarakat, yaitu:<sup>134</sup>

1. Informasi yang bisa menghambat proses penegakkan hukum
2. Informasi yang bisa mengganggu kepentingan perlindungan hak dan kekayaan intelektual dari persaingan yang tidak sehat
3. Informasi yang dapat membahayakan pertahanan negara
4. Informasi yang membahayakan keamanan negara
5. Informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
6. Informasi yang dapat membahayakan potensi perekonomian Indonesia
7. Informasi yang berisi tentang wasiat seseorang
8. Informasi berupa surat-surat antar badan publik
9. Informasi yang bisa mengganggu hubungan dengan Indonesia dengan negara lain
10. Informasi lain yang tidak diperbolehkan untuk dipublikasikan berdasarkan undang-undang

Priyono menegaskan bahwa UIN Walisongo menghormati adanya undang-undang keterbukaan informasi seperti yang telah disebutkan di atas. Namun Priyono juga mengingatkan bahwa terdapat batasan-batasan keterbukaan informasi yang juga harus ditaati dalam undang-undang tersebut.

Andi Fadlan menuturkan dan berpesan kepada sivitas akademika UIN Walisongo, bahwa sekecil apapun budaya korupsi itu

---

<sup>134</sup> Undang-undang Keterbukaan Informasi

akan berpengaruh dan berdampak kepada mereka sendiri. Kalau ditingkat mahasiswa dan pegawai, budaya korupsi sudah terjadi dan menganggap hal-hal yang dikiranya kecil tersebut sebagai hal yang lumrah, maka tunggu saja saatnya bahwa budaya korupsi ini menggerogoti segala hal.<sup>135</sup>

UIN Walisongo yang sebelumnya dijelaskan memiliki prestasi atau unggul dalam pemberantasan korupsi di dunia pendidikan di perguruan tinggi Islam melalui sistem dan model yang dibangun dalam melawan budaya korupsi selayaknya tidak berhenti di sini saja. Namun terus melakukan perbaikan dan inovasi-inovasi inspiratif dalam rangka meningkatkan semangat dan gerakan anti korupsi yang bisa menjadi budaya sivitasnya kapan saja.

Rektor UIN Walisongo 2003-2010, Prof. Dr. Abdul Jamil M.A menilai, bahwa UIN Walisongo, di era rektor Muhibbin ini terbilang bagus dibandingkan dengan di periodenya. Dalam hal administrasi misalnya, sivitas akademik diikat dan terekam di dalam sistem *online*, sehingga dapat diperiksa oleh siapa saja. Dari sana, kedisiplinan pun akan meningkat. Selanjutnya adalah fasilitas kampus mengalami peningkatan yang signifikan dan transformasi IAIN menjadi UIN menurut beliau, menjadikan mandat ilmu yang

---

<sup>135</sup> Wawancara Andi Fadlan, Sekretaris Satuan Pengawasan Internal UIN Walisongo tanggal 08 Juni 2018

ditekuni di dalam perguruan tinggi menjadi lebih luas dan UIN Walisongo bisa berkompetisi dengan perguruan tinggi yang lain.<sup>136</sup>

---

<sup>136</sup> Ani, *Menakar Dua Periode Muhibbin untuk UIN Walisongo* dalam *el-Manhaj*, Edisi 27, Mei 2018, h. 25-27.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah membahas secara menyeluruh terkait pembahasan yang diteliti oleh penulis. Penulis menyimpulkan;

Setelah ditinjau dari penafsiran ayat-ayat tentang tindak pidana korupsi yang sudah membudaya di tengah masyarakat, dapat ditarik beberapa unsur-unsur tentang korupsi itu sendiri. Di era yang semakin maju ini, korupsi yang sudah masuk ke dalam dunia pendidikan di Indonesia, padahal pendidikan sebenarnya adalah tonggak utama dalam rangka pemberantasan budaya korupsi. Dalam implementasinya, UIN Walisongo sebagai kampus Islam yang di dalamnya terjadi transfer ilmu pengetahuan yang kemudian menjadi sebuah tindakan serta birokrasi yang mengatur jalannya lembaga dalam rangka wacana budaya korupsi yang mengancam terbilang cakup. Sivitas akademika UIN Walisongo menyepakati bahwa tindakan korupsi adalah perbuatan dosa yang haram untuk dilakukan di wilayah UIN Walisongo karena bertentangan dengan al-Qur'an. Meskipun tidak semua sivitasnya memahami term-tem yang sudah termaktub di dalam ayat al-Qur'an. Begitupun dalam realitasnya, meski sejak 2012, UIN Walisongo sudah menjadi wilayah yang bebas dari korupsi dan *zero founded* oleh temuan BPK, namun zona integrasi yang sudah dibangun dan sistem yang telah dikembangkan akan terus melakukan evaluasi ke arah yang lebih baik lagi seperti

transparansi, preventif audit, dan lainnya. Termasuk juga sanksi-sanksi tegas kepada siapapun yang berniat atau sudah terlanjur melakukan tindak pidana korupsi ini. Selain itu juga kajian-kajian maupun kegiatan-kegiatan inspiratif yang menitikberatkan al-Qur'an dan pengutan moral dalam rangka melawan budaya korupsi di lingkungan UIN Walisongo.

## **B. Saran-saran**

1. Apa yang telah peneliti paparkan di dalam penelitian ini hendaknya semakin menguatkan peran perguruan tinggi dalam rangka pemberantasan korupsi yang kian masif melalui berbagai kajian maupun sistem inspiratif di UIN Walisongo.
2. Kepada pihak yang berada di lingkaran kebijakan, diharapkan meningkatkan integritas yang sudah dimiliki. Karena korupsi bukan hanya terkait tentang uang, namun tentang moralitas dan lainnya. Pendidikan moral dan ketegasan sanksi harus terus ditingkatkan.
3. Terus melakukan pembangunan bukan hanya fisik namun pembangunan sumber daya manusia melalui kajian maupun kegiatan khususnya terkait pendalaman ilmu ilahiah yang dikemas dengan wajah kekinian.
4. Penelitian ini bisa ditindaklanjuti ke dalam aspek yang lebih luas lagi terkait bagaimana bersama-sama melawan ironi daripada bangsa dan agama.

5. Penelitian ini bisa ditindaklanjuti sebagai salah satu dari sekian banyak referensi terkait yang dibahas. Karena fakta yang diteliti cukup menarik untuk dikaji dan dijadikan acuan kepada individu maupun lembaga yang fokus dalam pemberantasan korupsi.
6. Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan karena peneliti sedang berada di situasi dan kondisi yang cukup sulit karena berada di semester yang paling akhir selama meneliti dan kuliah. Temuan di dalamnya bersifat dinamis dan bisa untuk dilakukan perbaikan atau penelitian lanjutan terkait yang dibahas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Bagir, Zainal, *Integrasi Ilmu dan Agama, Interpretasi dan Aksi*, Mizan, Bandung, 2005
- Agama Republik Indonesia, Departemen, *al-Quran dan Terjemah*, CV. Toha putra, Semarang, 1989
- Ahmad, Rumadi, dkk, *Jihad NU Melawan Korupsi: Studi Kontemporer Fiqih Antikorupsi di Indonesia*, Lakpesdam PBNU, Jakarta, 2016
- Bagir, Haidar, *Korupsi dari Perspektif Filsafat Dan Etika Islam, dalam Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi*, Globethics.net Focus, 2015
- Bisri dan Munawir AF, Adib, *Kamus al-Bisri*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1999
- Buku Panduan Akademik UIN Walisongo Semarang Tahun 2017*, UIN Walisongo, Semarang, 2017
- Corruption Watch, Indonesia, *Satu Dasawarsa Pemberantasan Korupsi Pendidikan, 2003-2013*, Divisi Monitoring Pelayanan Publik-Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2013
- Hardjono, Anwar, *Hukum Islam; Keluasan dan Keadilannya*, Bulan Bintang, Jakarta, 1968
- Hasibuan, Albert, *Titik Pandang untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997
- Helmi Umam, M., *Pandangan Islam tentang Korupsi*, Jurnal Teosofi Vol. 3 Nomor 2 Desember 2013
- Husein Alatas, Syed, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, 1987

- \_\_\_\_\_, Syed, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1986,
- Ilmi, Syaiful, *Melacak Term Korupsi Dalam Al-Qur'an Sebagai Epistemologi Perumusan Fikih Antikorupsi*, Jurnal Khatulistiwa, Vol. 1 Nomor 1 Maret 2011
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002
- Karim, Abdul, *Teologi Anti Korupsi*, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2013
- Katsir, Ibnu, *Tafsir al-Qur'an al Adzim*, Dar Thoyyibah Linnasr wa Attauzi', Riyadh, 1999
- Lubis, Mukhtar, *Negara dan Korupsi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Edisi I, 2008
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999
- Margono, S., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Mariani Noor, Nina, *Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi dari Konsep ke Praktek di Indonesia*, Globethics.net Focus, Switzerland, 2015
- Muda Harahap, Hakim, *Ayat-ayat Korupsi*, Gama Media, Yogyakarta, 2009
- Mulayana dan Rakhmat, *Komunikasi Antarbudaya; Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya*, Mizan, Bandung, 2002
- Musyafaullah, *Muhamadiyah dalam Gerakan Anti Korupsi*, Jurnal Penelitian Agama dan Sosial, Vol. V, Desember 2004
- Nurul Irfan, M., *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2011

- Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Badan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Jakarta, 1999
- Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- Quraish Shihab, Muhammad., *Tafsir al-Mishbah*, Lentera Hati, Ciputat, 2000
- Rasyid Ridha, Muhammad, *Tafsir al Manar*, Alhaiah al Misriyah, 1990
- Santoso, *Korupsi dan Mentalitas: Kendala kultural dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal UNAIR, Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik Vol. 27, No. 4, tahun 2014
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Tarsito, Bandung, 1994
- Suwitri, Sri, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia; Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi, Dialogue*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, JIAKP, vol. 4, no. 1, januari 2007
- Tester, Keith, *Media Budaya dan Moralitas*, Juxtapose, Yogyakarta, 2003
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cet. I, 2008
- Warson Munawir, Ahmad, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta, 1984
- Widjoyanto, Bambang, Abdul Malik Gismar, dan Laode M. Syarif (ed.), *Koruptor itu Kafir: Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Mizan, Jakarta, Cet. I, 2010
- Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009

Bagir, Zainal Abidin (ed), *Integrasi Ilmu dan Agama, Interpretasi dan Aksi*, Mizan, Bandung, 2005,

Djabbar, Faisal, *Tentang Kurikulum Antikorupsi* dalam <http://smk3ae.wordpress.com/2009/02/02/tentang-kurikulum-antikorupsi-2/> diakses pada 23 Januari 2018

<http://jateng.tribunnews.com/2017/09/05/uin-walisongo-bentuk-tim-pembangunan-zona-integritas-demi-hal-ini>

<http://khudorisoleh.blogspot.com.integrasi-ilmu.html>,

<http://swaramuslim.net/siyasah/more.php>

<https://www.hariansemarang.com/2016/06/07/sejak-2012-uin-walisongo-bebas-korupsi/>

<https://www2.kemenag.go.id/berita/238483/serial-bangun-zona-integritas-dirjen-phu-ajak-belajar-dari-filosofi-manggis-dalam-berantas-korupsi>

Kpk.go.id, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak pidana Korupsi,

Wawancara Andi Fadlan, Sekretaris Satuan Pengawasan Internal UIN Walisongo tanggal 08 Juni 2018

Wawancara Bela Maisyaroh, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo di depan Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa FUHum tanggal 05 Mei 2018

Wawancara Dr. M. Mukhsin Jamil, M.Ag., Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, tanggal 19 Januari 2018

Wawancara Dr. Muhyar Fanani, M.A., Pakar Hukum Islam dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo, tanggal 22 Januari 2018

Wawancara Hafidzil Mustaqim, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo di depan Perpustakaan Syariah kampus 3, tanggal 03 April 2018

Wawancara Muhammad Sya'roni, M.Ag, Kepala Jurusan Ilmu al-Quran dan Tafsir, UIN Walisongo, tanggal 18 Januari 2018

Wawancara Muhammad Sya'roni, M.Ag, Kepala Jurusan Ilmu al-Quran dan Tafsir, UIN Walisongo, tanggal 18 Januari 2018

Wawancara Priyono, M.Pd. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan UIN Walisongo, tanggal 08 Juni 2018

Wawancara Priyono, M.Pd. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan UIN Walisongo, tanggal 08 Juni 2018

## LAMPIRAN



## UIN WALISONGO SEMARANG



## TIM ZONA INTEGRITAS



PRIYONO M.Pd, KABIRO AUPK



ABRAHAM SAMAD, MANTAN KETUA KPK SAAT MENGISI  
SEMINAR TEMA KORUPSI DI UIN WALISONGO SEMARANG



UIN AR-RANIRY ACEH BELAJAR SISTEM PENGELOLAAN DI  
UIN WALISONGO



UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG BELAJAR SISTEM  
PENGELOLAAN DI UIN WALISONGO



## SPANDUK ANTI KORUPSI DI UIN WALISONGO



## KANTOR AUPK DAN SPI UIN WALISONGO



### Draft Pertanyaan Wawancara

No.	Pertanyaan	Target Narasumber	Hal yang ingin digali
1.	Bagaimana corak dan metode penafsiran yang diterapkan di UIN Walisongo dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an?	Kepala Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir FUHUm UIN Walisongo Semarang	Mengetahui corak penafsiran al-Qur'an yang diterapkan di UIN Walisongo
2.	Bagaimana kajian penafsiran al-Qur'an di UIN Walisongo dalam memandang fenomena yang bersifat kontekstual seperti korupsi yang menjadi ironi masyarakat?	Kepala Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir FUHUm UIN Walisongo Semarang	Mengetahui pandangan ahli tafsir UIN Walisongo dalam memandang fenomena korupsi
3.	Kendala apa saja yang dihadapi dalam rangka penafsiran al-Qur'an yang tekstual dan kontekstual?	Kajur IAT, Dekan FISIP, Dekan FUHUm	Mengetahui kendala-kendala dalam mengkaji al-Qur'an
4.	Bagaimana studi penafsiran al-Qur'an dapat diterapkan, tidak hanya etik, namun juga etik di kalangan sivitas akademika UIN Walisongo Semarang?	Kajur IAT, Dekan FISIP, Dekan FUHUm	Mengetahui bagaimana agar sivitas akademika UIN Walisongo memahami penafsiran

5.	Bagaimana Visi <i>Unity of Science</i> jika dikorelasikan dengan penafsiran al-Qur'an?	Dekan FISIP, Dekan FUHum	Mengetahui terapan paadigma <i>unity of science</i> korelasinya dengan penafsiran
6.	Bagaimana Anda memandang fenomena korupsi di dunia Pendidikan?	Sivitas Akademika UIN Walisongo (Kajur IAT, Dekan FISIP, Dekan FUHum, Kabiرو AUPK, Mahasiswa, SPI UIN Walisongo)	Mengetahui narasumber dalam memandang wacana korupsi
7.	Bagaimana representasi wacana korupsi dan anti korupsi di UIN Walisongo?	Sivitas Akademika UIN Walisongo (Kajur IAT, Dekan FISIP, Dekan FUHum, Kabiرو AUPK, Mahasiswa, SPI UIN Walisongo)	Mengetahui pandangan narasumber memandang "korupsi" dan "anti korupsi" di lingkungan UIN Walisongo
8.	Kajian seperti apa saja yang sudah dan akan dilakukan dalam membendung dan memberantas korupsi?	Dekan FISIP, Dekan FUHum, Kabiرو AUPK	Mengetahui kajian yang dipakai di UIN Walisongo terkait wacana korupsi
9.	Bagaimana sistem yang berlaku demi menanggulangi adanya praktik korupsi di	, Kabiرو AUPK, SPI UIN Walisongo	Mengetahui sistem yang berlaku

	dunia pendidikan khususnya di UIN Walisongo?		
10.	Bagaimana representasi sistem kelembagaan yang sudah dibangun dan apakah pernah terjadi masalah yang berkaitan dengan korupsi?	Dekan FISIP, Dekan FUHum, Kabiرو AUPK, Mahasiswa, SPI UIN Walisongo	Mengetahui pandangan narasumber terkait sistem kelembagaan dan kasus yang terjadi
11.	Bagaimana upaya-upaya prevensi menurut Anda untuk membangun lembaga yang bersih dari praktik korupsi?	Sivitas Akademika UIN Walisongo (Kajur IAT, Dekan FISIP, Dekan FUHum, Kabiرو AUPK, Mahasiswa, SPI UIN Walisongo)	Mengetahui upaya-upaya prevensi untuk membangun lembaga UIN Walisongo yang bersih dari praktik korupsi
12.	Apakah sivitas akademika UIN Walisongo memahami secara detail tentang term-term tentang kejahatan korupsi yang ada di dalam ayat-ayat al-Qur'an?	Sivitas Akademika UIN Walisongo (Kajur IAT, Dekan FISIP, Dekan FUHum, Kabiرو AUPK, Mahasiswa, SPI UIN Walisongo)	Mengetahui pemahaman sivitas akademik tentang penafsiran al-Qur'an tentang korupsi
13.	PR apa saja yang masih harus dilakukan UIN Walisongo terkait bahaya budaya	Dekan FISIP, Dekan FUHum, Kabiرو AUPK, Mahasiswa, SPI	Mengetahui yang harus dilakukan tentang dampak dan bahaya

	korupsi?	UIN Walisongo	korupsi
14.	Sanksi apa saja yang diterapkan jika sivitas akademika UIN Walisongo terjadi praktik korupsi?	Kabiro AUPK, Mahasiswa, SPI UIN Walisongo	Mengetahui sanksi jika terjadi praktik korupsi
15.	Apa harapan Anda agar seluruh kalangan sivitas akademika UIN Walisongo memahami betul (secara nalar etik maupun emik) terkait masalah korupsi yang menjadi ironi dan bagaimana yang semestinya dilakukan?	Sivitas Akademika UIN Walisongo (Kajur IAT, Dekan FISIP, Dekan FUHum, Kabiro AUPK, Mahasiswa, SPI UIN Walisongo)	Mengetahui harapan narasumber di UIN Walisongo dalam memahami wacana korupsi (baik etik maupun emik) serta yang semestinya dilakukan

## **Link Rekaman Wawancara Narasumber**

### **Wawancara pak Mukhyar Fanani**

<https://drive.google.com/open?id=1FF1iV1zjFMm8P5O171FGLjShblv8xhQA>

### **Wawancara Pak Mukhsin Jamil**

<https://drive.google.com/open?id=1rKjrOcFaecni4W2ZWVjkgvPZp4oTli bn>

### **Wawancara Pak Sya'roni**

<https://drive.google.com/open?id=14ZakOpxLPXyVZbZ0ZIBZVNwnUCOVEPC3>

### **Wawancara AUPK UIN Walisongo**

[https://drive.google.com/open?id=1SRuHUXt4KKzZxGHP9gCDLpDinSQ\\_S6R9](https://drive.google.com/open?id=1SRuHUXt4KKzZxGHP9gCDLpDinSQ_S6R9)

### **Wawancara SPI UIN Walisongo**

<https://drive.google.com/open?id=1tpIQj6ZASGRZE-4uCR4Uo-dq8izJXQTT>

### **Wawancara Alumni UIN Walisongo**

<https://drive.google.com/open?id=1RYhMFRXV8Z0Y8LPgTLr9CHhniRJOsJ5u>

### **Wawancara Mahasiswa UIN Walisongo 1**

<https://drive.google.com/open?id=14wOzC2kp-CuaQji3mLNIFoZsUsJ1XEzm>

### **Wawancara Mahasiswa UIN Walisongo 2**

[https://drive.google.com/open?id=1stbYzcHV\\_w5eZlgSdw62pMWGs4E7LBu5](https://drive.google.com/open?id=1stbYzcHV_w5eZlgSdw62pMWGs4E7LBu5)

## SURAT IJIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG FAKULTAS USHULUDDIN DAN  
HUMANIORA

Jalan Prof. Dr. Hamka Km 01, Ngaliyan, Semarang 50189.  
Telepon (024) 7601294, Website : ushuluddin.walisongo.ac.id

Nomor : B- /Un.10.2/K/PP.00.9/ /2017  
Lamp : -  
Hal : Permohonan izin penelitian

Semarang, .....

Kepada Yth

Narasumber ..... di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada :

Nama : M. Aqib Ishlahudin  
NIM/Program Smt : 114211051 /SI/ X III  
Jurusan : IAT  
Alamat : Jepara  
Tujuan Research : SIVITAS AKADEMIKA UIN WALISONGO SEMARANG  
Judul Skripsi : TAPSIK ANTI KORUPSI DI KALANGAN SIVITAS AKADEMIKA UIN WALISONGO SEMARANG  
Waktu Penelitian :  
Lokasi : KAMPUS UIN WALISONGO SEMARANG

Bersama ini kami lampirkan Proposal Penelitian dan Instrumen Pengumpulan data yang bersangkutan.

Demikian atas perhatian dan terakbulnya permohonan ini kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan

Dr. H. M. Mukhsin Jamil M.Ag



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Muhammad Adib Ishlahuddin  
TTL : Jepara, 07 Mei 1992  
Agama : Islam  
Alamat : Dk. Metawar, Desa Ujungwatu, Kecamatan  
Donorojo, Kabupaten Jepara RT.04 RW.01  
No. Hp :082135673569

### **Riwayat Pendidikan Formal**

1. MI Nurul Huda 02 lulus pada tahun 2003/2004
2. MTS Salafiyah Kajen lulus pada tahun 2008
3. MA Salafiyah Kajen lulus pada tahun 2010

### **Pengalaman Organisasi**

1. Ketua di Kelompok Studi Kebangsaan Walisongo Semarang
2. Pendiri Marhaenis Pecinta Alam
3. Litbang LPM IDEA UIN Walisongo Semarang
4. Divisi Politik di GmnI UIN Walisongo Semarang

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebesar-besarnya untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Juli 2018

M. Adib Ishlahuddin